Skema 2. Bangun teori dalam riset (skema disusun peneliti dengan mengadopsi Salim (2006) dan Ihalauw (2004).
Catatan : ——— diartikan sebagai garis hubung

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis sebagai konsekuensi dari tujuan penelitian, untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang bagi sejumlah individu atau sekelompok orang, dianggap bersumber dari masalah sosial dan kemanusiaan. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif dalam prosesnya melibatkan upaya-upaya penting, antara lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke umum (induktif) dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013: 5).

Peneliti menerapkan cara pandang penelitian yang berfokus pada makna individual serta menggali suatu persoalan secara detail dan kompleks (Creswell, 2014: 147). Mengungkap hal-hal secara mendalam *(indeep*) yang sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017-2018, mengenai perempuan yang meraih sukses dalam pelaksanaan rekrutmen legislatif pada periode Pemilu legislatif yang telah dilaksanakan tahun 2014, 2009 dan 2004. Peneliti juga mengaitkan dengan periode yang saat ini berjalan, melihat perempuan berjuang mempersiapkan rekrutmen legislatif pada Pemilu 2019.

Feminisme menjadi perspektif dalam penelitian ini, dengan beberapa karakteristik, antara lain: a) perspektif; penelitian ini fokus pada persoalan, kepentingan, dan kebutuhan perempuan sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender, ataupun akibat pemantapan ideologi gender yang dianggap merugikan masyarakat pada umumnya. Abdullah (2006:247) menjelaskan pentingnya pendekatan subyektif, dan berupaya untuk mengerti pandangan dari dalam/*inside view* mengenai alasan yang mendasari suatu tindakan yang telah dilakukan oleh perempuan. Berarti, penilaian negatif atau positif atas tindakan yang dibuat oleh perempuan, hanya dapat dilakukan ketika sudah diketahui alasan yang mendasarinya. Pendekatan subyektif digunakan untuk membangun konsep, ukuran dan nilai- nilai yang dipahami oleh perempuan sendiri. Ukuran ini, dimanfaatkan untuk ”mengukur” posisi perempuan dalam rekrutmen legislatif. b). Tinjauan holistik/interdisipliner: yakni menyadari tentang kompleksitas hubungan, serta keterkaitan berbagai aspek/dimensi dalam kehidupan manusia, dengan menyadari tentang kompleksitas yang perlu diungkap untuk dapat

memahami masalah secara utuh. c). Tujuan/manfaat: adalah berorientasi konseptual-praktis, yakni bermaksud untuk membantu perempuan agar mereka dapat keluar dari posisinya yang termarginalkan, sub-ordinat, dan tertindas. Oleh sebab itu, diperlukan keberpihakan terhadap kelompok perempuan yang tertindas. d). Metode pengumpulan data: yang mementingkan didengar dan terungkapnya penghayatan inter (subyektif) individu dan kelompok, sekaligus proses, dinamika, dan kompleksitasnya. Beragam metode dapat digunakan bergantung pada masalah dan tujuan penelitiannya. e). Peneliti dalam penelitian ini, terbuka dan dapat mengerti, aktor-aktor, kelompok yang mempunyai kepentingan untuk memperhatikan status quo atau pihak yang mampu mengubah kemapanan (Nurhaeni, 2014).

3.2. Fokus dan Situs Penelitian

Riset ini meletakkan fokus kajian pada perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Jawa Tengah. Perempuan dalam riset ini, didefinisikan sebagai agen atau aktor yang memiliki kemampuan memperjuangkan (mempertahankan/meraih posisi) dari sesuatu yang dianggap bernilai yakni kepentingan, kekuasaan atau jabatan dan kedudukan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam berpolitik. Secara lebih terperinci, studi ini dilakukan dengan menelusur kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kecerdasan dalam mengubah cara berfikir, mengarahkan, serta tindakannya ketika menghadapi kesulitan dan rintangan; strategi; kapasitas perempuan; dan faktor-faktor yang mendukung. Kemampuan, sumberdaya dan daya juang perempuan melewati rintangan-rintangan untuk mengikuti rekrutmen di partai politik sampai dengan pemilihan

legislatif di Jawa Tengah yakni pada proses penjaringan, proses pencalonan dan proses penetapan melalui hal-hal yang berkaitan dengan agensi perempuan, dan struktur yang dapat dieksplorasi dari arena pada proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, modal perempuan dalam rekrutmen legislatif, *distinction* perempuan dan dominasi simbolik yang dialami perempuan. Riset mengenai perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, dijabarkan dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut.

1. Perempuan sebagai agen dan bagian dari struktur rekrutmen legislattif di Jawa Tengah.

   Perempuan sebagai agen yakni perempuan yang berjuang selama ini sehingga ia memenangkan pemilihan legislatif di Jawa Tengah. Mengungkap perempuan sebagai agen, secara utuh sebagai individu yang sesunggunya dipengaruhi oleh banyak faktor.

   a. Habitus perempuan, meliputi; 1) struktur kognitif perempuan; 2) persepsi perempuan terhadap suatu nilai tertentu yang memunculkan gaya dan performan, praktik-praktik kehidupan, 3) pilihan tindakan- tindakan politik; 4) kebiasaan yang melekat.

   b. Modal yang dimiliki perempuan, yakni bentuk-bentuk, sumber, penggunaan, kepemilikan perempuan terhadap modal ekonomi (uang, tanah, buruh, pendapatan); modal sosial, yakni jaringan sosial yang perempuan miliki dalam relasinya dengan pihak lain yang memiliki kuasa; modal kultural, yakni keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga (kemampuan perempuan menampilkan diri di

publik, pemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, dll); modal simbolis seperti; segala bentuk otoritas, prestise, legitimasi, dan status yang menjadi kekuatan perempuan untuk bertarung dalam proses rekrutmen.

Struktur di luar perempuan, yang dapat diteliti dari hal-hal yang melingkupi perempuan dalam arena rekrutmen legislatif.

a. Arena, yang diantaranya, dapat ditelisik dari; a).dinamika regulasi; perubahan Undang-undang partai politik dan Undang-undang pemilu serta Peraturan KPU yang mengatur keterlibatan perempuan; b) Budaya masyarakat terhadap perempuan; c) Dinamika kepentingan partai politik; d) Sistem pemilu yang ditetapkan; e) Dukungan media massa; f) Dukungan media sosial; g) Rintangan-rintangan feminisme dan harapan-harapan konstituen ketika mereka akan melampaui proses pemilihan legislatif.
b. Dominasi simbolik, adalah dominasi yang dialami perempuan dalam berpolitik seperti himpitan masyarakat patriarki, dengan budaya, konstruksi sosial yang memarginalkan perempuan, tekanan institusi politik (partai politik) yang masih berwajah maskulin misalnya dalam pemilihan pengurus partai politik, penetapan daerah pemilihan. Pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap perempuan saat rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.
c. *Distinction*, yang dilihat dari usaha perempuan untuk mengembangkan ciri budaya yang mereka miliki agar ada pembeda antara satu dan lainnya. Tindakan perempuan untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat.

2. Kesenjangan gender yang dialami perempuan dalam rekrutmen legislatif, dilihat dari gejala-gejala;
   a. Akses, yakni peluang perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Dukungan regulasi yang berlaku, peluang yang diberikan untuk perempuan dari partai politik, peluang mereka memanfaatkan sumberdaya yang mencakup; sumberdaya baik dari lembaga politik, pemerintah, dan sebagainya. Misalnya subsidi/ bantuan keuangan dari partai politik, dan ketersediaan bantuan lainnya dari partai dan pemerintah dalam proses rekrutmen.
   b. Partisipasi atau peran; yakni kehadiran perempuan dalam rekrutmen legislatif. Keterlibatan mereka secara aktif dalam proses rekrutmen, aktivitas politik mereka misalnya aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan politik.
   c. Kontrol yakni perempuan merencanakan, mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri dalam rekrutmen politik.
   d. Manfaat adalah perempuan memperoleh manfaat dari proses rekrutmen selama ini. Keterlibatan mereka dalam proses politik, membawa manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk perempuan di Jawa Tengah.
3. Konstruksi teoritik perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, yang dirumuskan berdasarkan proposisi-proposisi hasil penelitian.

Jawa Tengah dipilih sebagai situs penelitian dalam riset ini. Penetapan situs penelitian di Jawa Tengah dilakukan terkait dengan keberadaan partai dan daerah

pemilihan untuk perempuan, dengan pertimbangan penelitian dapat dilakukan secara mendalam, spesifik budaya dan karakter masyarakat daerah pemilihan.

3.3. Subyek Penelitian

Data yang telah diperoleh di lapangan berdasarkan hasil rekrutmen Pemilu Legislatif tahun 2004, 2009, 2014 menetapkan subyek penelitian, yang terdiri dari informan utama yakni perempuan berpolitik di Jawa Tengah, yang terpilih dalam lembaga-lembaga legislatif dengan daerah pemilihan di Jawa Tengah. Mereka yang mengawali karier politiknya di Jawa Tengah, mulai dari rekrutmen di partai politik sampai dengan rekrutmen di lembaga legislatif. Untuk melihat kemampuan, kapabilitas, sumberdaya dan daya juang perempuan tersebut, peneliti menetapkan subjek penelitian dengan beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Perempuan yang berhasil mengawali karier politiknya dalam partai politik di Jawa Tengah.
2. Perempuan yang berhasil dalam proses rekrutmen di lembaga legislatif sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi Jawa Tengah, dan DPR RI 3 kali penyelenggaraan pemilu legislatif yakni pada pemilu 2004, 2009 dan 2014. Kriteria tiga kali berhasil menjabat di lembaga perwakilan ini adalah untuk melihat perempuan (daya juang, kemampuan bertahan, bertarung dalam proses rekrutmen) pasca kebijakan afirmatif untuk beradaptasi dengan ketentuan mengenai daerah pemilihan, regulasi penetapan calon (penentuan berdasar nomor urut dari partai yang sekarang berubah menjadi nama), munculnya partai baru. Selain itu, riset

juga dilakukan kepada subjek yang telah menghadapi pergulatan politik dengan dinamika; a. Perubahan regulasi politik; b. Partai politik pengusung yang berbeda; c. Daerah pemilihan yang berubah, serta; d. Tingkatan dewan perwakilan yang berubah (misalnya DPRD Kota/kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI).

3. Perempuan dengan daerah pemilihan di Jawa Tengah yang berhasil dalam rekrutmen DPRD kabupaten/ kota, DPRD provinsi sampai di DPR RI.

Di bawah ini, beberapa perempuan yang memenuhi kriteria seperti ditetapkan di atas.

Tabel 3.1. Informan Utama Penelitian, Dapil, dan Periode keterpilihan dalam Pemilu

Nama/ inisial dalam riset	**Periode Pemilu, Lembaga, Dapil, Partai Pengusung**		
	2004-2009	**2009-2014**	**2014-2019**
NS (informan 1)	DPRD Kab. Demak	DPRD Kab. Demak	DPRD Provinsi Jateng
	Dapil Demak I	Dapil Demak IV	Dapil Jateng II
	PKB	PKB	PKB
HW (informan 2)	DPRD Kab. Magelang	DPRD Kab. Magelang	DPRD Kab. Magelang
	Dapil Magelang III	Dapil Magelang III	Dapil Magelang III
	PKB	PKB	PKB
NW (informan 3)	DPRD Prov Jateng	DPRD Prov Jateng (2009-2013)	DPR RI
	Dapil Jateng VIII	Dapil Jateng VIII	Dapil Jateng VIII)
	PDI Perjuangan	PDI Perjuangan	Partai Gerindra
Ku (informan 4)	DPRD Provinsi Jawa Tengah	DPRD Provinsi Jawa Tengah	DPRD Provinsi Jawa Tengah
	Dapil Jateng VI	Dapil Jateng VI	Dapil Jateng VI
	Partai Golkar	Partai Golkar	Partai Golkar
Kd (informan 5)	DPRD Klaten	DPRD Klaten	DPRD Jateng
	Dapil Klaten 2	Dapil Klaten 2	Dapli Jateng 5
	PDI Perjuangan	PDI Perjuangan	PDI Perjuangan
SR (informan 6)	DPRD Kabupaten Banjarnegara	DPRD Jawa Tengah	DPRD Jawa Tengah

	Dapil Banjarnegara II	Dapil Jateng VII	Dapil Jateng VII
	PDI Perjuangan	PDI Perjuangan	PDI Perjuangan
Ma (informan 7)	DPRD Kab. Temanggung	DPRD Kab. Temanggung	DPRD Kab. Temanggung
	Dapil Temanggung 3	Dapil Temanggung 3	Dapil Temanggung III
	PKB	PKB	PKB

Sumber: data diolah (2018)

Informan Utama perempuan dengan kriteria di atas, kemudian dilacak, ditelusur dengan penelitian awal melalui dokumen, data KPU dan data pengurus partai diperoleh 7 nama perempuan, dengan identitas di atas.

Perempuan yang ditetapkan sebagai informan utama ini, untuk mengungkap kemampuan, kapabilitas, sumberdaya mereka dalam memanfaatkan kecerdasan merka untuk mengubah cara berfikir, dan tindakan atau perilakunya. Pengalaman mereka ketika menghadapi rintangan, hambatan dan kesulitan yang dapat menyengsarakan dirinya di tengah budaya patriarki, himpitan tekanan institusi dan kepentingan politik yang memperteguh rintangan-rintangan sosial dalam dunia politik di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional.

Selain informan utama di atas, untuk meminimalisir subjektifitas dalam penelitian, informasi-informasi juga digali dan didapatkan oleh peneliti dari informan pendukung, yakni penyelenggara Pemilu, staf dan asisten dari informan, tim kemenangan dalam pemilu, pengurus partai politik, dan masyarakat umum. Adapun Profil dari Informan Utama dan para Informan Pendukung terlampir (lihat lampiran 1).

3.4. Pengumpulan Data

Data dihimpun dengan teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan teknik audiovisual (Creswell, 2015: 140). Pengamatan dapat menjadi teknik yang tepat untuk menggali data tentang habitus, *distinction* dan dominasi simbolik yang dialami perempuan dan bagaimana perempuan memberi respon, melakukan perlawanan dalam arena.

Sebagian besar data primer, telah dikumpulkan melalui *in-dept interview* (wawancara mendalam) mengungkap tentang perempuan dalam habitus, arena, dan yang berkenaan dengan modal. Selain itu juga untuk mengungkap dominasi simbolik, *distinction* yang dialami atau dilakukan oleh perempuan dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif. Sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik wawancara dan observasi untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian.

3.5. Keabsahan Data

Keabsahan atau validitas data dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk menjada validitas data yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma yang ditetapkan. Pada penelitian kualitatif, temuan atau data penelitian yang diperoleh dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan/ disajikan oleh peneliti dengan fenomena yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti.

Yang menjadi rambu-rambu adalah, kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, namun jamak. Ini semua tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta bagaimana latar peneili tersebut.

Validitas data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian, dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu (Cresswell, 2010:285). Dengan validitas data, penarikan simpulan hasil penelitian dilakukan dengan berdasarkan pada kebenaran yang diyakini dalam penelitian. Dalam riset ini, dimanfaatkan beberapa strategi dalam menjaga validitas data sesuai dengan apa yang ditetapkan Creswell (2010: 286-288); pertama; mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda, dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut serta menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara kohern; kedua; dapat menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian; ketiga: membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian; keempat; bisa dilakukan dengan memgklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti kedalam penelitian; kelima; menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu; keenam; memanfaatkan waktu yang sangat cukup di lokasi penelitian; ketujuh; melakukan tanya jawab dengan sesama peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian; dan bisa dilakukan dengan cara melibatkan seorang auditor untuk merevieu keseluruhan hasil penelitian.

3.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002: 280). Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan cara mengintegrasikan teknik analisis gender --

yang mengadopsi langkah-langkah *Gender analysis Parthway* (GAP)-- dalam teknik analisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam. Analisis data menggunakan langkah-langkah GAP ini dimanfaatkan untuk menemukenali kesenjangan gender dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah terhadap perempuan.

Analisis data dalam penelitian memanfaatkan tahapan analisis data kualitatif menurut Milles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang perempuan untuk mengidentifikasi, mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam proses rekrutmen Pemilihan Legislatif di Jawa Tengah selama ini. Data penelitian yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, kemudian dianalisis.

Adapun langkah-langkah analisis data, seperti yang digambarkan oleh Milles, Huberman, dan Saldana (2014), digambarkan di bawah ini.

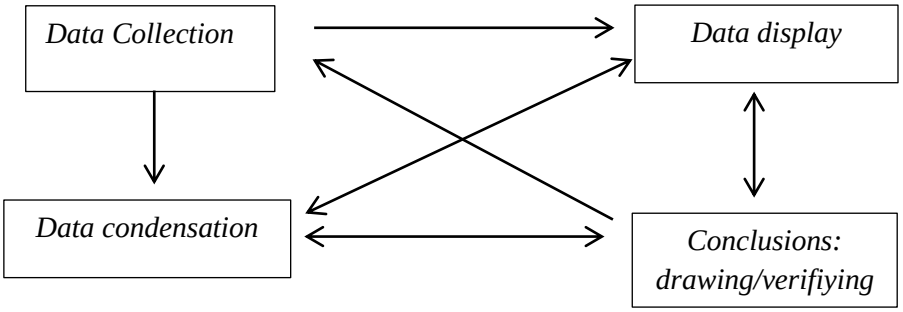

Skema 3. Pengumpulan dan Analisis Data (Milles, Huberman dan Saldana (2014)

Data condensation (kondensasi data); yakni tahapan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan atau mentransformasi data yang dimunculkan

dari catatan lapangan tertulis, wawancara, transkrip, dokumen, dan materi empiris lainnya. Kondensasi dapat membuat data lebih kuat. Tidak menggunakan istilah reduksi data sebagai istilah karena itu berarti, proses menjadi melemahkan sesuatu dalam proses penelitiannya.

Dengan kondensasi data, tidak harus berarti kuantifikasi. Data kualitatif bisa jadi ditransformasikan dalam banyak cara, yakni melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, melalui keberadaannya yang dimasukkan dalam pola yang lebih besar, dan seterusnya. Terkadang, mungkin berguna untuk mengubah data menjadi besaran (misalnya, analis memutuskan bahwa program yang dilihat memiliki tingkat "tinggi" atau "rendah", efektivitas), tapi ini tidak selalu diperlukan (Milles, Huberman dan Saldana (2014: 31).

Kehadiran perempuan dalam sistem politik seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau regulasi yang berlaku. Sudahkah suatu kebijakan yang tersusun dan berlaku dalam masyarakat, responsif gender. Dalam riset, kondisi tersebut dapat dilihat dengan analisis gender. Analisa gender adalah proses penganalisaan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan, atau kegiatan (Nurhaeni, 2012).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, data kemudian diolah dan dianalisis dengan indikator analisis gender; Akses, Partisipasi atau peran, Kontrol, dan Manfaat (APKM) untuk menemukenali terjadi atau tidaknya kesenjangan yang dialami perempuan baik sebagai objek maupun subjek dalam perencanaan (regulasi, aturan

yang telah ditetapkan); pada saat pelaksanaan rekrutmen yang meliputi proses penjaringan, proses pencalonan dan proses penetapan; dan pemilihan oleh konstituen masyarakat Jawa Tengah.

Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan menemukenali permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Bappenas, 2001).

Gender Analysis Pathway (GAP) digunakan, untuk; 1) Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender; 2) Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan; 3) Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; 4) Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender; 5) Mengidentifikasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan (Nurhaeni, 2012).

Akses, Partisipasi atau peran, Kontrol, dan Manfaat (APKM) merupakan indikator analisis gender yang digunakan untuk menganalisis kesenjangan yang dialami perempuan baik sebagai objek maupun subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. APKM dalam tahapan/fase *Gender Analysis Pathway* (GAP), tersaji dua fase yakni tahap kedua dalam penyajian data pembuka wawasan (data pilah gender) dan pada fase ketiga yakni menemukenali permasalahan gender dari APKM suatu realitas sosial.

Akses adalah analisis data tentang peluang perempuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang mencakup; sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan ketersediaan layanan pemerintah untuk perempuan. Selanjutnya dalam tahapan berikutnya, peneliti akan menemukenali permasalahan atau adanya ketimpangan gender melalui pertanyaan; sudahkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang selama ini dikembangkan mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya. Analisis data terhadap akses dalam proses perencanaan juga dimaknai sebagai kesempatan perempuan untuk masuk dalam suatu kegiatan karena adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Partisipasi/ peran adalah data yang menunjukan *knowledge, attitude, practice* dari seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam aktivitas pembangunan, mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Keikutsertaan atau suara masyarakat terutama kelompok perempuan atau suara perempuan --dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan—dipertimbangkan atau terakomodasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pembangunan.

Kontrol merupakan analisis mengenai data yang menunjukan kemampuan seseorang dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan, kesempatan yang sama hendaknya diberikan pada laki-laki dan perempuan untuk memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan. Analisis data dengan menggunakan indikator kontrol ini

melihat apakah informasi, pengetahuan, kredit dan sumber daya diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Indikator analisis data GAP yang terakhir adalah manfaat. Manfaat adalah data mengenai manfaat hasil pembangunan/ kegiatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Apakah perempuan merasakan adanya kemanfaatan dari kegiatan? Apakah regulasi yang selama ini ditetapkan membawa kemanfaatan bagi mereka? Atau sebaliknya? Indikator manfaat ini penting, mengingat perencanaan pembangunan yang dikembangkan, harus ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Akses digunakan untuk analisis data tentang peluang perempuan selama ini dalam memanfaatkan sumberdaya yang mencakup; sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan ketersediaan layanan pemerintah dalam proses rekrutmen dalam Pemilihan Legislatif di Jawa Tengah. Sudahkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang selama ini dikembangkan, mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya atau belum. Analisis data terhadap akses dalam proses perencanaan juga dimaknai sebagai kesempatan perempuan untuk masuk dalam suatu kegiatan karena adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Indikator akses digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh mengenai arena, modal, dominasi simbolik, dan *distinction* perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.

Partisipasi/ peran digunakan untuk menganalisis data, *knowledge, attitude, practice* dari perempuan selama ini dalam masyarakat yakni aktivitas politik mereka yang mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan politik yang mereka lakukan. Keikutsertaan atau suara masyarakat terutama kelompok perempuan atau suara perempuan --dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan— dipertimbangkan atau terakomodasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pembangunan. Dalam riset ini, data mengenai habitus, arena, dominasi simbolik dan *distinction* perempuan akan dianalisis menggunakan indikator partisipasi untuk menemukenali kesenjangan gender dalam proses/ kegiatan rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.

Kontrol dimanfaatkan untuk menganalisis data yang menunjukkan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam proses rekrutmen politik. Analisis data dengan menggunakan indikator kontrol ini melihat apakah informasi, pengetahuan, kredit dan sumber daya diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam rekrutmen politik.

Manfaat adalah data mengenai manfaat hasil pembangunan/ kegiatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh perempuan. Apakah perempuan merasakan adanya kemanfaatan dari regulasi rekrutmen politik selama ini? Apakah regulasi yang selama ini ditetapkan membawa kemanfaatan bagi mereka? Atau sebaliknya? Apakah kegiatan rekrutmen politik bagi perempuan selama ini memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang di Jawa Tengah.

1. Data-data yang telah dikondensasi, memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengumpulan data;
2. Display data; adalah penyajian data yang lebih sistematis seperti dalam bentuk *network*, grafik, diagram alur dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

Ilustrasi di atas, dapat diolah dengan tabel di bawah ini.

Data yang Terhimpun	Menemukenali Permasalahan/Kesenjangan Gender			
	Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
Dari individu (perempuan)				
Dari luar perempuan; Arena, Modal, *Distinction*, dominasi Simbolik				

Data yang telah dianalisis di atas, kemudian diidentifikasi sebab-sebab kesenjangan baik sebab kesenjangan internal maupun sebab kesenjangan eksternal. Adapun contoh data tersaji, sebagai berikut.

Sebab Kesenjangan	
Internal	eksternal
Sumber daya manusia….	Budaya:……..
Dana/modal	Norma:……
Regulasi..	Partai politik
Dan seterusnya	Dan seterusnya

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, yakni memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Pada tahapan ini, dilakukan analisis data yang mengarah pada terumuskannya rencana aksi. Analisis rencana aksi ini, berisi rancangan aktivitas-aktivitas yang diprediksikan mampu menjawab isu, permasalahan gender yang terumus dan teranalisis sebelumnya.

3.7. Kualitas Data

Untuk memperoleh validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dimaksud (Moleong, 2010: 330). Teknik triangulasi yang kerap digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber. Triangulasi menggunakan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010: 330).

Teknik triangulasi teknik, digunakan. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara atau hasil yang diperoleh dari dokumentasi. Menurut Bungain (2008: 256) teknik triangulasi ini, disebut triangulasi dengan metode. Teknik ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode intervieu sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancara. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diwawancara dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

BAB IV

PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN LEGISLATIF DI JAWA TENGAH

4.1. Perempuan dalam Struktur Arena Rekrutmen Legislatif Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada provinsi yang secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 tinggal dan hidup sejumlah 34.257.865 jiwa penduduk (https://jateng.bps.go.id) yang menyebar dalam 573 kecamatan dan 8.578 desa/ kelurahan.

Angka demografi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih besar dari dari laki-laki dari tahun ke tahun. Walaupun interval keduanya tidak mencolok, namun data jumlah perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah menjadi instrumen penting pengambilan kebijakan Pemerintah. Pembangunan di segala bidang mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya mempertimbangkan keberadaan masing-masing. Partisipasi setiap warga masyarakat tanpa kecuali, di setiap aspek kehidupan beserta pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak mereka adalah hal yang penting dalam masyarakat demokrasi. Partisipasi setiap individu (baik laki-laki maupun perempuan), kelompok masyarakat (baik mayoritas maupun minoritas) dalam masyarakat demokrasi adalah keniscayaan. Keberadaan semua elemen masyarakat mempunyai makna yang sangat penting, yakni memberi pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Demokrasi yang memberi manfaat bagi setiap individu dalam masyarakat.

4.1.1. Jawa Tengah Etno Sosial-Politik

Jumlah penduduk yang banyak pada Provinsi Jawa Tengah seringkali menjadi ukuran dari keberhasilah sebuah partai politik memenangkan suara mereka. Di bawah ini tersaji data jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 menurut BPS Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk		Total Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
2017	16,988,093	17, 269,772	34,257,865
2016	16,871,194	17,147,901	34,019,095
2015	16,750,900	17,023,240	33,774,140
2014	16,627,023	16,895,640	33,522,663
2013	16,499,377	16,764,962	33,264,339
2012	16,495,705	16,774,502	33,270,207
2011	16,273,976	16,369,636	32,643,612
2010	16,091,112	16,291,545	32,382,657
2009	16,123,190	16,741,373	32,864,563
2008	16,192,295	16,434,095	32,626,390
2007	16,064,122	16,316,157	32,380,279
2006	16,054,473	16,123,257	32,177,730
2005	16,368,724	16,540,126	32,908,850
2004	16,184,251	16,213,180	32,397,431
2003	15,957,412	16,095,428	32,052,840
2002	15,787,143	15,904,723	31,691,866
2001	15,445,400	15,618,418	31,063,818
2000	15,253,438	15,522,408	30,775,846

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (https://jateng.bps.go.id)

Rasio jumlah laki-laki dan perempuan Jawa Tengah di atas, diimbangi dengan dengan angka kesempatan masing-masing untuk memperoleh akses dalam bidang-bidang kehidupan. Dalam pendidikan misalnya, tidak ada kesenjangan yang berarti antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki di Jawa Tengah mengenyam pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Banyak perempuan yang menggunakan kesempatan

mereka. Demikian jumlah perempuan memperoleh pekerjaan. Perempuan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jawa Tengah sejumlah 174.484 orang, sedangkan PNS laki-laki 197.933 orang. Namun, seperti halnya kecenderungan yang terjadi secara nasional dan internasional, status perempuan dalam bidang politik sangat jauh tertinggal dibandingkan laki-laki.

Jumlah demografi perempuan yang lebih banyak, tidak signifikan dengan keberadaan perempuan Jawa Tengah dalam politik. Meski jumlah perempuan lebih banyak secara demografis, namun keterlibatan perempuan di bidang politik perempuan masih termarginalisasi. Di Jawa Tengah, selama tahun 1999 sampai 2017 hanya terdapat 14 orang perempuan kepala daerah (bupati,wakil bupati, walikota dan wakil wali kota). Jumlah ini masih belum berbanding dengan jumlah laki-laki menjabat sebagai kepala daerah selama ini.

Rendahnya jumlah perempuan dalam dunia politik juga dapat dilihat dari jumlah keterwakilan mereka dari tahun ke tahun pelaksanaan Pemilu yang tidak sebanding dengan jumlah demografisnya. Pada tahun 2017, berdasarkan hasil Pemilu 2014, terdapat 292 orang perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jumlah ini, sangat kecil dibandingkan jumlah perempuan yang tercatat dari sensus BPS Provinsi Jawa Tengah.

Mundur ke belakang, melihat demografi perempuan pada tahun-tahun menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, yakni tahun 2013 tercatat jumlah perempuan 16.764.962 orang dibanding laki-laki yang lebih sedikit yakni 16.499.377 orang. Demikian tahun 2009, perempuan berjumlah 16.741.373 dibanding laki-laki yang berjumlah

16.123.190. Pada tahun 2004, jumlah perempuan Jawa Tengah juga lebih besar dari laki-laki dengan perbandingan angka 16.184.251: 16.213.180. Angka perbandingan di atas, diperjelas dengan bagan yang menunjukkan data jumlah perempuan di Jawa Tengah pada tahun-tahun menjelang atau saat pelaksanaan Pemilu, di bawah ini.

Diagram 4.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-laki di Jawa Tengah menjelang Pemilu

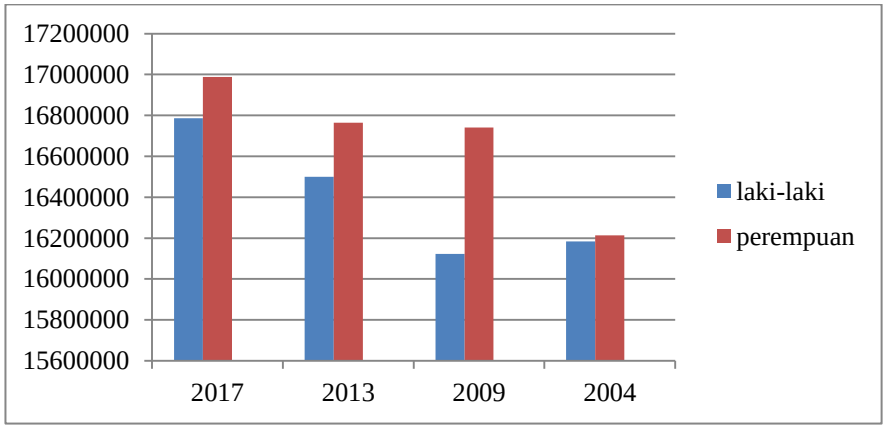

Sumber: Diolah dari data BPS Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk perempuan seperti yang disebutkan di atas, tidak diimbangi dengan jumlah keterwakilan mereka di lembaga perwakilan. Angka politik perempuan yang tidak berbanding dengan jumlah keterwakilan perempuan. Pada setiap Pemilu, angka perempuan siap memilih dalam data KPU Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari laki-laki, namun jumlah perempuan yang terpilih masih sangat kecil dibandingkan jumlah laki-laki. Perempuan hanya mampu mengisi kurang dari 30% dari jumlah keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai anggota dari suatu grup masyarakat yang termarginalisasi, seharusnya secara fisik terwakili dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang

proporsional dengan populasinya yang banyak. Kehadiran perwakilan perempuan sebagai kelompok minoritas menjadi sangat penting, tidak hanya karena mereka secara otentik merepresentasi anggota kelompok mereka, namun lebih dari itu mereka dapat mengubah agenda dan membawa prespektif baru dalam politik kebijakan. Data pemilih perempuan dan keterwakilan mereka di Jawa Tengah dari pelaksanaan Pemilu disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Jumlah Perempuan Pemilih di Jawa Tengah

Tahun Pemilu		Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah		
	Perempuan	Perempuan anggota legislatif (prov, kab,kota)	Laki-laki	Laki-laki anggota legislatif (prov,kab,kota)
2004	12.262.525.		11.138.216.	
2009	13.207.961.		12.982.668.	
2014	13.640.730.	292	13.485.330.	1301
2019 (persiapan)*	13.589.304.	-	13.478.821.	-

Keterangan:
1. *data diperoleh dari data KPU DPT Pilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.
2. Data diolah dari berbagai sumber: data KPU Jateng, Triwanto (2006: 81), Turtiantoro (2015:118).

Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Anggota Legislatif Terpilih Periode 2014 - 2019 berdasarkan Kabupaten/Kota di JawaTengah.

No	Kabupaten/ Kota	Perempuan	Jumlah anggota	%
1	Kabupaten Cilacap	9	50	18,0%
2	Kabupaten Banyumas	9	50	18,0%
3	Kabupaten Banjarnegara	8	45	17,8%
4	Kabupaten Purbalingga	12	45	26,7%
5	Kabupaten Wonosobo	2	45	4,4%
6	Kabupaten Temanggung	14	45	31,1%
7	Kabupaten Magelang	7	50	14,0%
8	Kota Magelang	6	25	24,0%
9	Kabupaten Purworejo	8	45	17,8%

10	Kabupaten Kebumen	16	50	32,0%
11	Kabupaten Klaten	3	50	6,0%
12	Kabupaten Wonogiri	4	45	8,9%
13	Kabupaten Sukoharjo	6	45	13,3%
14	Kabupaten Karanganyar	11	45	24,4%
15	Kabupaten Sragen	4	45	8,9%
16	Kabupaten Boyolali	5	45	11,1%
17	Kota Surakarta	8	45	17,8%
18	Kota Salatiga	6	25	24,0%
19	Kabupaten Semarang	5	45	11,1%
20	Kota Semarang	11	50	22,0%
21	Kabupaten Kendal	10	45	22,2%
22	Kabupaten Demak	7	50	14,0%
23	Kabupaten Grobogan	7	50	14,0%
24	Kabupaten Rembang	8	45	17,8%
25	Kabupaten Blora	8	45	17,8%
26	Kabupaten Pati	8	50	16,0%
27	Kabupaten Kudus	3	45	6,7%
28	Kabupaten Jepara	3	50	6,0%
29	Kabupaten Batang	8	45	17,8%
30	Kabupaten Pekalongan	11	45	24,4%
31	Kota Pekalongan	5	30	16,7%
32	Kabupaten Pemalang	9	50	18,0%
33	Kota Tegal	10	30	33,3%
34	Kabupaten Tegal	10	50	20,0%
35	Kabupaten Brebes	8	50	16,0%

Sumber: Data diolah dari BP3AKB Jawa Tengah 2014 (Kertati, 2015).

Di atas adalah data yang memyuguhkan gambaran secara umum angka politik perempuan di Jawa Tengah. Jika melihat data pada dua tabel tersebut di atas, besar kemungkinan perempuan tidak memilih perempuan sebagai wakil mereka atau perempuan tidak sepenuhnya memperoleh dukungan dari perempuan lainnya. Artinya, jumlah pemilih perempuan sangat sedikit atau kurang memenuhi jumlah yang telah diharapkan.

Selanjutnya, disajikan data jumlah perempuan di Jawa Tengah yang mampu melampaui proses pemilihan legislatif tahun 2009 dan 2014, dilihat dari angka anggota

DPRD petahana *(incumbent)* di Kabupaten/ Kota dan DPRD Propinsi periode 2014-2019 sebagai berikut.

Tabel 4.4. Daftar Anggota DPRD Kabupaten/Kota Petahana hasil Pemilu 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota	Jumlah DPRD Perempuan	Perempuan petahana
1	Kabupaten Banjarnegara	45	8	2 orang
2	Kabupaten Banyumas	50	9	2 orang
3	Kabupaten Batang	45	8	0
4	Kabupaten Blora	45	8	8 orang
5	Kabupaten Boyolali	45	5	1 orang
6	Kabupaten Brebes	50	8	4 orang
7	Kabupaten Cilacap	50	9	3 orang
8	Kabupaten Demak	50	7	4 orang
9	Kabupaten Grobogan	50	7	1 orang
10	Kabupaten Jepara	50	3	0
11	Kabupaten Karanganyar	45	11	4 orang
12	Kabupaten Kebumen	50	16	5 orang
13	Kabupaten Kendal	45	10	3 orang
14	Kabupaten Klaten	50	3	1 orang
15	Kabupaten Kudus	45	3	1 orang
16	Kabupaten Magelang	50	7	1 orang
17	Kabupaten Pati	50	8	0
18	Kabupaten Pekalongan	45	11	3 orang
19	Kabupaten Pemalang	50	9	2 orang
20	Kabupaten Purbalingga	45	12	0
21	Kabupaten Purworejo	45	8	1 orang
22	Kabupaten Rembang	45	8	0
23	Kabupaten Semarang	45	5	3 orang
24	Kabupaten Sragen	45	4	0
25	Kabupaten Sukoharjo	45	6	3 orang
26	Kabupaten Tegal	50	10	1 orang
27	Kabupaten Temanggung	45	14	5 orang
28	Kabupaten Wonogiri	45	4	2 orang
29	Kabupaten Wonosobo	45	2	0
30	Kota Magelang	25	6	0
31	Kota Pekalongan	30	5	2 orang
32	Kota Salatiga	25	6	2 orang
33	Kota Semarang	50	11	2 orang
34	Kota Surakarta	45	8	4 orang
35	Kota Tegal	30	10	3 orang

	Jumlah	1570	269	73

Keterangan:
1. Perempuan anggota DPRD petahana, adalah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014 dan kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota periode berikutnya 2014-2019
2. Sumber: BP3AKB dan KPU Jawa Tengah (data diolah).

Partai politik dan beberapa faktor penyebab lain dapat mempengaruhi kegagalan perempuan. Seperti dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilu 2014, tersaji data lengkap keterpilihan perempuan di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 4.4. di atas. Kegagalan perempuan dalam politik baik dalam proses rekrutmen di partai politik maupun pada proses pemilihan, berakibat terhadap rendahnya keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah selama ini. Perempuan tidak mampu melewati proses rekrutmen legislatif baik yang dilakukan oleh partai politik selama ini serta pada proses pemilihan oleh konstituen.

Rendahnya angka keterwakilan, memberi gambaran bahwa perempuan dalam politik di Jawa Tengah, harus lebih tangguh dalam proses rekrutmen. Kalaupun mereka telah berhasil melewati proses rekrutmen, mereka juga lebih mampu bertahan memenangkan suara konstituen pada periode berikutnya. Bertahan dalam posisi menang pada arena politik, sangat sulit dilakukan di Jawa Tengah. Dua hal yang kemudian tersuguh sebagai dugaan. *Pertama*, politik seolah tidak menarik bagi perempuan. Ada keengganan dalam diri perempuan untuk masuk kembali dalam arena politik karena beberapa alasan. *Kedua*, perempuan memang mengalami kesulitan untuk kembali meraih kemenangan dalam dunia politik, atau perempuan menerima dan menghadapi hambatan dan rintangan dalam berpolitik.

Perjuangan perempuan Indonesia selama ini, harus dilandasi pemahaman dan keyakinan banyak pihak, bahwa semua manusia memiliki ciri esensial tertentu, yakni kapasitas sebagai agen moral dan nalar dan aktualisasi diri. Artinya, setiap manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki daya dan berhak mengaktualisasi diri mereka. Pelaksanaan kapasitas ini dijamin oleh pengakuan legal atas hak-hak universal, karena adanya pemahaman bersama bahwa jika terjadi ketimpangan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat, ini diciptakan atau dikonstruksi manusia sendiri secara sosial dan tidak disebabkan oleh alam. Oleh karena itu, kesetaraan dapat dilakukan, bisa dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dan menghadirkan negara.

Perempuan dalam proses rekrutmen tidak dapat terlepas dari arena politik di sekeliling mereka. Arena menjadi ajang perempuan untuk memperoleh kekuasaan, sebagai tempat perjuangan, manuver, dengan modal dan usaha yang mereka miliki memperebutkan akses kekuasaan yang terbatas. Dalam arena rekrutmen, perempuan berhadapan dan bersaing dengan pihak lain untuk memenangkan pertarungan memperoleh akses politik dalam partai politik dan juga meraup suara pemilih. Proses panjang harus dilalui perempuan dalam dinamika rekrutmen legislatif yang ditentukan oleh regulasi. Regulasi inilah yang kemudian mengatur partai politik, memberi rambu-rambu kepada perempuan untuk mengikuti proses rekrutmen. Pada Bab IV ini, hasil penelitian mengenai struktur arena politik yang menjadi atmosfir perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah terdeskripsikan.

4.1.2. Perempuan dalam *Hegemonic Masculinity* Masyarakat Jawa Tengah

Perempuan dalam masyarakat di Jawa Tengah, keberadaannya distrukturkan melalui serangkaian hubungan atau relasi arena yang sering kali terlepas dari kemauan mereka. Dalam masyarakatnya, perempuan "terbentuk dan membentuk" diri dalam menghadapi berbagai fenomena. Sebagaimana teori sosial menerjemahkan keberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari lingkungan tempat mereka hidup. Seseorang akan tumbuh, hidup, berkembang, beradaptasi dengan lingkungan dimana ia dibesarkan. Struktur inilah yang disebut Bourdieu sebagai arena (*field*). Arena atau ranah, medan yang merupakan ruang tempat seseorang (agen/aktor) saling bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber daya material atau kekuatan *(power)* simbolis.

Dalam arena perempuan memperoleh status, peran, dan kedudukan mereka di segala aspek kehidupan termasuk dalam politik. Arena memberi tempat kepada perempuan dalam struktur politik di Jawa Tengah. Perempuan akan memiliki relasi-relasi dan menjalankan fungsi-fungsi mereka. Relasi-relasi yang terbentuk oleh banyak hal, antara lain oleh budaya yang tumbuh, berkembang dalam masyarakat Jawa Tengah khususnya budaya, nilai-nilai yang selama ini mengatur, menjadi tata masyarakat mengenai perempuan. Budaya yang mengkonstruksi peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat, tidak terlepas dari sejarah yang telah membentuk gambaran perempuan dalam masyarakat Indonesia. Pasang surut pengakuan hak-hak dan peran perempuan memberi kontribusi dan pembelajaran yang baik (seharusnya). Secara umum, konsep gender yang sudah populer dalam masyarakat, merupakan ekspresi psikologis dan kultural dari seks yang

bersifat biologis, menjadi peran dan perilaku sosial selama ini. Misalnya, domestifikasi negara terhadap perempuan yang sudah terjadi sejak lama dengan membangun mitos, konstruksi bahwa perempuan sebatas pada peran domestik pendamping suami, pendidik anak, pencari nafkah tambahan, hingga penyaluran aktifitas perempuan dalam beberapa wadah, seperti Dharma Wanita, PKK dengan segala kegiatannya selama pemerintahan Orde Baru. Jika dicermati lebih lanjut, kedua organisasi ini dibentuk untuk para istri untuk mendukung apa yang dilakukan suami mereka di lingkungan kerja.

Sebenarnya, tidak terbatas pada peran-peran domestik saja. Sejarah mencatat perempuan pernah mengambil peran-peran penting dalam perjuangan masyarakat walau mereka hidup dalam masyarakat patriakhi. Perjuangan Ratu Kalinyamat (1549) yang berpengaruh dan memimpin pemerintahan yang kuat pada masanya melawan Portugis menjadi bukti. Menurut kesaksian Fernao Mendes Pinto dan P.J. Veth, di Jawa dan Madura terdapat delapan daerah utama yang merdeka, salah satunya adalah Kalinyamat yang dipimpin oleh seorang perempuan pemberani dan berkuasa (Atmosiswartoputra,2018:34). Ratu Kalinyamat memimpin wilayah kekuasaan yang sebelumnya dipimpin oleh suaminya yang telah wafat. Portugis menyebutnya sebagai *Rainha de Jepara senhora pederose e rica* Ratu Jepara, seorang wanita yang sangat berkuasa menunjukkan bahwa dalam masyarakat Jawa dimasa lalu perempuan dapat menjadi pemimpin yang disegani.

Fenomena di atas relevan dengan catatan sejarah Jawa Kuno Abad 8-15 Masehi yang menuliskan bahwa ada tiga kedudukan dan peranan perempuan terhadap laki-laki,

yakni; *pertama*, perempuan setara dengan laki-laki; *kedua* perempuan tidak setara kedudukannya dibandingkan laki-laki; dan *ketiga* perempuan memiliki peranan dan kedudukan khusus. Kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki termasuk dalam bidang politik. Dalam pemerintahan, jabatan juga dapat dilaksanakan oleh laki-laki maupun perempuan. Jabatan dalam pemerintahan, mulai sebagai kepala pemerintah yakni raja, ratu, putra dan putri mahkota, penguasa wilayah/*watak (rakai)*, para pejabat hukum, pejabat keagamaan, pejabat desa seperti *hulu wanua* (pengawas desa), *huluair* (pengawasa saluran air), *wariga* (ahli perbintangan) (Nastiti, 2016: 47).

Kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki tampak pada masyarakat Jawa Kuno juga tampak di bidang politik. Adapun kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki terdapat di bidang sosial terutama menyangkut soal poligami, pelacuran dan pelecehan seksual yang disahkan penguasa, serta adanya kebiasaan yang sebenarnya muncul karena diadopsi dari kebudayaan India, yakni seorang istri harus ikut mati apabila suaminya meninggal terlebih dahulu. Kedudukan perempuan yang lebih rendah muncul dalam praktik *bela* atau *sati* disebut sebagai penyebab kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada masa lalu memang tidak selalu setara. Namun, kebiasaan ini tidak sama dengan asalnya di India. Dalam berita Portugis disebutkan *sati* tidak hanya dilakukan perempuan. Laki-laki bangsawan diketahui melakukan bunuh diri sebagai tanda setia kepada rajanya. Selanjutnya, dibidang hukum, berkenaan dengan *tukon dan paradara*, dan di bidang agama, perempuan tidak dapat memegang jabatan tertinggi dalam bidang keagamaan (Nastiti, 2016: 347).

Seiring dengan waktu berjalan, dalam perjalanan sejarah di Jawa pada abad 18, catatan mengenai era RA. Kartini, melalui surat-suratnya pada sahabatnya orang Belanda, tergambar secara jelas bahwa perempuan masih terbelenggu pada adat, seperti belum diijinkan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi seperti laki-laki, belum diijinkan menentukan jodoh sendiri, dan lain sebagainya. Misalnya saja dalam hal pendidikan, perempuan hanya dididik untuk mengurusi hal-hal yang terkait dengan urusan sumur, kasur dan dapur (Atmosiswartoputra, 2018:159). Surat-surat Kartini kepada para sahabatnya menggambarkan perempuan pada saat itu yang berada pada posisi *the second person* setelah laki-laki. Dengan kata lain, perempuan diposisikan sebagai orang kedua setelah laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Tradisi yang mengakar dalam masyarakat, kurang berpihak pada nilai-nilai ke-perempuan-an. Nilai maskulinitas begitu mendominasi kultur Jawa Tengah. Laki-laki lebih banyak berperan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang sering dimaknai sebagai *hegemonic masculinity*. Dominasi nilai-nilai kelelakian dalam struktur nilai yang mempengaruhi masyarakat secara sadar. *Hegemonic masculinity* ini terkonstruksi dalam budaya masyarakat dan seolah menjadi nilai-nilai yang harus ditaati oleh semua pihak. Dominasi nilai-nilai kelaki-lakian orang Jawa Tengah secara spesifik mempengaruhi perempuan, khususnya mereka yang masuk ke dalam dunia politik. Nilai-nilai ini, antara lain; pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan adanya ikatan subordinasi antara laki-laki terhadap perempuan.

Pertama, masyarakat Jawa sudah terbiasa dengan pembagian kerja yang jelas antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Laki-laki dan perempuan terkonstruksi

sebagai dua makhluk yang berbeda. Perbedaan keduanya, tidak hanya distrukturkan oleh ciri biologis saja, tapi oleh pemaknaan sosial dalam masyarakat. Laki-laki dengan tubuhnya yang kuat bertenaga, dikonstruksikan sebagai individu yang kuat, kokoh, sekaligus tegas, rasional. Ini berdampak pada peran laki-laki dalam pandangan masyarakat Jawa menjadi penghubung antara keluarga dan masyarakat. Artinya, laki-laki dianggap cakap berhadapan dengan lingkungannya. Tradisi *kenduren* misalnya, hanya laki-laki yang diijinkan untuk ikut dalam acara ini dalam masyarakat Jawa Tengah. Kegiatan-kegiatan *kumpulan-kumpulan* (ajang berkumpul, forum) yang sudah mengakar dalam masyarakat hanya melibatkan laki-laki. Misalnya, jika dalam keluarga seorang bapak sebagai kepala keluarga telah meninggal dunia atau berhalangan hadir, tidak akan pernah kesempatan menggantikan itu dilakukan ibu atau anak perempuan dalam keluarga. Dianggap *ora ilok, ora pantes* (tidak patut, tidak pantas) kehadiran perempuan mewakili keluarganya dalam acara di atas.

Uraian di atas mengisyaratkan, bahwa laki-laki-lah yang pantas terlibat pembuatan keputusan penting dalam lingkungan. Kegiatan sosial dalam masyarakat selalu melibatkan laki-laki, terutama yang menyangkut keputusan penting dalam lingkungan. Laki-laki harus mampu memberikan *jenang* dan *jeneng* (Hasyim, 2007: 20). *Jenang* (makanan dodol) artinya sebagai laki-laki harus konsisten memberikan nafkah lahir dan batin kepada anggota keluarga. *Jeneng* (nama), artinya laki-laki harus mampu berperilaku baik dan bermanfaat dalam masyarakat agar nama baik keluarga dapat terjaga. Mereka, para lelaki harus dapat mencari solusi atas berbagai

permasalahan serta penentu kebijakan dan keputusan dalam keluarga yang kemudian didelegasikan pada istri.

Sebaliknya, posisi perempuan dalam keluarga oleh masyarakat Jawa digambarkan dalam idiom *sumur, dapur, kasur* yang syarat makna. Perempuan berada di rumah, mengurus segala urusan rumah tangga, keluarga dan semua urusan domestik. Perempuan selalu dihubungkan dengan urusan dan kebutuhan keluarga dalam rumah tangga, seperti urusan memasak dan menyediakan makanan, kewajiban membimbing anak dalam keluarga, mengatur kenyamanan dalam rumah, dan sebagainya. Makna idiom *kasur* juga syarat dengan kedudukan perempuan dalam rumah tangga masyarakat Jawa. Bahwa istri taat dengan suaminya, harus mempu menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. Salah satu dampak pelembagaan patriarki ini adalah penempatan perempuan sebagai obyek dan laki-laki diberi peran sebagai subyek yang dapat mengatur peran, tugas dan kedudukan perempuan seharusnya di dalam keluarga. Bahkan masyarakat mengkonstruksi bahwa seorang perempuan dianggap sebagai istri yang baik, jika perempuan yang mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga menjalankan perannya sebagai istri, mampu mendidik anak-anak dalam keluarga, patuh dan taat pada suami.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Jawa Tengah di atas, berdampak pada perempuan dalam berpolitik. Nilai tradisi yang terpelihara tentang segala keputusan penting dalam keluarga yang diambil oleh suami atau harus seijin laki-laki dalam rumah tangga (bapak atau suami), mempengaruhi perempuan dalam pilihan politik, keterlibatan dalam proses rekrutmen politik, keikutsertaan atau

partisipasi dalam partai politik, dan sebagainya. Atas konstruksi tersebut, akhirnya yang terjadi dalam keluarga ketika perempuan masuk ke dunia politik, harus atas ijin dan restu bapak atau suami mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Afif (Ketua DPC PDIP Wonosobo), diperoleh data bahwa perempuan dalam politik aktif, biasanya karena ia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga politisi. Salah seorang tokoh perempuan yang ia kenal, keluarga besarnya aktifis di Nahdatul Ulama (NU). Keluarga memberi dukungan penuh pada saat ia masuk dan aktif dalam partai politik. Pengetahuan mengenai politik, telah ia peroleh sejak dini melalui keluarganya. Ketika mengambil keputusan untuk masuk dalam politik, suaminya biasanya adalah sosok penting yang mendukung. Juga terlihat dari anggota dewan perempuan yang terpilih pada Pemilu 2014, suaminya memberi modal sampai menang.

Kedua, ikatan subordinasi antara laki-laki terhadap perempuan. Ideologi dalam masyarakat patriarki adalah ideologi yang hegemoni, di dalam masyarakat dibenarkan penguasaan satu kelompok dominan terhadap kelompok sub ordinat. Perempuan itu individu yang lembut yang harus dilindungi oleh orang-orang kuat di keluarga mereka. Perempuan harus menerima, setuju dengan apa yang ditentukan oleh kelompok kuat yang dominan sebagai dasar dari pemikiran dalam ideologi yang ada. Dalam menjalankan kehidupan mereka, perempuan tidak *independen* (bebas) karena setelah menikah kebebasan mereka harus berkurang, perempuan harus patuh pada suami. Ketidakbebasan perempuan ini karena nilai-simbol kemulyaan hati perempuan Jawa Tengah dikonstruksi darena adanya ketundukan, ketergantungan dan kepasrahan perempuan terhadap laki-laki mereka dalam keluarga. Gambaran mengenai dominasi

patriarki dalam masyarakat juga diperlihatkan dengan ujaran, perempuan itu *swarga nunut, neraka kathut* (surga ikut, neraka turut). Artinya, kemanapun suami melangkah, melakukan sesuatu, istri mereka akan mendapatkan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh sang suami. Ini salah satu nilai yang menjadikan perempuan dalam rumah tangga patuh kepada laki-laki mereka. Kepatuhan perempuan pada suami mereka dalam nilai budaya Jawa adalah mutlak.

Perempuan tetap menjadi "orang berikutnya", yang berada dalam bayang-bayang laki-laki. Laki-laki menciptakan dan mempertahankan budaya ini, tidak hanya karena mereka mempunyai sumber daya untuk berbuat demikian, namun karena mereka mempunyai kepentingan untuk menjadikan perempuan sebagai orang yang melayani mereka, selalu mengalah, tenaga kerja yang bermanfaat, lambang status dan kekuasaan, menjadi pasangan yang menyenangkan yang dapat menjadi sumber dukungan emosional serta menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan status sosial laki-laki.

Seorang perempuan tidak perlu memiliki jabatan karena mereka secara otomatis akan terangkat derajatnya jika suaminya menduduki jabatan dalam komunitasnya. Dampaknya, istri dalam beraktifitas di luar rumah bahkan ketika mencari pekerjaan harus seijin suaminya. Disinilah, kemudian tumbuh dalam stereotip bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki oleh masyarakat Jawa Tengah. Istri harus melaksanakan tugas-tugas suami jika mereka berhalangan. Namun sebaliknya, laki-laki tidak mungkin melaksanakan tugas domestik istri mereka, karena mereka dianggap tidak "jantan" jika terlibat dalam urusan domestik, kesan maskulin mereka akan luntur.

Akibat dari konstruksi masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kelaki-lakian seperti yang diuraikan di atas, kemudian muncul stereotif bahwa politik yang identik dengan dunia laki-laki, kotor dan tidak pantas dimasuki oleh perempuan yang lemah lembut. Politik yang berisi tentang kegiatan memperoleh kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa, kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang selalu mengutamakan harmoni. Kalaupun ada perempuan yang mampu masuk dalam dunia politik, berarti ia sudah "selesai" (dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan) dengan keluarganya, dan dengan masyarakatnya. Perempuan harus mampu melewati level 1 yakni keluarga yang terdiri dari orang-orang terdekatnya terlebih dahulu sebelum ia memasuki level 2 yakni masyarakat. Penerimaan masyarakat ini ditandai dengan diterimanya ia dalam masyarakat karena faktor-faktor yang telah dipenuhinya yang juga tidak jauh dari nilai-nilai yang selama ini berlaku dalam masyarakat patriarki, seperti; perempuan mendapat dukungan dari keluarganya, bisa menjalankan tugas dan perannya sebagai istri, ibu yang baik dalam keluarganya, mampu menjaga keharmonisan keluarganya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila, dan sebagainya. Perempuan yang masuk dalam arena politik seringkali harus dianggap sempurna baik secara keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Situasi di mana perempuan mengalami rumah tangga yang kurang baik, ini akan menjadi situasi yang melemahkan mereka. Nanti akan muncul stigma; *lha* bagaimana mau mengurus negara, mengurus masyarakat banyak, kalau mengurus keluarga saja ia tidak bisa. Perlakuan ini sangat berbeda dengan calon laki-laki.

Jadi, perempuan berpolitik dalam masyarakat patriarki ini penuh pesan bahwa ranah publik dan arena politik adalah milik laki-laki, sehingga perempuan harus lebih berhati-hati ketika turut di dalamnya. Seperti yang telah ditulis di atas, perempuan akan diterima dalam masyarakat, tidak terlepas dari penilaian-penilaian masyarakat terhadap peran, status dan kedudukan mereka dalam rumah tangga. Seiring dengan terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik sejak pasca reformasi, tak jarang perempuan berpijak pada kesuksesan, jejak politik, basis massa, dan kepemilikan modal dari anggota keluarga, khususnya para lelaki (bapak, suami) dalam keluarga mereka. Adapun perjalanan politik perempuan di tingkat awal dalam masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai patriarki, diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.1. Level/ Tahap awal yang harus dilalui perempuan untuk berpolitik

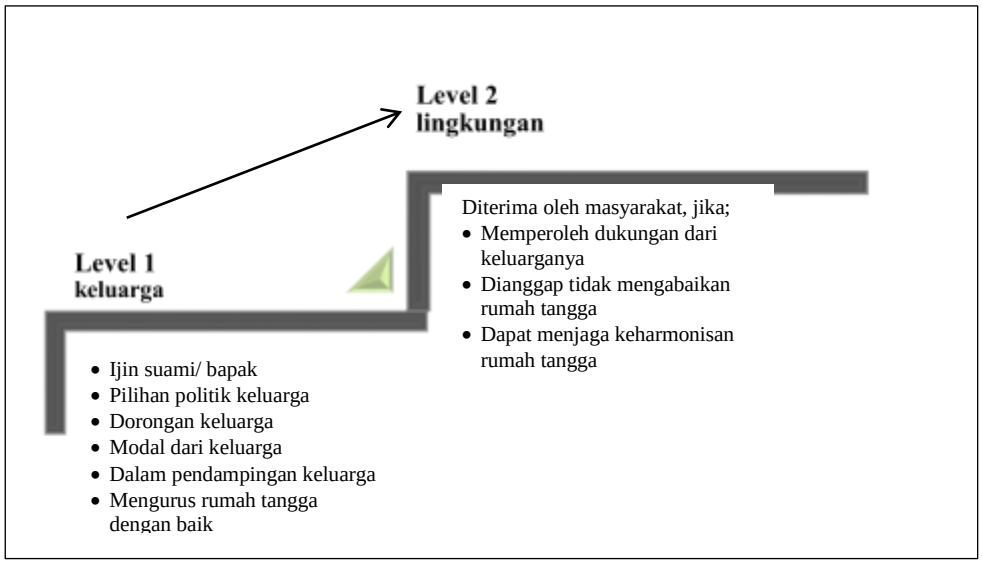

Sumber: data primer diolah (2018)

Rata-rata perempuan yang sukses masuk dalam arena rekrutmen legislatif adalah mereka yang berasal dari keluarga yang memiliki basis massa, jejaring dan modal.

Informan 2, mengakui pada tahun 2004 berhasil memenangkan perolehan suara karena basis massa dari keluarga besarnya yang menjadi pendiri dan pengasuh pondok pesantren di salah satu wilayah Kabupaten Magelang. Sebelum dirinya masuk ke dunia politik, ibunya yang menjabat sebagai Ketua Muslimat. Demikian, Informan 3, mempertegas bahwa peran keluarga sangat besar di awal kiprahnya masuk dalam dunia politik. Informan lahir dari keluarga politisi. Sang ayah adalah politisi senior yang handal dan sangat dikenal oleh publik di Kabupaten Cilacap.

Keluarga membuka jalan bagi perempuan untuk aktif di partai politik, dan akhirnya masuk dalam rekrutmen legislatif oleh partai politik. Para informan politisi perempuan yang terpilih dalam proses pemilihan sejak Pemilu 2004, menjelaskan bahwa perjuangan di dalam partai harus dilakukan sejak awal. Sistem kemenangan berdasarkan nomor urut, pada realitanya tidak mudah bagi calon perempuan, jika mereka tidak memiliki "kekuatan" dalam partai politik. mereka harus memiliki dukungan. Dukungan dan dorongan yang penting diperoleh perempuan dari keluarga mereka.

Oleh karena itu, perempuan ketika memasuki dunia politik --dengan kultur masyarakat Jawa Tengah yang patriarki-- harus bekerja lebih kuat. Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Wonosobo;

> "Perempuan, dalam politik harus ditempatkan, dan menempatkan diri sebagai subjek. Kalau sebagai subjek, perempuan bisa punya semangat, punya inisiasi, bersemangat dan punya spirit" (wawancara 17 September 2016).

Kondisi yang disampaikan pada petikan wawancara di atas, dapat dinarasikan bahwa masyarakat masih belum mempercayai kapabilitas perempuan. Jika selama ini

terjadi hal demikian, salah satunya disebabkan oleh banyak perempuan dalam politik yang selalu mengandalkan keluarga mereka. Masih pasif dalam partai, tidak mau dan tidak mampu membuat keputusan, hanya *manut* saja kalau rapat di Dewan. Perempuan tidak bisa selamanya mengandalkan keluarga, berlindung di balik kesuksesan keluarga seterusnya. Karena ketika mereka sudah terpilih, perempuan harus berhadapan langsung dengan konstituen mereka. Perempuan harus menunjukkan kapabilitas mereka pada lingkungan dan tempat mereka bekerja khususnya ketika berada dalam partai politik dan di panggung politik.

Perempuan harus berhati-hati ketika berpolitik di tengah masyarakat patriarki. Bila terjadi sesuatu hal yang merupakan pelanggaran baik itu norma dalam masyarakat maupun hukum terhadap perempuan aktor politik, terpaan dan serangan-serangan padanya lebih tajam dan menyakitkan oleh masyarakat patriarki. Perempuan politisi akan dianggap rendah, tidak bermoral, murah jika diketahui oleh masyarakat yang bersangkutan melakukan selingkuh dan hubungan terlarang. Sedangkan "cap/stempel" yang sama, tidak diberikan kepada laki-laki yang menjadi partner perbuatan tersebut. Masyarakat akan cenderung menganggap "biasa" jika perbuatan melanggar susila ini dilakukan oleh politisi laki-laki, sebaliknya terhadap perempuan kesalahan-kesalahan selalu ditimpakan.

4.1.3. Perempuan Jawa Tengah dalam Dinamika Regulasi

Geliat perjuangan perempuan dalam politik di Jawa Tengah, mengalami dinamika yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi yang mengatur tentang

keterlibatan mereka dalam politik. Bisa jadi, dampak regulasi ini juga sama terjadi di provinsi lainnya. Konstitusi selama ini telah memberi ruang kepada perempuan dengan 30% keterwakilan, sehingga arena politik harus memberikan kemungkinan-kemungkinan dan ruang yang nyaman untuk laki-laki dan perempuan untuk terlibat aktif di dalamnya.

Regulasi yang ditetapkan sejak reformasi, baik yang secara langsung mengatur khusus mengenai perempuan maupun yang tidak berkenaan langsung tentang mereka, selalu mengalami perubahan. Regulasi yang selalu berubah tentang Pemilu dan partai politik memperlihatkan dinamika yang terjadi pada perempuan berpolitik di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Riset ini mendeskripsikan dinamika regulasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tiga kali Pemilu, yakni Pemilu 2004, 2009 dan 2014 khususnya yang bersangkutan dengan keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen oleh partai politik sebagai bakal calon dan calon legislatif, proses pemenuhan syarat administratif, sampai dengan keterpilihan mereka oleh konstituen.

Tahun 1999 menjadi awal dari terbukanya kran demokrasi. Undang- undang No. 39 tahun 1999 menjadi regulasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Pasal 46 memberikan jaminan terhadap keterwakilan perempuan. Tidak banyak perempuan yang beruntung saat itu. Angka keterwakilan perempuan di legislatif DPR RI sejumlah 9% (persen) dan 5% (persen) pada DPRD Propinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa ditahap awal regulasi ini belum mampu secara signifikan menggiring, mengarahkan perempuan untuk berpolitik. Pemilihan legislatif tahun 1999 yang dilaksanakan 9 Juni 1999 ini dilaksanakan dengan sistem nomor urut calon.

Sistem ini dianggap sebagai kendala bagi perempuan pada saat itu, karena secara kuantitas masih sedikit perempuan yang ikut dan masuk ke dalam jajaran elite pengurus partai. Kepemilikan nomor urut calon legislatif dalam partai memang sangat strategis. Namun, kondisi sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam politik dalam 48 partai-partai baru peserta Pemilu, tidak banyak yang bisa diraih perempuan. Satu tahun kemudian, diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Inpres ini, mengikat semua kementerian, departemen, SKPD di masing-masing propinsi untuk menyusun program dan perencanaan penganggaran yang berbasis pada kebutuhan gender.

Pada ranah politik, tindakan afirmasi baru muncul menjelang Pemilu 2004. Keberadaan perempuan dalam politik, sangat dipengaruhi Undang- Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Pasal 65 ayat 1 mengatur bahwa setiap parpol peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut, mendorong partai politik untuk memperhatikan keberadaan perempuan. Ini merupakan angin segar bagi perempuan untuk masuk dalam arena politik. Partai politik mendorong perempuan untuk maju dalam politik, bahkan partai mencari kader-kader baru demi mewujudkan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini dirasakan benar oleh informan 2. Dalam wawancara yang dilaksanakan peneliti, informan 2 memaparkan;

> “Pada awal masuk dalam dunia politik saya *dikengken* (disuruh) oleh orang DPC (pengurus partai). Dasar pertimbangan orang partai saat itu katanya, karena partai membutuhkan satu orang perempuan sebagai kader, karena kader perempuan di DPC sebelumnya Bu Suniah sudah *sepuh*, jadi harus ada kader baru di partai. Saya

ragu karena saya sekolah S2 waktu itu. Saya, intinya itu *gini*, saya yang utama sekolah. Daripada saya dianggap mengganggu partai, lebih baik tidak. Tapi, pengurus partai bilangnya nggak *papa*. Akhirnya saya menyatakan bersedia jadi pengurus partai jadi wakil ketua di DPC. Saya menggantikan Bu Suniah di PPKB. Pemilu 2004 saya didorong maju ke pencalonan legislatif". (Wawancara tanggal 5 Februari 2018).

Perjuangan perempuan tidak hanya berhenti pada kesediaan mereka pada partai saja. Pada tahap berikutnya, dibutuhkan juga komitmen partai politik. Ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu menetapkan bahwa calon legislatif (Caleg) terpilih, ditetapkan berdasarkan aturan nomor urut. Caleg dengan nomor urut kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk lolos ke parlemen daripada Caleg dengan nomor urut besar yang berakibat pada terbatasnya kesempatan lolos menjadi anggota legislatif. Dorongan terhadap perempuan, terjadi secara nasional oleh kelompok-kelompok yang konsen dengan perjuangan perempuan. Untuk meningkatkan keberadaan perempuan dalam partai politik, terutama dalam penentuan nomor urut, menjelang Pemilu 2004 banyak slogan, iklan layanan yang memberi semangat pada perempuan. Satu diantaranya; "Ibarat telur. Kalau diletakkan paling atas, peluang reproduksi paling besar. Begitu juga caleg wanita. Kalau diletakkan pada urutan nomor bawah, sangat kecil peluangnya jadi. Makanya, jangan mau jadi caleg wanita, kalau tidak ditempatkan pada urutan pertama!". (http://www.watchindonesia.org/7421/berebut-nomor-urut-pada-proporsional-ter-buka?lang=ID).

Perebutan nomor urut, biasanya menimbulkan konflik di internal partai. Perempuan yang tidak memiliki basis dan dukungan dalam partai yang kuat, akan tersingkir oleh elite dan pengurus partai yang kebanyakan laki-laki. Namun, sebaliknya

bagi perempuan yang mempunyai kekuatan (dukungan) dalam partai terutama yang berasal dari keluarga, mereka akan bertahan. Beberapa kasus, partai memiliki beberapa pertimbangan yang lain tentang keberadaan perempuan.

Jadi, pada saat itu, nomor urut menjadi hal yang prestisius dan sangat berharga bagi calon legislatif yang direkrut oleh partai politik. Karena perebutan nomor urut, perempuan sering dihadapkan pada kepentingan-kepentingan calon lain dalam partai politik. Banyak hal terjadi pada fase ini, tidak terelakkan juga terjadi konflik antara calon termasuk perempuan. Informan 1 memperoleh nomor urut 1 di daerah pemilihannya dalam Pemilu 2004 dan ia memenangkan pemilihan untuk pertama kalinya (wawancara 3 Januari 2018).

Regulasi penentuan kemenangan berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai politik ini kemudian juga ditetapkan kembali dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun, menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, tepatnya tanggal 23 Desember 2008, melalui Putusan Nomor 22/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sistem penetapan calon legislatif berdasarkan nomor urut dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini. Putusan ini diawali dari adanya permohonan calon legislatif dari PDIP dan Partai Demokrat. Substansi permohonan kedua pemohon, adalah tentang sistem penetapan anggota legislatif yang menggunakan nomor urut serta tentang kuota perempuan dalam daftar urut Caleg (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Sistem penetapan kemenangan anggota legislatif berdasarkan nomor urut, dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh

konstitusi negara. Selain itu, sistem nomor urut dianggap telah mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih. Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi menyatakan alasan penetapan, karena dasar filosofis dalam penentuan pemenang itu adalah suara terbanyak. Memberlakukan sistem nomor urut, berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Pada Putusan MK ini juga, permohonan yang berkenaan dengan kuota perempuan dalam daftar urut Caleg, tidak dikabulkan. Pasal 55 ayat (2) tetap berlaku. Isi Pasal mengenai setiap 3 (tiga) orang bakal calon, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) perempuan bakal calon, oleh Hakim ditegaskan sebagai tindakan afirmasi bagi perempuan dalam politik, dengan dasar Konvensi perempuan sedunia tahun 1995 di Beijing.

Pada saat itu, berbeda dengan Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, Maria Farida satu-satunya hakim MK perempuan mengeluarkan *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda). Menurutnya, Majelis seharusnya tidak mengabulkan permohonan terkait dengan nomor urut. Sistem suara terbanyak yang ditetapkan MK sangat merugikan perempuan.

> "Majelis berkeputusan kontradiktif. Tujuan afirmatif adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di Parlemen, sehingga sistem suara terbanyak adalah identik dengan menafikan tindakan afirmatif." (http://m.hukumonline.com/komentar/...).

Terhadap putusan MK, terlepas dari adanya pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat, kenyataannya putusan tersebut membawa dampak angin segar bagi para calon legislatif yang tidak pernah menempatkan diri pada nomor urutan satu dimasing-masing partainya. Kemenangan bagi mereka, karena putusan MK memberi kesempatan

kepada semua calon untuk menunjukkan dirinya. Kemampuan mereka meraup suara, memperoleh dukungan suara terbanyak walaupun mereka tidak berada pada urutan pertama. Tentu, tidak mudah bagi partai politik untuk menghadapi putusan tersebut. Sistem nomor urut, telah lama dilaksanakan sebagai dasar penetapan kemenangan calon berdasarkan nomor urut, membuka peluang partai untuk memperdagangkan nomor urut kepada para kandidat legislatif. Sistem nomor urut yang dilaksanakan selama ini, membuat perempuan terpojok, karena sedikit elite partai yang berpihak kepada mereka. Tidak mustahil, jika setelah putusan MK banyak terjadi konflik intern partai. Persoalan-persoalan akibat perubahan sistem pemenangan, tentu muncul didalam partai. Kroni, pertemanan dalam penentuan nomor urut yang terjadi selama ini dihapus oleh MK.

Putusan ini berdampak pada perempuan di Jawa Tengah, demikian disampaikan oleh informan 3 dalam wawancara (tanggal 3 Maret 2018 di Senayan).

> "Putusan MK menjadikan perempuan berupaya lebih keras, bekerja secara maksimal untuk dapat bersaing secara ketat dengan calon legislatif yang lainnya. Tapi ya tergantung perempuannya, kalau basis massanya sudah banyak ya tidak masalah".

Di lapangan ada dua respon, berdasarkan hasil wawancara dan ini wajar, menurut peneliti. Bagi perempuan yang memiliki "daya" di partai politik, mereka akan merasa terusik tingkat kenyamanannya. Mereka sudah terbiasa dengan kemenangan selama ini, dengan nomor urut dalam partai. Bagi perempuan yang selama ini punya masalah dalam penentuan nomor urut, perempuan merasa putusan MK sangat menguntungkan. Intinya, perempuan harus tangguh menghadapi tantangan secara eksternal maupun internal, menghadapi serangan, jegalan, fitnah dari calon legislatif yang lainnya.

Di sisi lain mengenai Putusan MK, tergantung dimana melihat posisi partai politik. Akan menilai negatif jika berketetapan bahwa partailah yang harus menentukan siapa yang akan terpilih, seperti yang dinyatakan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Wonosobo;

> "Peserta pemilu adalah partai politik menurut Undang-undang. Tapi, yang dipilih orang per orang. Akibatnya sulit bagi calon di lapangan. Paska putusan MK, masa sulit bagi partai politik" (Wawancara 3 Nopember 2017).

Sistem ini semakin mempersulit perempuan yang pindah daerah pemilihannya. Menjalin komunikasi dengan kontituen baru, tentu saja membutuhkan waktu. Semua kandidat akan mengalami hal yang serupa. Mereka bertarung saling "menjual" nama, saling bertarung baik dengan lawan politik lain partai maupun dengan lawan politik se-partai. Ini lebih mudah sebelumnya bagi perempuan, karena konstituen terikat oleh ideologi partai politik.

Pemilu 2009 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota legislatif yang menganut sistem proporsional terbuka ditetapkan untuk memilih DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka adalah kombinasi antara dua sistem yakni sistem proporsional dan suara terbanyak. Penentuan calon yang berhak duduk di lembaga perwakilan rakyat, tidak hanya berdasarkan pada nomor urut, namun juga berdasarkan perolehan suara calon juga diukur berdasarkan angka BPP (bilangan pembagi pemilih). Sehingga calon tersebut berhak duduk dilembaga perwakilan, walaupun nomor urutnya ada diurutan terbawah dengan ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP.

Untuk DPRD Kabupaten, Kota maupun di Provinsi Jawa Tengah, seluruh partai politik yang memperoleh suara, berapapun suaranya akan diikutkan dalam pembagian kursi. Terdapat dua tahap perhitungan yakni; pertama, dilakukan dengan membagi suara sah seluruh partai politik disatu daerah pemilihan dengan jumlah kursi untuk ditentukan BPP-nya. Partai politik yang lolos BPP lah yang nanti akan memperoleh kursi. Tahap berikutnya, dilakukan dengan cara rangking. Jika pada perhitungan awal masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi dan sisa suara yang belum terpakai diperhitungan pertama akan diikutkan dalam perhitungan tahap kedua. Partai dengan suara paling banyak ditahap dua, akan mendapatkan kursi. Jika terdapat partai politik dengan suara sama sedangkan sisa kursi tidak mencukupi, maka penentuan akan dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno terbuka KPUD setempat.

Dalam penentuan calon legislatif, KPU menentukan calon legislatif yang jadi, setelah partai politik memperoleh jatah kursi masing-masing. Kursi kemudian diberikan pada calon legislatif dengan suara terbanyak dari partai yang bersangkutan di masing-masing daerah pemilihan. Berlakunya sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan calon perempuan berjuang sendiri-sendiri tanpa dampingan partai politik (hasil wawancara dengan Ketua DPC PDIP). Masing-masing calon dari partai politik sibuk untuk memenangkan diri. Ini, tentu lebih menyulitkan perempuan. Bahkan perempuan harus bertarung melawan calon lain baik laki-laki maupun perempuan lain dalam partainya atau yang satu partai. Tidak jarang perempuan “dijegal”, dicurangi, dibeli suara pemilihnya oleh pemilih laki-laki yang mengerahkan segenap upaya mereka untuk meminta dukungan pemilih. Perempuan dirampas atau bahkan dikurangi

hak eksisnya atau dihambat kariernya dalam berpolitik, sehingga perempuan kesulitan memperoleh dan menempati status keberdayaannya dalam partai politik. Kalau perempuan tidak punya kesiapan, hanya mengandalkan kesempatan diawal seperti yang diatur oleh Undang- Undang, tentu mereka akan kesulitan.

Undang- Undang ini memberi penetapan atas nasib perempuan dalam politik melalui *affirmative action* yang jelas. Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 mengenai daftar bakal calon memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (2) juga mengatur bahwa dalam daftar bakal calon disetiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Sistem yang demikian menurut Undang-undang, kemudian dikenal sebagai sistem *zipper* (resliting). *Affirmative action* dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia publik yang masih tertinggal dari laki-laki. Pengaturan ini dapat memberi perempuan *bargaining position* yang kuat. Namun, sifat dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) ini masih kesukarelaan, bukan kewajiban. Pada waktu itu, jika ada partai yang tidak memenuhi sistem *zipper* pun tidak akan mereka mendapat hukuman. Akibatnya, perempuan tetap belum memiliki posisi tawar yang kuat.

Baru dalam pelaksanaan Pemilu 2014, selain dilaksanakan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2012, untuk memperkuat tindakan afirmasi terhadap perempuan melalui penetapan Peraturan KPU No. 07 tahun 2013. KPU memberi sanksi terhadap partai politik yang tidak melaksanakan sistem *zipper*. Sistem ini dilaksanakan secara ketat, partai yang tidak dapat memenuhi tidak diberikan ijin untuk mencalonkan bakal calonnya dalam daerah pemilihan pada Pemilu yang terlaksana. Berlakunya regulasi

KPU bagi perempuan dan penetapan sistem *zipper*, membuat kepanikan dalam partai politik. Partai politik harus menyiapkan kader perempuan yang akan menjadi wakil mereka sehingga perhatian khusus di tingkat elite DPC terhadap keberadaan kader perempuan mendadak dilakukan.

Diagram 4.2. Dinamika Regulasi 1999 sampai dengan 2017

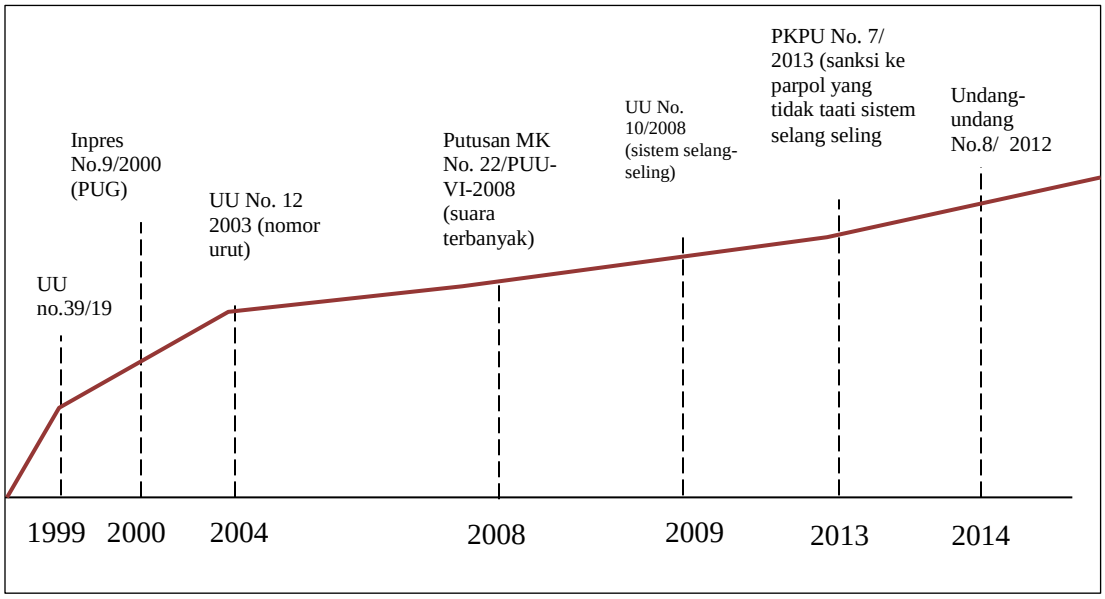

Keterangan gambar:
_____ = garis kurve yang menunjukkan peningkatan afirmasi melalui regulasi
-------- = garis penghubung tahun dan regulasi yang ditetapkan
(sumber: data primer diolah)

Dalam diagram di atas, terlihat jelas bahwa regulasi *affirmative action* yang ditetapkan selama ini semakin meningkat, menuju ke arah yang lebih baik untuk sebesar-besarnya memberi ruang pada perempuan berpolitik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebetulnya, perempuan melalui kebijakan ini memiliki kesempatan, akses yang sangat luas dalam berpolitik, mulai dalam partai politik maupun ketika mereka diberi ruang-ruang untuk maju pada arena rekrutmen legislatif.

4.1.4. Perempuan Memenuhi Syarat Administratif Rekrutmen (di Partai Politik dan KPU)

Perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan secara administratif. Dua tahapan persyaratan administratif harus penuhi oleh perempuan, yakni persyaratan yang ditetapkan intern partai politik dan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Persyaratan yang tertuang dalam Undang- Undang, sifatnya umum berisi ketentuan untuk semua bakal calon, tidak hanya untuk perempuan saja, sedangkan yang kedua adalah syarat khusus yang ditetapkan oleh masing-masing partai politik. Syarat ditetapkan bagi calon legislatif dalam Pemilu 2004 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 pada pasal 60, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengatur Pemilu 2009 dan pelaksanaan Pemilu 2014, berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2012.

Persyaratan calon anggota legislatif pada tiga waktu penyelenggaraan Pemilu di atas, mengalami dinamika khususnya syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003, berubah dan terdapat penambahan pada pelaksanaan Pemilu 2009. Sedangkan persyaratan dalam Pemilu 2009 dan 2014 adalah sama. Pembeda diantara ketiganya, ada dalam redaksional kalimat yang disusun, seperti syarat “tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan syarat “tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” ada pada

ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2013, berubah menjadi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, ketentuan calon legislatif ada penambahan yakni ketentuan tentang persyaratan bahwa bakal calon legislatif harus terdaftar sebagai pemilih; jika masih berstatus sebagai ASN, mereka diminta mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mereka harus bersedia bekerja penuh waktu,

pengurus pada BUMN-BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, bersedia tidak berpraktik sebagai advokat/pengacara, akuntan publik, notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berkenaan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang berdampak pada konflik kepentingan dengan wewenang, hak, tugas, sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan. Kemudian, bakal calon juga harus bersedia untuk tidak merangkap jabatan, pengurus BUMN-BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; mereka adalah anggota Partai Politik peserta Pemilu; dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan, dan dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.

Berbeda dengan persyaratan dalam yang tertuang dalam Undang-undang, persyaratan calon legislatif yang ditetapkan oleh partai politik lebih dinamis (berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan pengurus-pengurus partai politik, dan informan). Setiap partai politik memiliki prosedur yang berbeda dalam proses rekrutmen para kandidat. Pola-pola rekrutmen ini merupakan indikator yang penting untuk melihat; nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam masyarakat politik, dan merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan/ dinamika dalam rekrutmen calon/ kandidat yang dilakukan partai-partai politik. Hal ini dapat dirasakan oleh para informan perempuan yang mengalami tiga kali proses rekrutmen oleh partai politik. Pada PKB Kab Magelang, menurut informan 2 bahwa;

> "Proses rekrutmen di partai dulu lebih sulit, kandidat harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan partai politik yang dilanjutkan seleksi administratif dengan penetapan poin dan test-test yang dilakukan partai. Mekanisme rekrutmen dulu, berdasarkan skoring. Penilaian mengenai aktifitas bakal calon, secara administratif diseleksi, *lho*. Ada test wawancara. Perempuan mengalami proses yang sama dengan laki-laki. Saat maju pencalonan legislatif, saya bertemu dengan laki-laki separtai Sekretaris Dewan Syuro, Pak Zaidun nomor urut 2. Saya nomor urut 1-nya. Saya yang menang dalam proses pemilihan. Nah, sekarang ini lebih gampang, menurut saya. Sepertinya kriteria kandidat *kok* lebih longgar". (Wawancara tanggal 25 Februari 2018).

Idealnya, rekrutmen oleh partai politik dilakukan dalam tiga tahapan, yakni tahap penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon dan/ calon oleh partai politik. Pada tahapan penjaringan, digambarkan oleh informan1 bahwa partai akan melakukan konsolidasi intern, dilakukan pendataan anggota, kader, pengurus partai yang siap mencalonkan diri atau dicalonkan. Kemudian penyaringan, seperti pernyataan informan 2 di atas, bahwa calon menghadapi pamilu 2004 dan pemilu 2009 oleh partai politik

harus diseleksi (proses penyaringan) berdasarkan nilai bobot beberapa instrumen seperti; tingkat pendidikan, lama keanggotaan, jabatan di partai politik, pengalaman, dan dedikasi calon.

Rekrutmen bakal calon oleh PDIP misalnya, DPP akan mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur tentang tata cara penjaringan, penyaringan dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten/ kota dan DPR RI. Misalnya untuk mengatur pelaksanaan rekrutmen pada Pemilu 2009, selain persyaratan Undang-undang No. 10 Tahun 2008, partai juga mengeluarkan SK Nomor 210/KPSS/DPP/V/2008. Dalam aturan partai, disebutkan bahwa untuk menjadi calon, harus sebagai anggota partai dulu. Keanggotaan, minimal tiga tahun dan yang bersangkutan aktif sebagai pengurus. Secara khusus ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) SK tersebut bahwa calon harus; (a) setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (b) Tidak terlibat kongres Medan/Palu; (c) Tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan kongres II PDIP Bali 2005; (d) mengisi form DRH yang disediakan DPP Partai; (e) mengisi *form* rekrutmen yang disediakan DPP Partai; (f) bagi anggota partai yang keanggotaannya kurang dari 1 tahun wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 orang anggota, yang dibuktikan dengan foto kopi KTA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Wonosobo, terungkap bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh intern partai mengalami dinamika. Perubahan apa yang dipersyaratkan partai ini dan pelaksanaannya di lapangan ini dipengaruhi oleh banyak hal, terutama menjelang Pemilu 2014 yang mempersyaratkan

keikutsertaan perempuan dalam daftar calon yang harus selang seling. Tidak banyak perempuan yang mau serius mencalonkan diri dan atau dicalonkan. Kalau partai sudah tidak memiliki kader yang bisa dicalonkan atau mencalonkan diri, terpaksa partai merekrut perempuan-perempuan yang sebelumnya bukan pengurus, bukan anggota untuk mencalonkan diri memenuhi kriteria yang dipersyaratkan KPU.

Mengenai keterlibatan perempuan yang bukan pengurus, bukan kader partai sebelumnya tapi bisa mencalonkan diri (diusung) partai politik, dijelaskan melalui wawancara dengan informan 1 bahwa; "…mekanisme rekrutmen oleh partai politik ada dua cara yakni partai membuka pendaftaran bagi kader dan untuk non kader". Mereka yang sudah melewati proses penjaringan, mengisi form pendaftaran. Untuk kader, biasanya penentuan daerah pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan mereka karena mempertimbangkan basis konstituen. Sedangkan bagi Caleg baru (yang bukan kader) semua diputuskan partai, walaupun usulan calon juga menjadi pertimbangan.

Pada masa kini, setelah PKPU mengenai sanksi kepada partai politik yang tidak mampu mengusung sistem selang-seling calon legislatifnya partai sebagai institusi politik, kadangkala oleh karena sulitnya kader perempuan dalam partai, hanya mengedepankan terpenuhinya syarat saja. Yang terjadi, diakui oleh beberapa pengurus partai bahwa bukan kualitas kader perempuan dan pemberian kesempatan sejak awal yang menjadi fokus utama mereka. Informan 2 menegaskan; "banyak yang berubah, rekrutmen calon dulu menggunakan sistem skoring yang dilakukan partai. *Skoring*nya dulu menggunakan instrumen-instrumen penilaian administratif; aktifitas, luaran, buku, test wawancara, menurut saya *kok beda* dengan sekarang".

Beberapa partai politik sering untuk kepentingan meningkatkan elektabilitas partai dan memenuhi kuota 30%, mereka menempatkan calon legislatif perempuan tanpa mempertimbangkan kapabilitas. Yang sekarang terjadi, partai lebih memilih cara instan dengan melibatkan siapapun yang mungkin hanya memiliki popularitas, modal, dan memenuhi persyaratan saja (wawancara dengan Afif, Ketua DPC PDIP Wonosobo tanggal 21 April 2019).

Jadi, proses rekrutmen yang dilakukan partai politik di Jawa Tengah selama ini, seleksi dilakukan dengan mengevaluasi bakal calon (pelamar) dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kriteria pemilihan baik formal maupun informal, dan memilih kandidat tergantung penilaian tentang pelamar tersebut.

4.1.5. Perempuan dalam Dinamika Partai Politik

Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik mempunyai tanggungjawab untuk kelangsungan organisasi dan kepempimpinan dalam organisasi. Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 7 Ayat (5) menyebutkan bahwa partai politik menjadi sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi dan seleksi untuk kandidat. Pada proses ini, partai dapat memilih sumber daya yang baik dari orang-orang yang berkapabilitas dan menganut sistem nilai yang ditetapkan partai.

Partai politik di Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perubahan regulasi. Keberadaan, eksistensi dan elektabilitas mereka di dalam arena demokrasi. Perempuan dalam arena rekrutmen legislatif, tidak lepas dari keberadaan partai politik pengusung mereka. Undang- Undang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sejak 2004 telah mengatur keterlibatan perempuan dalam politik. Pasal 65 Ayat (1) menegaskan, "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperlihatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen." Pasal tersebut mengatur keterwakilan perempuan 30 persen, diawali melalui ketetapan dalam kepengurusan partai politik. Pasal ini memberikan jalan bagi perempuan melalui regulasi, untuk mau masuk ke dalam dunia politik. untuk selanjutnya, diharapkan partai politik menjadi kendaraan bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi, beraktifitas, dan berjuang dalam politik. Jika sejak delapan belas tahun yang lalu sudah diberlakukan ketentuan tersebut, kemudian pertanyaannya adalah mengapa masih rendah? Jika dilihat dari apa yang telah terjadi di lapangan, rendahnya angka representasi perempuan di ruang politik Jawa Tengah juga tak bisa dilepaskan dari pengaruh *platform* partai politik sendiri.

Beberapa riset terdahulu mengungkap bahwa dominasi laki-laki dalam institusi politik termasuk partai politik selama ini membuat perempuan sulit untuk menembus barikade yang sangat kuat. Perempuan yang terjun pada dunia politik harus menghadapi tantangan yang berat dari rekannya politisi laki-laki. Rintangan-rintangan konstitusional dan legal juga terjadi. Negara-negara demokratis mempunyai hukum yang menentukan siapa yang mungkin menjadi pemilih dan menjadi wakil serta

bagaimana perwakilan dilaksanakan. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan siapa perempuan yang bisa menjadi wakil, umur, tempat tinggal, dan sebagainya. Bahkan, *affirmative action* untuk perempuan, sering menjadi persoalan tersendiri dalam partai politik.

Keberpihakan partai terhadap kesetaraan gender oleh pengurus partai masih belum sepenuh hati. Selama ini di setiap periode penyelenggaraan Pemilu, yang terjadi adalah banyak sekali perempuan yang "terlibat hanya secara administratif" saja. Sejak tahun 2004, secara administratif perempuan dilibatkan dan diberi jalan, tercantum sebagai pengurus partai ditandai dengan bukti KTP dan tanda tangannya sebagai pengurus partai. Tapi, mereka sering tidak mengerti alasan mengapa ia berada dalam kepengurusan partai. Salah satu alasannya adalah perempuan yang sudah masuk menjadi bagian dari partai politik, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota juga tidak segera belajar banyak tentang berpolitik dalam partai. Dalam wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Wonosobo, dijelaskan bahwa;

> "Perempuan harus menempatkan diri sebagai subjek, sehingga muncul inisiasi, semangat. Masih jarang (walaupun ada beberapa) yang ditetapkan sebagai calon legislatif oleh partai. Biasanya kalau ditetapkan, *ya* karena yang bersangkutan cakap, berdedikasi, punya jemaah pengajian atau memang kader partai yang bagus". (Wawancara tanggal 21 April 2019).

Sistem rekrutmen dalam partai politik, khususnya terhadap perempuan sering mengalami dinamika, seiring dengan perubahan regulasi yang ditetapkan. Masing-masing berdampak terhadap perempuan. Misalnya fenomena menjelang Pemilu 2014, demi pemenuhan keterwakilan 30 persen dengan sistem *zipper*, setiap partai politik

harus merekrut perempuan sebanyak-banyaknya untuk mengamankan partai agar tidak terkena sanksi dari KPU.

Selama ini, rekrutmen terhadap perempuan oleh partai sering dilakukan melalui sistem patron, keluarga, pertemanan. Banyak akibat dari fenomena ini, diantaranya; banyak perempuan yang direkrut sebagai pengurus, tapi mereka tidak aktif dalam kepengurusan partai politik; beberapa pengurus tidak mandiri, mereka lebih tergantung pada patron, keluarga yang mengajak mereka; banyak perempuan yang aktif dalam partai politik, namun mereka tidak berkesempatan untuk menjadi calon legislatif karena akses, kapabilitas, dan sebagainya atau bisa saja terjadi, karena keberadaan perempuan dalam kepengurusan partai politik hanya sebatas administratif saja seperti yang disampaikan di atas. Jika demikian, pada tahap awal/ pertama ini perlu ditetapkan kembali keputusan perempuan berpolitik, niat dan motivasinya. Tahapan kedua, baru kemudian perempuan sukses terseleksi oleh partai politik. Disini perempuan sudah mulai "berhadapan" dengan para kandidat laki-laki. Para penggiat dalam partai seringkali membuat ungkapan untuk menggambarkan pertarungan dalam partai sebagai berikut; "namanya berpolitik, kesempatan sudah diberikan, kehadiran sudah dipersyaratkan, ya mari bertarung".

Di dalam partai, perempuan juga harus bertarung dengan kader lainnya yakni kader laki-laki. Kesempatan dan peluang perempuan serta daya juang mereka juga diadu dengan kader laki-laki, inilah realitas dalam kegiatan politik. Selain itu, program kerja dan kebijakan partai politik, juga tergantung pada kepentingan masing-masing

kader dan elite yang kebanyakan adalah laki-laki juga. Perempuan masih belum tertolong dan belum bisa menolong dirinya dalam kehidupan berpolitik.

Dinamika regulasi Pemilu, mempengaruhi perempuan dalam partai politik. Ketika penentuan kemenangan calon ditentukan melalui nomor urut, maka semua calon juga menginginkan nomor urut atas di daerah pemilihan masing-masing. Perempuan berjuang mendapatkan nomor urut yang "cantik" di partai politik. Mereka berhadapan dengan pesaing dalam partai yang kebanyakan laki-laki. Ketika kepentingan masing-masing individu sama, maka yang harus dilakukan tentu saja perebutan akses untuk terpenuhinya kepentingan.

Dalam Pemilu 2004, terhadap penetapan partai untuk perempuan mendapatkan nomor atas, oleh Imam (34) Pengurus Partai Golkar disebutkan;

> "Perempuan masih jarang saat itu aktif di partai, kebanyakan mereka orang-orang "baru" dalam partai politik. Sedangkan orang lama masih banyak yang laki-laki. Namun, beberapa perempuan yang sudah lama aktif *ya* tetap mendapatkan nomor urut atas, misalnya Bu Kusdilah. Banyak pertimbangan partai".

Wawasan perempuan terhadap dunia politik semakin terbuka seiring dengan perubahan jaman. Sebagai pendatang baru, perempuan banyak belajar di awal terjun kedalam partai politik yang lebih banyak "diatur" oleh laki-laki. Dalam kepengurusan partai politik, perempuan menyesuaikan diri dengan mengambil peran-peran sekunder. Perempuan tidak bisa maksimal memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk partai politik. Mereka lebih memilih posisi sebagai wakil ketua, bendahara, sekretaris atau sebagai anggota biasa. Itupun jika keluarga, suami mengijinkan. Bagi perempuan, berkiprah dalam partai politik membutuhkan waktu yang tidak terbatas.

> “Tanggungjawab dalam partai sangat besar, apalagi jika menyangkut masalah banyak orang, menyangkut keputusan-keputusan partai. Saya orang baru di partai saat itu, perempuan *lagi*, biasanya dimintai pertimbangan tapi tidak sebagai pengambil keputusan yang sering diambil pengurus partai lainnya, oleh Ketua DPC.” (Wawancara dengan informan 3, Februari 2018).

Oleh karenanya, perempuan harus terlibat. Seperti penegasan informan 1; “politik itu tentang kebijakan, tentang tata pemerintahan yang perempuan harus sadar, bahwa mereka harus terlibat”. Keberadaan mereka penting agar bisa mengambil bagian dari proses pengambilan kebijakan. Perempuan harus *ngerti* politik, mempunyai motivasi untuk terjun dan mengambil bagian, bukan sekedar ikut-ikutan. Berani mengemukakan pendapat mereka, pandangan mereka kepada orang lain bahkan dihadapan publik. Perempuan harus mempunyai keteguhan, tidak hanya ikut-ikutan, *manut* saja seringnya jadi penonton dalam realitas politik yang melibatkan mereka.

Rasa percaya diri perempuan terbangun tidak serta merta dalam waktu sekejap. Pengalaman, membentuk pengetahuan perempuan dalam memahami kehidupan politik yang dimulai dari pengetahuan tentang berorganisasi, berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Perempuan didorong oleh elite partai politik di awal untuk masuk mengikuti proses pendaftaran bakal calon. Informan 2 menjelaskan, bahwa ada orang pengurus cabang yang mendatanginya satu tahun sebelum Pemilu 2004. Yang bersangkutan mendorong informan untuk maju karena partai politik membutuhkan perempuan sebagai kader. Saat itu, ada satu orang perempuan aktif di PKB, tapi sudah *sepuh* (tua) yang ber-Dapil di Windusari. Partai membutuhkan perempuan (walaupun satu orang) untuk mengisi kepengurusan dan ikut menjadi bakal calon. Bahkan informan diberi nomor urut 1 sedangkan calon lain laki-laki yang *notabene* adalah

sekretaris Dewan Syuro ditetapkan dengan nomor urut 2 pada Pemilu 2004. Penetapan nomor urut ini karena pertimbangan partai benar-benar membutuhkan perempuan. Kaliangkrik, Bandongan, Windusari. Kaliangkrik dan Windusari adalah basis PPP.

Demikian pengalaman Informan 1, proses awal masuk menjadi bakal calon peserta pemilu juga demikian. Kebutuhan partai politik akan kader perempuan menjadi pertimbangan para elite partai untuk mendukung dan memberi jalan bagi perempuan maju sebagai kandidat. Dukungannya luar biasa, mulai mendaftar sampai penentuan daerah pemilihan dikawal oleh partai politik pada Pemilu 2004.

Peran para elite partai sangat dominan dalam menentukan Caleg yang mewakili partainya. Disinilah, perempuan benar-benar diukur kapabilitas, kemampuannya untuk melakukan *lobby* dan komunikasi politik. Apalagi dalam sistem kemenangan berdasarkan nomor urut seperti yang terjadi pada Pemilu 2004, elite partailah penentu utamanya. Perempuan sering tidak mendapat nomor urut atas (satu, dua), karena sebagai orang baru, perempuan jarang menduduki jabatan penting dalam kepengurusan partai. Kalau ada yang mendapat nomor urut satu pada saat itu, karena kepentingan partai atau pengurus partai punya pertimbangan lain. Hal ini ditegaskan oleh informan 2;

> "Seperti yang terjadi pada saya pada Pemilu 2004, nomor urut satu untuk saya ya ditentukan oleh partai, pengurus partai (baca: elit partai). *Lha* Sekretaris Dewan Shuro urutannya di belakang saya (wawancara 3 Maret 2018)."

Namun, di lapangan pelemahan pengkaderan dalam rekrutmen juga dirasakan perempuan, dengan kesempatan politik yang tidak terbuka seperti laki-laki. Perempuan merasa seperti ada sekat terselubung. Kampanye dengan menggunakan kalimat bahwa

kodrat perempuan yang baik dan akan mendapat berkah surga itu adalah perempuan yang selalu tidak jauh dari dapur, kasur dan sumur sering dilakukan. Tentu saja, perempuan merasa terdiskriminasi, dimana posisi strategis sulit diperoleh perempuan bahkan ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan. Banyak kader dan calon perempuan tidak diperhatikan oleh partai politik padahal mereka butuh pendampingan untuk maju pada tahap berikutnya, yakni ketika bertemu konstituen di daerah pemilihan mereka.

Selain nomor urut, perempuan juga harus berebut daerah pemilihan. Perempuan dan calon lain akan saling berhadapan terkait dengan dua hal tersebut. Banyak hal terjadi, misalnya oleh elite partai politik perempuan ditempatkan pada daerah pemilihan yang rawan dan berpotensi mengancam keamanannya. Kadang, skenario ini disengaja, supaya keluarga calon perempuan berpikir ulang untuk tak mengizinkan perempuan masuk dalam arena kontestasi politik. Calon perempuan kemudian ditekan psikisnya, karena pulang malam dari daerah pemilihan, dipersempit ruang geraknya, ditekan oleh calon lain dan sebagainya. Pada Pemilu 2009, informan 1 dihalangi untuk masuk kembali dalam rekrutmen legislatif. Ini karena Ketua PAC (yang sebelumnya satu daerah pemilihan dengan informan) merasa terancam keberadaannya di depan konstituen apalagi karena sistem penentuan kemenangan tidak lagi didasarkan pada nomor urut partai, tapi sudah dengan suara terbanyak. Alhasil, segala cara dilakukan, mulai dengan upaya tidak melibatkan informan dalam kepengurusan (PAC), sampai dengan penentuan memindahkan daerah pemilihan (Dapil) untuk informan melalui keputusan partai politik.

Pengalaman akan keputusan pemindahan Dapil, cukup mengesankan bagi Informan 1. Walaupun semua dibicarakan dalam partai, dimana informan diberi peluang memilih Dapil lain yang dikehendaki, tapi sangat menyakitkan dan dirasa tidak adil. Terdapat dua alasan informan menganggap keputusan Partai tidak adil saat itu. *Pertama*, dulu sebelum masuk ke dalam kepungurusan Partai, oleh pengurus Partai lainnya yang bersangkutan direkrut, katanya untuk menguatkan perolehan suara di Dapil. Hal ini terbukti pada pemilihan tahun 2004, suara terbanyak diperoleh oleh informan. Demikian 4 tahun berselang, informan merasa dekat dengan masyarakat dengan cara mendengarkan aspirasi, memfasilitasi dan menjembatani kepentingan masyarakat selama menjadi wakil di Dewan.

Informan selalu terbuka menerima masukan dari segenap masyarakat di Dapilnya sehingga dalam acara-acara keagamaan, acara kemasyarakatan, acara-acara rutin yang diselenggarakan (misalnya oleh jemaah Fatayat, Muslimat, pengajian-pengajian) yang diikuti informan selalu banyak yang hadir. Informan merasa memiliki basis massa yang solid di daerah pemilihan. *Kedua*, informan menganggap pemindahan Dapil baginya semata karena ada yang merasa terancam dalam pemilihan. Setelah Putusan MK, sistem pemilihan dan penentuan kandidat pada tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan jumlah suara terbanyak, bukan lagi berdasarkan nomor urut. Nah, hal tersebut menjadi pemicu karena mungkin yang bersangkutan takut kalah dan merasa kurang populer di depan konstituen. Ironisnya, semua pengurus (yang semua laki-laki) setuju. Wawancara mendalam dengan informan 1 (pada 3 Januari 2018), dipahami bahwa pindah Dapil bukan hal yang mudah, bagi kandidat perempuan. Apalagi jika hal ini dilakukan

sepihak tanpa dikomunikasikan jauh waktu sebelum pelaksanaan pemilihan. Perempuan harus mulai dari nol, berkomunikasi dengan konstituen “baru”, memelihara konstituen, dan sebagainya.

Menjelang Pemilu 2014, kondisi perempuan berubah di “mata” partai politik. Ketentuan/ Peraturan KPU merubah perilaku partai. Bagi partai, kehadiran perempuan menjadi hal yang penting dalam konteks pentingnya melengkapi persyaratan, seolah partai memperlakukan perempuan sebatas objek kepentingan, yakni pemenuhan syarat yang diberlakukan oleh KPU. Regulasi yang ditetapkan KPU tentang pemberlakuan sanksi bagi partai yang tidak memenuhi sistem selang-seling sejak menjelang Pemilu 2014, cukup membuat partai kelabakan mencari kader perempuan. Kepentingan partai semata hanya untuk “melengkapi” persyaratan karena jika tidak, ini akan menjadi masalah bagi partai, bagi para calon laki-laki yang siap diajukan partai politik.

Gambaran deskripsi di atas, terjadi di Kabupaten Wonosobo yang memiliki jumlah keterwakilan perempuan terendah di Jawa Tengah. Berdasarkan *intervieu* mendalam dengan beberapa informan dari partai politik, diperoleh gambaran mengenai perjuangan perempuan dalam partai politik pada tahap-tahap rekrutmen Pemilu legislatif 2014.

Jadi, pada Pemilu 2014, suara terbanyak diraih oleh PKB, sedangkan PDIP memperoleh kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten. Namun, perempuan Caleg pada dua partai tersebut tidak bisa meraup suara terbanyak dalam meraih kursi untuk mewakili konstituen perempuan mereka. Sebenarnya dalam pelaksanaan program kerja, aktifis perempuan selalu terlibat aktif baik dalam aktifitas kepemudaan, maupun

lainnya misalnya perempuan diikutsertakan secara aktif dalam PPKB dalam pertemuan bulanan. Demikian, dalam proses penjaringan caleg dengan rekomendasi PAC dan DPC. Menjadi pengurus harian di PKB, bagi perempuan bukan perkara mudah, karena kebetulan perempuan yang aktif juga menjadi aktifis harian di lembaga lain, jadi aturan tidak boleh rangkap jabatan. Misalnya A (56) salah satu calon dari PKB, yang bersangkutan pengurus harian Fatayat. Kalau Fatayat yang dilepaskan, PKB tidak akan memperbolehkan. Apa jumlah perempuan aktif masih sangat minim? Kalau di PKB, memang jumlahnya minim, tapi kemampuannya, rata-rata. Rata-rata aktifis untuk perempuan di Wonosobo merangkap. Fenomena rekrutmen perempuan, tidak dapat dilepaskan dari adanya dominasi kekuasaan politik dengan sistem rekrutmen yang sangat genealogis (dinasti). Rata-rata organisasi selalu didominasi oleh karena keturunan. Jika tidak anak-anak juga dari keluarga kyai, dan tokoh-tokoh lain. Islam sangat mempengaruhi, informan juga menyatakan bahwa memang demikian. Putrinya kiai atau keluarganya kiai. Banyak perempuan yang ketika tidak memenuhi kuota, maka dengan sukarela mau "*njangkepi*" (melengkapi) untuk syarat.

PKB Wonosobo tidak pernah melibatkan yang bukan anggota PKB atau orang lain (yang sebelumnya bukan kader). Mereka biasanya yang telah lama menjadi kader partai dan aktif di partai. Yang bersangkutan aktifis perempuan sekaligus salah satu elite Fatayat di Kabupaten Wonosobo. Semua informan dari partai besar yang memangkan kursi di Wonosobo tahun 2014 ini mengamini bahwa keberadaan yang bersangkutan, kiprah dan pengabdiannya luar biasa di partai politik. Namun dalam proses selanjutnya, akan menjadi sulit bagi perempuan. Seperti yang dialami salah

seorang perempuan aktif di PKB ketika ia harus berjuang untuk meraih kursi di DPRD. Pada tahun 2014, I (seorang aktifis perempuan) mencalonkan diri sebagai legislatif. Awalnya, kehadirannya dalam partai diawali melalui kegiatan keagamaan dalam organisasi masyarakat.

Perjuangan calon perempuan dalam pemilu 2014 ini bisa menjadi gambaran betapa perempuan harus siap dan berjuang. Yang bersangkutan mencalonkan diri di daerah pemilihan (DP) Kalikajar, yang kalah dengan selisih 17 suara dengan calon legislatif lainnya. Banyak sekali terjadi pelemahan perempuan melalui kampanye terselubung yang memojokkan perempuan. Rival politik perempuan dalam kampanyenya selalu mengatakan, "*opo rika gelem dipimpin wong wedhok?*" (apa anda mau dipimpin oleh perempuan?) bahkan pesan-pesan ini juga disampaikan melalui kyai melalui pesan individual dan bahkan pengajian.

Konflik kepentingan masing-masing calon legislatif dalam partai politik seperti deskripsi di atas, tidak bisa dihindari oleh semua Caleg, termasuk perempuan. Jika dipahami hal ini terjadi karena para elite partai pun masing-masing berjuang untuk kemenangan mereka sendiri dalam arena pemilihan. Mereka saling mengamankan posisi masing-masing, bahkan jika perlu mereka saling berebut konstituen pada daerah pemilihan.

Fenomena di atas, menjelaskan bahwa banyak perempuan merasa diabaikan ketika menghadapi pemilihan, bahkan ketika sudah duduk pada kursi Dewan. Sering yang terjadi, putusan partai kurang memihak bagi mereka. Seperti yang dialami oleh informan 2;

> “Di Dewan, saya ini kelas 3 (baca: sudah tiga kali terpilih), tapi saya di fraksi hanya dijadikan sebagai anggota saja. Padahal, kalau ada tugas fraksi *ya* diserahkan saya. Sejak periode 2004-2009, saya yang disuruh membuat semua laporan administratif kalau dibutuhkan oleh fraksi. Tapi biar saja, yang menentukan sebagai ketua, dan pengurus lain di fraksi itu, partai. Mungkin karena saya perempuan atau mungkin karena saya tidak bisa *lobby*.”

Pengalaman perempuan rupanya tidak menjadi pertimbangan “lebih” untuk percayakan tugas partai kepada perempuan. Bahkan partai bisa saja mengambil keputusan yang “mengancam” posisi perempuan. Ini bisa benar-benar terjadi, termasuk pada Informan 3. Pada tahun 2011, informan mengundurkan diri dari tugasnya sebagai anggota dewan yang diusung salah satu partai besar, kemudian tahun 2014 infoman terpilih menjadi anggota dewan yang diusung partai lain. Menurut pengakuannya, ia banyak mengalami persoalan dalam intern partai yang ia nyatakan dalam wawancara mendalam sebagai “keputusan yang harus diambil agar selesai semua persoalan”.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan 1, informan 2 dan informan 3, mengenai apa yang mereka alami di partai politik berkenaan dengan proses rekrutmen dalam partai politik, diperoleh fakta bahwa perempuan dalam partai secara terbuka akan mengalami benturan kepentingan dengan orang-orang se-partai, atau mereka yang se-Dapil. Mereka yang tangguh saja yang mampu menghadapi, dan ini bisa dihitung dengan jari. Dari data yang diperoleh selama riset melalui informan-informan, perempuan dalam pusaran kepentingan di partai politik dirumuskan peneliti dalam dua pola sebagai berikut.

Gambar 4.2. Ilustrasi perempuan (ditarik) dalam pusaran kepentingan di partai politik

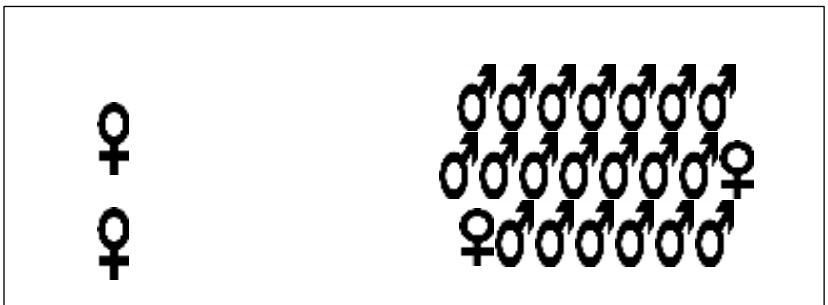

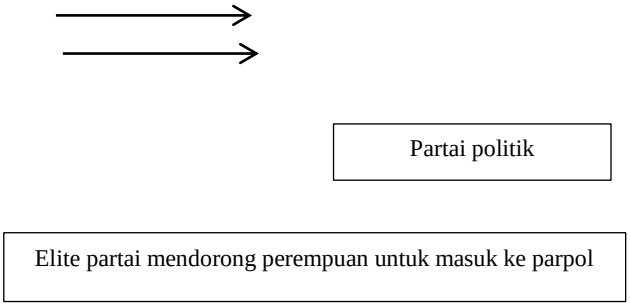

Sumber: data primer diolah (2018)

Deskripsi ilustrasi dalam gambar di atas, terlihat bahwa untuk kepentingan partai politik dalam upaya melangkapi kuota 30 persen dalam kepengurusan partai politik, beberapa perempuan dirangkul, di*support*, dilamar agar mau menjadi anggota atau sekaligus pengurus partai politik. Bagi beberapa diantara mereka juga diberikan tempat dalam kepengurusan partai. Perempuan dalam partai, selagi mereka "*manut, nurut*" maka mereka selalu "*katut*", artinya posisi mereka dalam partai akan aman tanpa pihak-pihak yang berupaya mengganggu kenyamanan dalam partai politik.

Bagi perempuan dengan model pasif begini, dianggap positif bagi pengurus yang lainnya. Biasanya disukai oleh kader lainnya, terutama elite partai, karena apapun yang diinginkan elite partai dianggap mereka sebagai perintah. Ada dua kelompok perempuan yang memiliki alasan pilihan *manut* dan *nurut*, yaitu karena dari awal mereka memang tidak menyukai politik dan mereka hanya memenuhi kriteria administratif saja dan kedua, mereka secara individual telah dipengaruhi patron.

Kondisi berbeda akan dialami oleh perempuan yang memiliki kemampuan unggul. Jika dikemudian hari perempuan ternyata berkembang dan tumbuh menjadi sosok yang handal berorganisasi, berkapabilitas, dan sebagainya maka tidak segan para

elite partai (laki-laki) berupaya mengeluarkan perempuan dari partai politik. Para elite partai yang nyaman dengan posisi mapan dalam partai (peneliti menyebut sebagai kelompok konservatif di partai) kiprah dan peran perempuan dalam partai politik selama ini sebagai hal yang tidak disukai. Elite yang termasuk golongan konservatif biasanya ada mulai dari tingkat PAC dan DPC. Mereka biasanya tidak berkenan, kalau perempuan banyak menuntut. Tidak mau memahami substansi Undang-undang. Perempuan yang berfikiran maju serta menghendaki ruang-ruang publik yang lebih besar untuk melaksanakan peran-peran mereka pasti akan dimusuhi. Terlebih pada perempuan yang sering membawa isu dan pemikiran feminis.

Kelompok konservatif merasa bahwa perempuan bisa mengancam keberadaan mereka karena perempuan lebih dekat dengan konstituen, perempuan lebih populer, perempuan lebih bisa diharapkan, dan sebagainya. Banyak cara yang mereka bisa lakukan, seperti yang terjadi pada informan 1, informan 2 dan informan 3 di atas. Perempuan akan digeser, dipinggirkan, bahkan dikeluarkan dari posisinya karena yang bersangkutan dinilai mempunyai pikiran yang terlalu maju. Perempuan dikeluarkan dari pusaran kepentingan dalam partai politik melalui pemindahan Dapil dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya, dikeluarkan dari kepengurusan partai, dihadapkan dengan aktifis perempuan lain dalam perebutan kepengurusan organisasi perempuan sayap partai politik atau dengan cara pemecatan perempuan sebagai anggota dan pengurus. Dalam partai politik perempuan harus mampu bertahan. Dorongan, tekanan laki-laki terhadap perempuan ini biasanya terjadi ketika mereka merasa tidak nyaman

dengan sosok perempuan. Sehingga jika ada yang harus disisihkan, biasanya perempuan menjadi pilihan pertama.

Beberapa kasus yang dialami oleh informan, perempuan seolah diadu dengan perempuan lain ketika berada dalam pusaran kepentingan politik dalam partai. Informan 2 misalnya, menjelang Pemilu 2009 informan merasa "pertarungan" memperebutkan jabatan Ketua Perempuan Bangsa, dipicu oleh adanya kelompok orang (kolega se-partai) yang merasa tidak nyaman di partai. Jalan yang mereka tempuh, dengan cara mengganti posisinya melalui pemilihan yang konstitusional. Ia merasa saingannya saat itu sebagai orang yang kehendaki kelompok yang ingin mengganti posisinya.

Dari uraian hasil penelitian di atas, terdapat dua posisi perempuan terhadap laki-laki dalam partai politik, yakni; perempuan diposisikan sejajar dengan laki-laki dalam partai politik, perempuan diposisikan tidak sejajar dengan laki-laki. Perbedaan ini tidak ditentukan berdasarkan partainya, namun berdasarkan realitas dalam partai yang dialami dan dibentuk oleh perempuan.

Gambar 4.3. Ilustrasi perempuan didorong keluar (dikeluarkan) dari pusaran kepentingan di partai politik

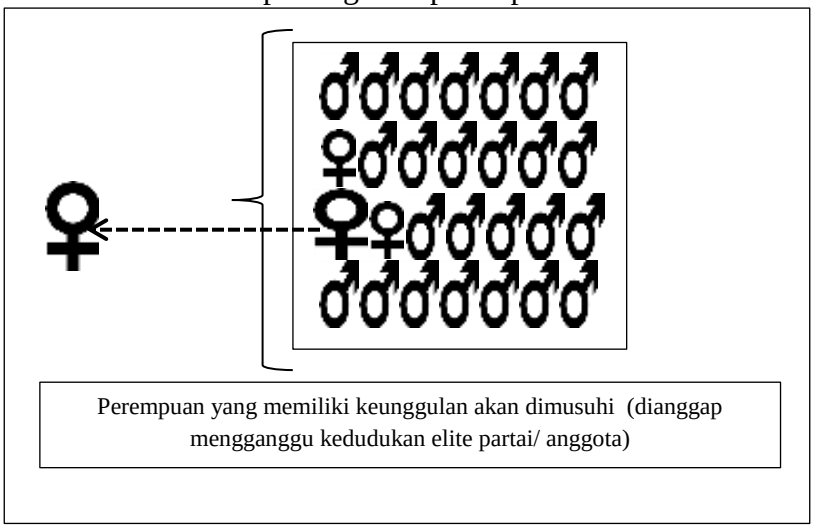

Sumber: data primer diolah (2018)

Pertama, perempuan sejajar dengan laki-laki bahkan lebih unggul dari dalam partai politik. Posisi dan kesempatan dalam partai politik kepada perempuan dalam proses rekrutmen legislatif sangat terbuka. Perempuan memperoleh nomor urut kecil (diurutan atas) ketika penetapan daftar urutan calon di partai politik. Hal ini memang tidak terjadi pada banyak perempuan, posisi perempuan dalam partai politik yang kuat yang dipengaruhi banyak hal yang mendukung. Keberadaan perempuan dalam partai sejajar dengan laki-laki karena beberapa faktor seperti; perempuan memiliki modal yang cukup; kapabilitas perempuan yakni perempuan kecakapan, kuat, berintegritas; senioritas perempuan dalam partai politik di mana ia berkiprah. Perempuan yang sudah lama aktif dalam partai politik, dengan kapabilitas dan loyalitas personalnya terhadap partai politik, biasanya akan dihormati dan dituakan dalam partai politik. Kemudian juga didorong oleh dukungan keluarga (suami, orang tua dan anggota keluarga lainnya) terhadap peran perempuan dalam partai politik.

Kedua, perempuan diposisikan tidak sejajar atau tersubordinasi di bawah laki-laki dalam partai politik. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, yang lebih pada alasan-alasan patriarki sebagai pembenarnya. Hasil wawancara dengan informan 4, perempuan berada pada dilema peran. Ada peran-peran yang mereka harus jalankan, yang para laki-laki dalam partai politik tidak bisa menjalankan. Perempuan identik dengan segala urusan domestik dalam rumah tangga mereka, sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga. Ketika mereka beraktifitas dalam dunia politik,

perempuan harus membagi waktu, tenaga, pikiran dan apa yang mereka miliki untuk menjalankan peran mereka di dalam partai politik. Ini tidak mudah bagi perempuan.

Perempuan dalam partai politik tidak bisa maksimal, oleh karena dilema pembagian peran tersebut, juga disebabkan oleh waktu beraktifitas dalam partai politik yang tidak terbatas. Ini disadari perempuan sebagai kekurangan mereka. Politik berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak lepas dari kebiasaan laki-laki di masyarakat. Oleh karena itu, tidak banyak jumlah perempuan yang termasuk elite partai politik. Sedikit perempuan yang berada pada posisi yang strategis dalam kepengurusan partai politik, salah satu akibatnya seringkali dalam pengambilan keputusan partai yang penting, perempuan bukan pengambil keputusan. Mereka hanya memberi pertimbangan, itupun jika diminta. Akibatnya, tidak banyak kebijakan partai politik yang responsif gender dan berpihak khusus pada kepentingan perempuan.

Indikator perempuan sejajar dengan laki-laki dalam partai politik, dapat dilihat dari penempatan perempuan dalam nomor urutan strategis dalam pemilihan calon legislatif. Proses penempatan perempuan dalam daerah pemilihan dan urutan nama calon dalam partai-partai ditetapkan dengan sepengetahuan perempuan. Walaupun pada kenyataannya, perempuan tidak berada pada nomor urutan satu. Perempuan menerima apapun yang diputuskan bersama dalam partai, yang biasanya nomor pertama akan diisi oleh ketua Dewan Pengurus Cabang atau ditingkat ranting, tentunya pengurus lain termasuk perempuan memahami posisi ini.

Perempuan dalam pengambilan keputusan penting tentang dirinya, harus selalu dibicarakan dengan keluarga, dengan suami jika mereka sudah berkeluarga. Ini

dilakukan agar menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jika terjadi segala sesuatu berkaitan dengan kiprah mereka dalam partai politik, keluarga tetap memberikan dukungan baik berupa modal maupun moral kepadanya. Perempuan terkendala untuk aktifitas partai yang dilaksanakan pada jam-jam malam. Perempuan harus menjaga diri mereka, agar tidak dianggap melanggar norma. Bahwa perempuan tidak lazim beraktifitas di malam hari, harus didampingi oleh keluarga jika ada agenda partai di malam hari, agar terhindar dari isu-isu yang tidak baik. Perempuan sering kali tertinggal atau ditinggal dalam urusan partai yang penting, dalam pengambilan keputusan partai, bahkan dalam penentuan nomor urut saat pemilihan legislatif yang mana kemenangan ditentukan berdasarkan nomor urut yang ditetapkan partai politik.

Banyak perempuan terlibat dalam partai-partai politik yang baru, pada awal-awal reformasi. Perempuan mulai masuk dalam dunia politik, seiring dengan terbukanya kran demokrasi. Perempuan mulai masuk dalam kepengurusan partai politik. Jumlah mereka semakin bertambah. Hasil penelitian mengungkap, perempuan masuk ke dunia politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Informan mengaku bahwa keterlibatan mereka dalam politik, karena banyaknya partai politik yang mulai tumbuh pada masa itu. Secara nasional, dorongan terhadap keterlibatan perempuan menguat, dan ini berimbas juga pada beberapa informan. Perempuan membuka diri, ketika partai-partai baru muncul dan menawarkan keterlibatan masyarakat. Selain itu beberapa perempuan masuk ke dunia politik, didorong oleh latar belakang keluarga yang sebelumnya telah aktif dalam dunia politik dan organisasi massa lainnya.

4.1.6. Analisis Perempuan dalam Struktur Arena dalam Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah

Perempuan dalam kehidupan politik berinteraksi dengan orang lain dalam ranah/ arena sosial yang di dalamnya terjadi interaksi, transaksi dan berlangsung berbagai peristiwa politik lainnya. Oleh Bourdieu arena ini diibaratkan sebagai *game* yang ada aturan, para pemain atau aktor/ agen dan pengetahuan. Disinilah perempuan diibaratkan sedang menjadi aktor dalam sebuah permainan, seperti halnya yang disebutkan oleh Bourdieu. Perempuan menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan atau menjalankan peran-peran mereka yang terhubung dengan habitus dan modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah perempuan di Jawa Tengah cenderung stabil yakni sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki dari waktu ke waktu. Seharusnya dengan jumlah yang lebih ini, perempuan secara kolektif mempunyai modal yang cukup dalam berpolitik. Namun, tentu saja tidak semudah membandingkan jumlah perempuan dengan jumlah keterwakilan mereka dalam politik, karena perempuan mengalami banyak hambatan. Kegagalan perempuan dalam proses rekrutmen legislatif, menjadi sebab dari rendahnya keterwakilan perempuan di Jawa Tengah. Perempuan menghadapi banyak keadaan yang menyudutkan, menjadi rintangan bagi mereka dalam dua fase rekrutmen legislatif, yakni rekrutmen di partai politik dan pada saat pemilihan oleh konstituen secara langsung.

Regulasi untuk afirmasi terhadap perempuan memang telah ditetapkan. Dinamika regulasi menuju pada peraturan perundangan yang lebih ramah pada

perempuan dan jaminan keberlanjutan serta peningkatan akses perempuan di lembaga legislatif dengan penetapan Undang-undang Pemilu juga telah mengalami perbaikan. Peraturan dibuat selama ini juga telah menunjukkan keberpihakan pada perempuan. Tapi, sulit bagi perempuan Jawa Tengah menembus arena rekrutmen legislatif, karena kuatnya barikade budaya patriarki, ditambah oleh partai politik dengan dominasi kelompok konservatif partai (terdiri dari laki-laki elite partai politik yang sudah lama menguasai partai dalam kepengurusan DPC dan PAC) yang masih setengah hati mengusung kepentingan perempuan dalam politik. Sebagaimana pendapat Lovenduski bahwa perempuan mengalami ketidakadilan berpolitik, disebabkan oleh faktor-faktor di luar perempuan atau struktur arena yang ada di sekitar perempuan, termasuk partai yang mempertahankan nilai-nilai maskulin.

Budaya patriarki dengan pembagian kerja laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik, sangat menghimpit perempuan. Diskursus diantara kaum feminis selama ini, bahwa budaya patriarki ini sangat mempengaruhi pola seleksi perempuan sebagai anggota legislatif di Indonesia. Penempatan perempuan dalam konstruksi patriarki ini membuat perempuan tidak bisa bebas bergerak dalam masyarakat. Di satu sisi, perempuan juga ragu dengan dirinya sendiri. Seperti halnya Durkheim menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika dalam masyarakat terjadi pembagian kerja, maka diawali dengan adanya perubahan dalam diri setiap individu melalui proses sosialisasi yang kemudian diinternalisasikan oleh lingkungan masyarakat tempat masing-masing individu dibesarkan. Akhirnya, tumbuh pelebelan

atau stereotif-stereotif yang membedakan antara masing-masing individu, tidak terkecuali laki-laki dan perempuan.

Pengalaman perempuan dalam berpolitik dan interaksi mereka dengan pihak lain, terbentuk dan dibentuk dalam proses sosial. Proses ini dipengaruhi oleh budaya dalam masyarakat, kondisi sosial masyarakat, bahkan oleh regulasi yang ditetapkan, khususnya yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik. Semua itu membentuk persepsi, pengetahuan dan pikiran perempuan yang bertahan lama disepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan mereka. Pengalaman mental perempuan dari kondisi-kondisi objektif, diperoleh oleh perempuan saat hadapi dari peristiwa-peristiwa dalam dunia politik. Pengalaman dan pengetahuan perempuan memberi pengaruh terhadap perilaku mereka. Sebaliknya, pengetahuan diperoleh dari tindakan, pengalaman-pengalaman fisik perempuan dan manipulasi lingkungan.

Tidak semua perempuan menerima himpitan patriarki dengan sikap menyerah dan diam begitu saja dalam politik, dan tidak semua perempuan mengalami kegagalan dalam arena politik mereka. Sebagian perempuan di JawaTengah, berhasil melewati dan memenangkan arena rekrutmen legislatif. Dengan arena yang sama, regulasi yang sama, mereka bahkan berhasil mengulang kemenangan dalam rekrutmen legislatif sampai tiga kali periode pelaksanaan Pemilu. Walaupun ketujuh informan penelitian mengalami dinamika; regulasi, perubahan penetapan daerah pemilihan dalam Pemilu, pergantian partai politik, dan perubahan lembaga perwakilan.

Kultur patriarki yang mencengkeram perempuan berpolitik di Jawa Tengah disadari oleh perempuan telah memberi batasan. Namun, tidak bisa juga perempuan

mendobrak secara revolutif atau menentang secara frontal nilai-nilai maskulin yang telah ada dan mengakar dalam masyarakat. Ketika ada penolakan yang keras dan tajam pada perempuan, yang terjadi malah perempuan akan dianggap *a sosial* oleh masyarakat. Akibatnya akan fatal, perempuan tidak akan didukung oleh keluarganya, bahkan oleh masyarakatnya. Perempuan mengambil jalan tengah, perempuan menempatkan dirinya sebagai sosok yang bisa diterima oleh masyarakat dengan tatap menjalankan peran-peran keperempuanannya sekaligus melakukan peran-peran dalam dunia politik di hadapan publik dengan baik.

Perempuan di Jawa Tengah tidak selalu berasumsi negatif terhadap budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Bahkan bagi mereka, peran-peran mereka dalam konstruksi patriarki dikemas secara apik sebagai modal diri, performan bagi mereka untuk menarik dukungan masyarakat. Ketika perempuan tidak memiliki persoalan dengan peran-peran domestik mereka, masyarakat akan lebih simpatik, menganggap perempuan lebih terhormat dan dianggap bisa menjadi sosok ideal yang diharapkan oleh masyarakat, konstituen mereka dalam pemilihan politik.

Demikianlah, seolah ada tahap-tahapan perempuan bisa sukses dalam dunia politik. Tahap pertama, perempuan akan aman dalam dunia politik, ketika mereka diijinkan oleh keluarga. mendapat ijin suami/ bapak, pilihan politik keluarga, harus ada dorongan dan modal keluarga, mengurus rumah tangga dengan baik. Jika keluarga mengijinkan, pada tahap berikutnya perempuan diterima masyarakat bila mereka dianggap bias menjalankan tugas-tugas domestik mereka, menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, bias mendidik anak-anaknya dengan baik, dan beberapa

penilaian yang sering “jauh” dari persoalan kapabilitas berpolitik. Tidak berhenti sampai di sini saja, perempuan berpolitik juga harus mampu menghadapi tekanan yang bersumber dari agama/ kepercayaan masyarakat, partai politik yang maskulin, dan mereka harus memenangkan suara konstituen.

Dari partai politik, perempuan tidak hanya mendapatkan tekanan dari partai politik yang maskulin saja, namun sesungguhnya lebih dari itu. Melalui dukungan, bahkan tekanan dan rintangan dari partai politik, elite partai politik, perempuan menjadi lebih kuat dan lebih berpengalaman melihat realitas politik mereka. Perempuan lebih memahami arena tempat mereka berjuang, lebih adaptif dan lentur dalam arena politiknya walaupun seringkali ini muncul karena tekanan, rintangan dari partai politik atau elite partai itu sendiri.

Partai politik juga sangat mempengaruhi perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Selain memberi tempat, sebagai media berjuang perempuan dalam berpolitik, partai politik juga memberi pembelajaran awal bagi perempuan bagaimana berpikir, bersikap, berperilaku politik. Perempuan menjadi berpengalaman berhadapan dengan realitas politik di arenanya. Perempuan di Jawa Tengah, dalam proses rekrutmen partai politik mengalami beberapa fase tahapan. *Pertama*, tahap penawaran. Penawaran ini, bisa dari partai politik maupun dari perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan akan direkrut oleh partai politik, dengan penawaran. Ani Sutjipto, berpendapat bahwa tahap ini adalah tahap penjaringan. Di sisi yang lain, ada juga perempuan yang mengajukan diri ke partai politik untuk “hadir” dalam proses rekrutmen legislatif. Pada kasus partai politik menawarkan kepada perempuan, lebih

intens dilakukan oleh partai politik karena adanya regulasi yang semakin mengharuskan partai politik untuk lebih banyak melibatkan perempuan sebagai tindakan afirmatif.

Tahap kedua adalah proses pemenuhan aplikasi (pengisian form pendaftaran bakal calon). Pada tahap ini, perempuan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, peraturan partai politik, bahkan kadang perempuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh elite-elite partai. Perempuan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh partai politik, sangat didorong untuk serius pada tahapan ini. Perempuan dirangkul, dipandu, diarahkan untuk mengikuti tahapan ini dengan sukses. Partai politik, pada tahapan ini menetapkan daerah pemilihan dan siapa saja yang menjadi bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Pada beberapa kasus, perempuan merasa diutamakan oleh partai politik dalam pencalonan diri mereka, namun tidak jarang beberapa diantara perempuan merasa tidak diabaikan. Sampai dengan, nama perempuan didaftarkan ke penyelenggara pemilu (KPU).

Tahap *ketiga* adalah tahap penetapan. Penetapan calon legislatif dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU). Dari tahapan ini, perempuan mulai secara intens mempersiapkan diri untuk mulai maju dalam arena politik yang lebih luas dan modal yang lebih banyak. Perempuan berhadapan dengan masyarakat, dan pada penyelenggaraan Pemilu 2009, Pemilu 2014, 2019 perempuan harus berhadapan dan bekerja keras di depan massa calon konstituennya yang mereka lakukan dengan kampanye, dan lain-lain agenda bersama massa.

Keempat, tahapan pemilihan. Pada tahap ini, perempuan dipilih atau tidak dipilih oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih di daerah pemilihannya. Perempuan harus mampu memenangkan, dan merebut hati para konstituennya. Disini, banyak hal yang harus dimiliki oleh perempuan termasuk modal. Perempuan harus dikenal oleh pemilih di daerah pemilihannya. Jika tidak, tentu bukan hal yang mudah bagi mereka. Di bawah ini, tahap atau level yang harus dilalui perempuan dalam berpolitik di Jawa Tengah, sehingga ia bisa sukses dalam tahapan rekrutmen politik, sebagai berikut.

Gambar 4.4. Level/ Tahap berikutnya yang harus dilalui perempuan berpolitik

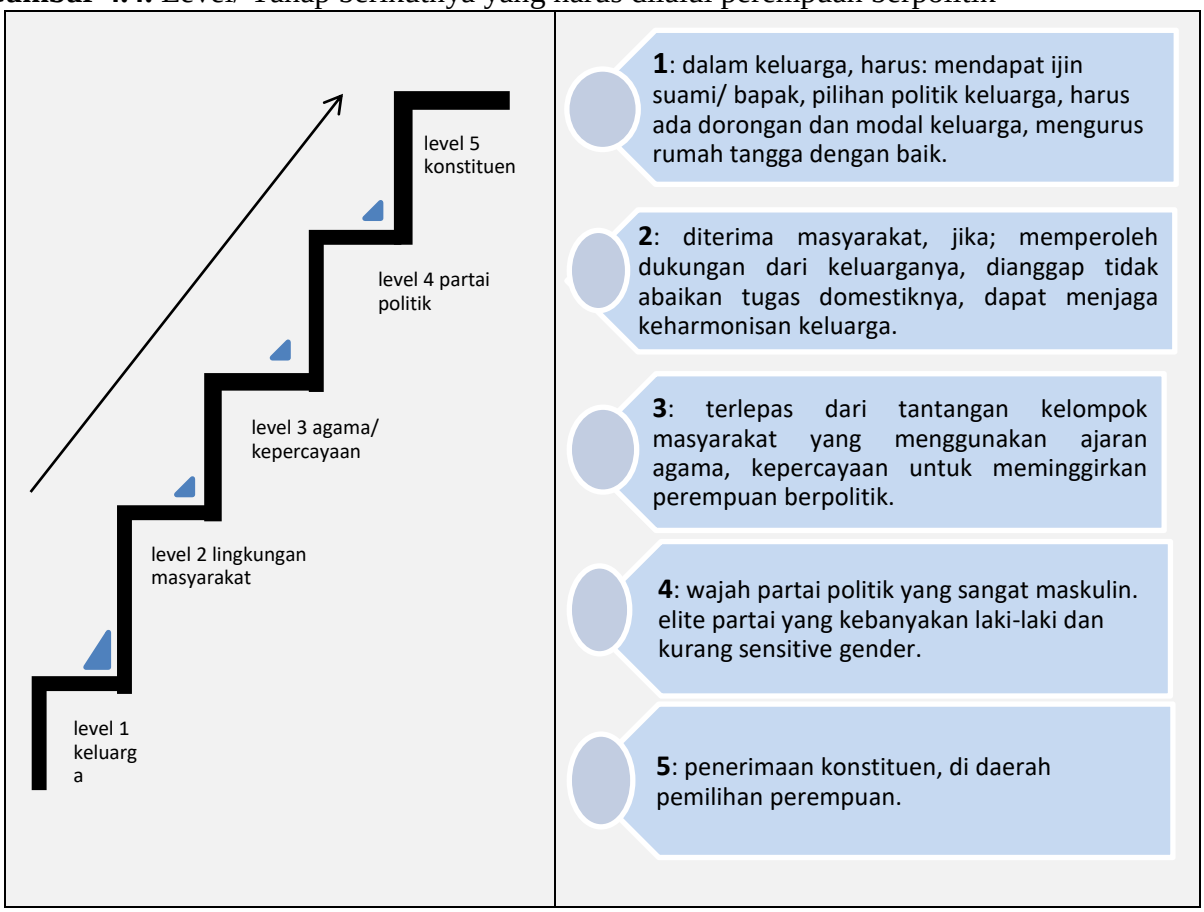

Sumber: data primer diolah (2018)

Selain budaya patriarki, dalam perjuangannya pada rekrutmen legislatif di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur keberadaan perempuan dalam politik. Regulasi sangat berperan dalam perjuangan perempuan pada arena politik, khususnya dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah dari waktu ke waktu. Perempuan sangat terbantu oleh regulasi afirmasi yang telah ditetapkan. Regulasi memberi ruang dan kesempatan bagi perempuan berpolitik di Jawa Tengah.

Regulasi afirmatif, ditetapkan untuk membantu terwujudnya kesetaraan. Seperti telah dinyatakan oleh Lovenduski dan Karam (2002: 159), bahwa alternatif-alternatif untuk mewujudkan kesetaraan, diantaranya dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, di bidang institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah kepada perempuan melalui langkah-langkah yang dapat menunjukkan kepedulian gender dan menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah kepada perempuan. *Kedua*, terkait dengan representasi perempuan, yang berarti, adanya jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke lembaga perwakilan dengan cara mendorong, mendukung kandidat-kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen, mengubah Undang-undang Pemilu dan Kampanye, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.

Ketiga adalah memberikan dampak atau pengaruh terhadap keluaran (*output*). Hal tersebut berkaitan dengan segala upaya melakukan “feminisasi” legislasi dengan memastikan bahwa semua perundang-undangan atau semua produk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan (*gender sensitive*). *Keempat*, mengubah wacana dengan

menjadikan prespektif perempuan dalam perdebatan di parlemen sebagai satu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Namun demikian, apa yang telah dimaksudkan oleh Lovenduski masih jauh dari harapan, khususnya yang berkaitan dengan representasi kehadiran perempuan dan dampak yang dihasilkan oleh perempuan masih jauh kurang terukur dalam arena patriarki yang sangat lekat.

Kemampuan perempuan beradaptasi dengan arenanya sangat tergantung pada perempuan itu sendiri. Pengetahuan, pengalaman informan perempuan di dunia politik berbeda satu sama lainnya, bervariasi tergantung dimana mereka tumbuh dan dibesarkan oleh dunia politiknya, oleh partai-partai yang membesarkannya masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, hal ini tidak akan tetap atau tidak permanen dan dapat berubah di bawah situasi yang tidak terduga. Selain itu, relasi dialektika yang melibatkan unsur subjektif seperti mental individual perempuan, struktur pengalaman perempuan dan struktur kognitif yang nantinya masuk dalam ranah habitus perempuan. Habitus perempuan selalu didahului oleh kognitifnya, pengetahuan seseorang memahami suatu objek tertentu yang dipengaruhi oleh banyak hal di sekitar mereka. Mereka yang lahir dari keluarga politisi, lebih adaptif dengan berbagai tekanan terhadapnya. Selain karena dukungan keluarga, juga karena secara personal perempuan sangat familier dengan berbagai persoalan dalam politik.

Dari uraian hasil penelitian, terungkap bahwa terbentuknya persepsi/ struktur kognitif seorang agen perempuan tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki dan agama yang dianut oleh masyarakat. Bahkan oleh beberapa perempuan yang masuk dalam arena legislatif di Jawa Tengah dijelaskan bahwa nilai-nilai maskulin yang

sangat kuat dalam masyarakat patriarkhi inilah, yang menjadi faktor utama ketidakberanian perempuan memasuki arena rekrutmen legislatif selama ini.

Tekanan masyarakat, terutama serangan para lawan politik yang merasa terancam dengan keberadaan calon perempuan sangat luar biasa. Belum lagi ditambah dengan tekanan-tekanan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dimanfaatkan untuk memojokkan perempuan. Temuan fenomena ini, seiring dengan yang diulas Tripp dan Kang (2008), bahwa budaya patriarki yang didukung faktor keagamaan dan kultural, sering digunakan untuk menentukan tingkat representasi perempuan dan hal ini sering diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya keterwakilan perempuan. Asumsi feminisme tentang ideologi patriarki adalah negatif, dimana ideologi ini telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yaitu di bawah laki-laki (Fakih, et.al., 2000: 209).

Demikianlah, dalam arena berlangsung perjuangan-perjuangan perempuan untuk memperoleh posisi dalam proses rekrutmen legislatif. Dalam riset ini diposisikan sebagai ranah kekuatan perempuan yang dinamis dengan beragam potensi beserta semua rintangannya. Seperti halnya yang dijelaskan Bourdieu bahwa arena atau ranah ini sebagai kekuatan yang secara parsial bersifat otonom dengan perjuangan mempertahankan kekuatan (Bourdieu dalam Harker, Mahar dan Wilkes (ed), 2009: 10). Arena ini didefinisikan sebagai sistem relasi objektif kekuasaan yang terdapat di antara posisi sosial yang berkorespondensi dengan sistem relasi objektif yang mempengaruhi habitus yang terdapat pada setiap individu di dalamnya.

Temuan hasil penelitian mengenai arena rekrutmen legislatif di atas, tidak sepenuhnya sama dengan gambaran analogi arena menurut Bourdieu. Berdasarkan hasil penelitian, tidak selamanya ditemukan dalam ranah atau arena sebagai tempat pertarungan memperebutkan akses dan kekuasaan saja, karena dalam ranah/ arena rekrutmen legislatif di Jawa Tengah ada juga ditemukan komitmen (misalnya regulasi *affirmative action* untuk perempuan yang selama ini semakin menuju ke arah upaya peningkatan keterwakilan perempuan). Selain itu, tidak semua perempuan berpolitik di Jawa Tengah, terutama mereka yang berpolitik dengan setengah hati (hanya memenuhi kebutuhan partai politik), menganggap arena sebagai tempat pertarungan. Ranah/ arena yang digambarkan oleh Bourdieu dengan latar belakang hidupnya di dunia Barat, tidak selamanya ditemukan dalam penelitian. Karena secara eksplisit Bourdieu tidak pernah menghadirkan ranah politik itu sendiri pada beberapa tulisannya.

4.2. Perempuan sebagai Agen dalam Arena Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah

Pada bagian di atas, dideskripsikan mengenai arena yang dihadapi perempuan, telah menempatkan posisi dan peran perempuan Jawa Tengah yang lebih utama pada ranah domestik dibandingkan dengan kedudukan mereka di ranah politik. Publik kurang memberikan dukungan terhadap eksistensi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, personifikasi perempuan sebagai individu yang memiliki kapabilitas, sangat diperlukan dalam keterlibatan mereka pada proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Seperti halnya Bourdieu menjelaskan, bahwa agen bukan sosok yang menjadi objek

dalam realitas sosial, melainkan sosok yang mempunyai kapasitas, bebas menentukan sikap mereka dalam ranah.

Perjuangan perempuan untuk mengakses kekuasaan politik, tidak lepas dari citra diri, habitus, kebiasaan-kebiasaan mereka yang terbentuk karena pengetahuan, pengalaman yang telah dialami perempuan melalui proses dialektika. Proses yang diikuti perempuan dalam kehidupan politik masyarakat Jawa Tengah secara alami, melalui proses sosial dalam waktu yang lama, terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri mereka yang menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya.

Beberapa informan menjelaskan dalam wawancara, bahwa tuduhan sering dilontarkan kepada mereka, bahwa perempuan sudah diberi kesempatan selama ini, sudah diberi *affirmative action* yang dilindungi dalam ketetapan perundangan, tapi perempuan malah tidak dapat menggunakan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam mengisi ruang yang sudah disediakan oleh konstitusi, biasanya menyalahkan faktor-faktor yang berasal dari perempuan itu sendiri, tentang kapasitas, kapabilitas, daya juang perempuan dalam rekrutmen politik. Melacak secara mendalam mengapa fenomena itu terjadi pada mereka.

Pengalaman-pengalaman perempuan yang sukses melewati proses rekrutmen politik di Jawa Tengah dideskripsikan, terdiri dari terbentuknya struktur kognitif dari tujuh orang perempuan yang berhasil memenangkan pertarungan dalam rekrutmen legislatif selama tiga periode Pemilu berturut-turut atau lebih. Menelusur faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kognitif perempuan serta pilihan-pilihan tindakan

perempuan untuk memberi gambaran kontribusi habitus perempuan terhadap keberhasilan mereka dalam arena rekrutmen politik selama ini.

4.2.1. Terbentuknya Struktur Kognitif dan Mental Perempuan

Pengalaman perempuan sangat berpengaruh dalam pembentukan kognitif mereka. Pengalaman merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan dunia mereka, dengan lingkungan mereka. Pengalaman dapat muncul dari proses interaksi sosial menjadi aspek perkembangan kognitif individu yang berasal dari pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungan-hubungan mereka dengan lingkungan sosial. Aktifitas fisik perempuan juga memberi pengaruh terhadap kognitif perempuan. Setiap saat, ketika perempuan dalam segala aktifitas fisik dan interaksi dengan lingkungannya, perempuan akan mengeksplorasi dan menyesuaikan diri sehingga perkembangan kognitifnya. Seorang perempuan akan belajar dari pengetahuan yang disediakan oleh budaya dalam masyarakat. Perempuan akan mengalami proses ekuilibrasi, yakni adanya kemampuan atau sistem yang dapat mengatur diri perempuan agar ia dapat mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Penyeimbangan yang dilakukan secara berulang, kemudian memproses informasi baru yang ia peroleh untuk dicek dengan informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

Proses persepsi pada diri informan perempuan, akan didahului dengan adanya proses pengindraan. Semua hal yang muncul karena adanya objek yang berpeluang menimbulkan stimulus dan rangsang indra perempuan. Segala sesuatu yang tampak,

terjadi di sekeliling mereka dan dapat ditangkap melalui indra. Pada proses ini, tubuh akan menerima rangsang, mengolah dan kemudian menjadi persepsi terhadap suatu objek. Contoh yang dapat peneliti uraikan untuk mendiskripsikan tentang persepsi yang terbentuk pada perempuan dalam arena politik, misalnya persepsi perempuan mengenai politik itu dunia yang keras dan kejam. Persepsi ini terbentuk dari tahapan dimana kognisi perempuan terbentuk karena dalam aktifitas politik, pada saat mereka bertemu dengan orang-orang atau kelompok yang memiliki kepentingan, misalnya. Perempuan akan "berhadapan" dengan orang atau kelompok yang demi mendapatkan kepentingannya, mereka akan saling menyerang, saling bermusuhan demi kekuasaan, dan sebagainya.

Ketika perempuan mengalami dominasi politik dari lawan politiknya, perempuan mengalami tahapan awal menerima rangsang. Tahapan berikutnya, stimulus yang diterima oleh indera perempuan seperti ujaran kebencian terhadapnya, kampanye hitam, dominasi verbal (ini kecenderungan yang sering terjadi) yang dialaminya, diilanjutkan oleh syaraf sensori perempuan ke otak. Selanjutnya data diolah, yang secara alamiah mendorong perempuan untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang telah dialaminya tentang *statement* politik yang penuh dominasi ditangkap, membentuk informasi yang telah diterima. Dalam melakukan interpretasi itu, pengalaman-pengalaman serta sistem nilai yang dimiliki perempuan sangat memberi kontribusi dalam pembentukan persepsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan perempuan diperoleh data bahwa struktur kognitif perempuan dipengaruhi oleh; *faktor intern* dari diri perempuan itu

sendiri, yakni hasil rangsang indra yang diolah diri mereka, pengalaman yang kemudian menimbulkan persepsi-persepsi. Faktor yang ada pada diri perempuan ini disebut sebagai faktor bawaan. Disini dipahami tentang proses kognisi yang berjalan karena adanya pengaruh dari otak sebagai pengendalinya. Kedua adalah *faktor ekstern* yang berasal dari keluarga, masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Kognisi, persepsi muncul dan terbentuk karena adanya informasi dari luar tubuh perempuan serta pengalaman dari orang lain. Kedua faktor tersebut menghasilkan pola-pola tindakan perempuan.

Bahasa verbal para informan penelitian selama wawancara mendalam dilakukan, menunjukkan cara pandang perempuan memaknai kegiatan berpolitik bahwa perempuan sudah "kebal", terbiasa dan mampu mengantisipasi adanya pengaruh budaya patriarki yang sangat kuat dalam masyarakat. Konstruksi sosial yang tumbuh dalam masyarakat Jawa Tengah terhadap perempuan, baik sadar maupun tidak disadari merembes dan mempengaruhi pola interaksi perempuan dalam masyarakat, keterlibatannya dalam dunia politik, serta mempengaruhi cara berfikir, cara pandang, pengetahuan mereka mengenai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan perempuan, terungkap mengenai kuatnya budaya patriarki mempengaruhi persepsi, dan pengetahuan perempuan dalam berpolitik selain faktor yang lainnya. Persepsi ini umum dimiliki oleh perempuan Jawa Tengah karena sudah sangat akut mengkonstruksi dan menempatkan posisi perempuan berpolitik. Seperti telah ditulis peneliti pada Bab sebelumnya, bahwa perempuan saat ini di Jawa Tengah tidak mengalami persoalan

ketika menekuni bidang lain dalam masyarakat dengan indikator misalnya tingkat pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan dan sebagainya. Sebaliknya, di dunia politik perempuan menghadapi persoalan konstruksi yang demikian.

Gambar 4.5. Ilustrasi faktor yang mempengaruhi struktur kognitif perempuan

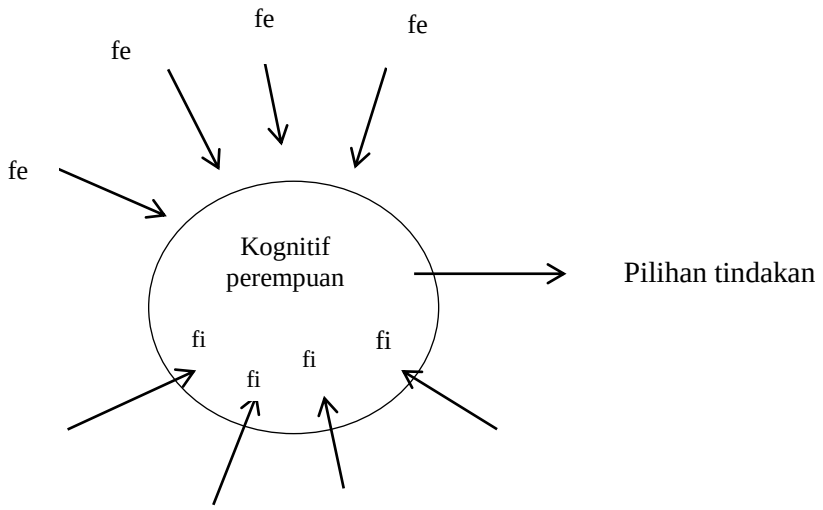

Sumber: diolah dari data primer
Keterangan: fe = faktor ekstern (di luar)
fi = faktor intern (dari diri individu)

Budaya patrarkhi memberi pengaruh terhadap perempuan, dapat ungkap dari hasil wawancara yang menunjukkan pemahaman perempuan, bahwa mereka ketika berpolitik akan menghadapi rintangan-rintangan yang lebih berat dibandingkan laki-laki karena konstruksi; (1) perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, (2) mereka bukan orang yang tepat dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan publik, (3) keterwakilan perempuan sama makna dan artinya dengan keterwakilan laki-laki, dan (4) perempuan tidak bisa maksimal aktif dalam partai politik dan tuduhan bahwa jika perempuan aktif dalam politik maka mereka akan melupakan peran domestik mereka.

Perempuan tidak boleh jadi pemimpin. *Statemen* ini sering menjadi bahasa penolakan terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Jawa Tengah, khususnya bagi perempuan yang sedang atau akan mencalonkan diri dalam proses rekrutmen legislatif. Rintangan yang dialami perempuan, selalu berkisar pada kalimat pernyataan menyudutkan seperti tersebut. Bagi para laki-laki yang juga memiliki kepentingan yang sama dengan perempuan, biasanya di Jawa Tengah hal ini menjadi alat kampanye dan propaganda untuk menjauhkan perempuan dari dunia politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, misalnya terungkap kalimat-kalimat yang memojokkan perempuan yang bernada seperti itu sering sekali digunakan untuk menyerang perempuan yang akan mencalonkan diri, atau yang sedang mencalonkan diri dalam arena rekrutmen legislatif. Berdasarkan pengalamannya, Informan 1 menjelaskan;

> "Sudah biasa disetiap waktu-waktu kampanye, kalimat perempuan tidak boleh memimpin, selalu diucapkan oleh mereka yang ingin mengalahkan saya dalam pemilihan. Apalagi, saya masih ingat betul pada saat saya pertama kali maju dalam Pemilu tahun 2004."

Informan 2 juga mengalami hal yang sama, informan sering mendapat laporan dari para relawan dan tim sukses/ tim kemenangannya mengenai kampanye lawan politiknya (biasanya laki-laki) yang sering menyerang bahwa perempuan, tidak dapat memimpin menurut agama. Perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat, demikian juga dalam dunia politik perempuan tidak bisa dijadikan pemimpin umat. Tidak jarang, calon laki-laki (lawan politik) khususnya yang memiliki kepentingan yang sama dengan perempuan karena se-daerah pemilihan memanfaatkan alim ulama, tokoh agama sebagai tim kemenangan calon mereka, untuk menyampaikan pesan-pesan

dalam dakwah, pengajian di majelis taklim untuk tidak memilih perempuan. Akibatnya, dalam masyarakat terbentuk keengganan mereka untuk dipimpin oleh seorang perempuan, bahkan perempuanpun enggan dipimpin oleh perempuan.

Kampanye demikian menurut informan 2, sangat efektif dilakukan di masyarakat desa sampai saat ini. Serangan-serangan dengan menggunakan dalil-dalil dalam Al-Qur'an ini, bagi para perempuan pemula yang masih awam dan belum berpengalaman dalam arena rekrutmen politik (yang pertama kalinya mencalonkan diri sebagai legislatif) menjadi persoalan. Yang terjadi, perempuan kemudian takut, pesimis di depan konstituen walaupun regulasi telah memberi perlindungan terhadap keberadaan mereka di arena pemilihan. Padahal, suara konstituen sangat menentukan kemenangan perempuan dalam pemilihan legislatif.

Diciptakan persepsi, seolah-olah kalau perempuan masuk dalam dunia politik, mendaftarkan diri dalam kepengurusan partai politik itu akan mengganggu tugas mereka sebagai istri bagi suaminya dalam keluarga, mengganggu urusan domestik mereka. Perempuan yang terlibat dalam rekrutmen legislatif itu, salah menurut ajaran agama dan tidak etis sosial. Dengan begitu, konstituen akan enggan memilih perempuan dengan alasan tidak mau melanggar ajaran agama dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat. Ada dua bentuk respon perempuan terhadap bentuk ujaran demikian, yakni perempuan mencari solusi jawaban atas kampanye demikian dan kedua, perempuan memiliki keengganan untuk masuk ke dalam proses rekrutmen politik.

Pada masyarakat terkonstruksi bahwa perempuan lemah, tidak terbiasa dengan urusan publik. Perempuan bukan orang yang tepat dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan publik. Konstruksi mengenai perempuan itu lemah, menyebabkan mereka sendiri sering canggung dan menganggap bahwa dirinya tidak cukup kuat menjalankan kekuasaan. Ketika menjalankan kekuasaan baik dalam organisasi masyarakat, partai politik maupun dalam kelompok tertentu, perempuan seringkali tidak terlalu ingin memperlihatkan bahwa mereka ingin melangkahi apa yang seharusnya "hak dan milik" laki-laki, perempuan biasanya tidak mau dianggap *kemanjon*, *keminter* (terlalu maju, merasa pintar sendiri). Kalau sudah demikian, dampak yang terjadi terhadap perempuan aktifis politik, sangat dirasakan. Kebanyakan perempuan akan mengambil sikap sangat hati-hati dalam melangkah, minder, tidak nyaman bahkan takut.

Stereotif untuk perempuan tersebut terbentuk karena budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Peran perempuan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah domestik, rumah tangga apalagi dalam urusan publik. Dalam keluarga, laki-lakilah yang memegang peran di publik, termasuk pengambilan keputusan-keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat. Karena kebiasaan dan nilai-nilai yang dipahami ini, kemudian perempuan dianggap tidak cakap dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam politik. Mengapa demikian? dalam masyarakat, perempuan cenderung dipandang sebagai sosok yang perasa, yang lebih sering menggunakan perasaan dibandingkan logika. Perempuan memiliki rasa minder, kurang

percaya diri dalam interaksi sosial dan masyarakat. Namun demikian, tidak semua keluarga menerapkan nilai-nilai patriarki yang demikian secara kaku. Artinya, tidak semua perempuan dalam keluarga diperlakukan sebagai sosok yang tidak mandiri sehingga mereka harus bergantung pada anggota keluarga lain dalam setiap peristiwa dan ketika mereka menyelesaikan persoalan. Informan 1 memaparkan, hal-hal yang berkaitan dengan kiprahnya di politik, tidak semua ia sampaikan ke keluarga. Walaupun untuk menjaga harmoni dalam keluarga, sesekali hal tersebut disampaikan.

Keterwakilan perempuan sama makna dan artinya dengan keterwakilan laki-laki. Persepsi ini yang mengakibatkan pandangan bahwa pemilih perempuan tidak harus diwakili oleh perempuan karena laki-lakipun bisa mewakili mereka pada ranah-ranah publik. Konstruksi ini terbangun pada masyarakat patriarki, karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan perempuan bisa diwakili oleh laki-laki. Seperti halnya dalam keluarga, laki-laki sebagai kepala keluarga dipercaya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga, yang kemudian dipercaya hal ini juga terjadi dalam politik.

Hal di atas, mengaburkan usaha-usaha untuk melibatkan perempuan dalam ranah politik khususnya dalam proses rekrutmen politik. Pandangan masyarakat patriarki tetap melihat bahwa laki-laki lebih cakap dibanding perempuan. Masyarakat masih menganggap bahwa banyak masalah jika perempuan yang mewakili mereka sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi perempuan agar mereka diwakili oleh perempuan juga. Sama kepentingan antara laki-laki dan perempuan, jika mereka mewakili masyarakat. Lebih banyak sosok calon laki-laki yang dapat menjadi alternatif pilihan dibandingkan

dengan perempuan. Masyarakat pemilih perempuan dalam budaya patriarki masih belum mempunyai kepekaan terhadap kepentingan-kepentingan perempuan dalam kebijakan.

Perempuan tidak bisa maksimal aktif dalam partai politik, dan lembaga perwakilan. Masyarakat patriarki menganggap bahwa perempuan tidak bisa maksimal aktif dalam partai politik dan tuduhan, jika perempuan aktif dalam politik maka mereka akan melupakan peran domestik mereka. Pandangan patriarki, melihat pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki berkenaan dengan ranah publik untuk laki-laki dan ranah privat selalu untuk perempuan dalam masyarakat Jawa Tengah yang ada memberikan tuduhan bahwa jika perempuan aktif dalam politik akan melupakan peran domestik mereka, cukup membelenggu persepsi perempuan. Informan 1 menjelaskan, jika tidak terjadi saling pengertian antara perempuan dan anggota keluarganya tentu ini hal yang sulit bagi perempuan. Apalagi, bagi perempuan akan muncul perasaan selalu merasa bersalah jika mereka tidak melaksanakan tugas domestik mereka. Anggota keluarga juga akan menganggap apa yang dilakukan perempuan salah karena telah mengabaikan tugas domestik, bahkan bisa jadi pada tahap berikutnya keluarga akan melarang perempuan untuk aktif dalam partai politik.

Selain budaya masyarakat patriarki, keluarga memberi kontribusi pada terbentuknya *mindset* perempuan dalam berpolitik, khususnya dalam rekrutmen legislatif. Preferensi politik keluarga sangat mempengaruhi perempuan, demikian pernyataan yang dapat peneliti simpulkan dari beberapa informan perempuan berdasarkan pengalaman hidupnya. Ideologi dan nilai-nilai yang dipahami dan

dipegang teguh oleh perempuan saat ini, bisa saja mereka peroleh dari keluarga. Misalnya nilai-nilai berdemokrasi, kesamaan dan kesetaraan gender, ideologi yang diyakini, serta pengetahuan-pengetahuan berorganisasi dan berpolitik perempuan. Perempuan yang lahir dari keluarga yang aktif dalam politik, organisasi massa atau organisasi yang berbasis keagamaan akan cenderung lebih terbuka pola interaksinya dengan masyarakat luas.

Tidak dipungkiri oleh para informan bahwa di tengah masyarakat patriarki, perempuan sangat membutuhkan dukungan dari keluarga mereka ketika maju dalam berpolitik. Dukungan orang terdekat, keluarga, lingkungan terdekatlah yang mendorong keberanian perempuan masuk dalam kancah politik untuk pertama kalinya. Perempuan berkecimpung dalam politik sejak dini, keluarga memberi pengaruh dan "tempat" bagi mereka secara tidak langsung. Pengalaman dan dukungan keluarga yang mendorong perempuan untuk masuk dalam organisasi. Dari keluarga, informan mengerti cara berkomunikasi dan berorganisasi. Sampai dengan dorongan kepadanya untuk masuk dalam partai politik. Perempuan memiliki basis organisasi dan massa yang kuat dalam masyarakat yang biasanya terbentuk karena pengaruh dari keluarga.

Informan 4 menyebutkan, bahwa dirinya merasa politik tidak sebagai sesuatu yang negatif dan perlu ditakuti. Keluarganya, adalah tokoh salah satu partai politik yang telah mengenalkan politik pada informan sehingga ia sudah terbiasa berhadapan dengan publik dengan kepentingan-kepentingan yang diusung oleh partai politik kendaraan keluarganya berjuang dalam berpolitik. Demikian, informan 5 menjelaskan

bagaimana pentingnya sosok Bapaknya dalam membentuk persepsinya dalam berpolitik.

Informan 5 hidup dan dibesarkan dari keluarga petani tembakau yang berhasil di Klaten. Bapaknya, menjadi petani tembakau yang mengelola usaha mulai dari menanam, mengolah sampai memproduksi dan menjual tembakau. Banyak tenaga kerja, buruh, petani yang bekerja dalam usaha keluarga sejak tahun 1970-an. Bapaknya yang seorang PNI, sangat mengagumi Bung Karno dan mengajarkan ajaran serta pemikiran Sang tokoh kepada kesembilan putra-putrinya termasuk informan 5. Nilai-nilai yang dipegang Sang Bapak sedemikian merembes kepada informan, sampai pesan yang diingat informan semasa hidupnya; "*mbesok, kowe sing melu perjuangan anake wedhok* Bung Karno, Mbak Mega" (dimasa mendatang, kamu yang mengikuti perjuangan anak perempuan Bung Karno, Mbak Mega). Dari usaha keluarga, informan 5 mengakui bahwa petani tembakaulah basis perjuangannya selama ini dalam berpolitik. Dari keluarga petani dan buruh tembakau, dukungan dari konstituen solid ia peroleh selama ini.

Organisasi masyarakat adalah arena yang sangat berharga bagi beberapa perempuan menempa dirinya. Pengalaman dalam organisasi tempat perempuan beraktifitas, memberi pengaruh dalam proses terbentuknya struktur kognitif perempuan. Partai politik dan organisasi masyarakat; organisasi perempuan, organisasi keagamaan menjadi wadah perempuan berinteraksi dengan masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat misalnya pengajian-pengajian, PKK, dasawisma, kelompok-kelompok arisan, memberi andil dan kontribusi terhadap perempuan berpolitik.

Informan 1, memulai karir dalam dunia politik pada tahun 1999. Sebelumnya ia mengawali karier dengan aktif di Fatayat. Informan berasal dari keluarga kyai, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh akan lebih mudah memperoleh massa yang mendukung. Informan didukung keluarga besar yang merupakan keluarga Kyai Nahdatul Ulama (NU).

Wawancara dengan Informan 1, terungkap bahwa ia sudah mengenal organisasi sejak masih di bangku Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena sering diajak sang ibu (yang menjadi ketua Fatayat NU ranting), untuk hadir di majelis-majelis taklim yang diselenggarakan Fatayat NU. Sampai dengan saat yang bersangkutan masih duduk di bangku MTs, masih sering ikut dalam pertemuan-pertemuan Fatayat karena harus *momong* (mengasuh) adhiknya saat Ibunya memimpin pertemuan, pengajian dan rapat. Sering informan 1 melihat sekaligus belajar mengenai; bagaimana cara mengatur agenda kegiatan, cara berkomunikasi dengan orang lain dan cara berorganisasi. Berbekal pengalaman ini, informan 1 yang sering berkomunikasi, sering ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan dan masuk dalam jajaran kepengurusan Fatayat. Disadari informan, pengalaman berorganisasi yang tumbuh bersama keluarga adalah sesuatu yang berharga baginya. Informan merasa memiliki basis massa, memperoleh dukungan politik dari organisasi tempat mereka tumbuh dan dibesarkan dalam berpolitik. Demikian ketika informan perempuan lainnya, melalui organisasi atau kelompok-kelompok seperti kelompok pengajian, kelompok tani, para pelaku usaha kecil biasanya akan menjadi sasaran perempuan dalam usaha meminta dukungan. Kelompok ini bisa menjadi konstituen atau basis massa pendukung yang solid.

Regulasi memberi pengaruh pada terbentuknya kognitif perempuan Jawa Tengah, dalam dinamika politik. Tidak dipungkiri oleh para informan perempuan, dinamika regulasi selama ini sangat menguntungkan perempuan. Regulasi sejak 1999 telah mengalami dinamika yang sangat mendukung pada keberadaan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Dampaknya, perempuan merasa terlidungi, diberi jalan untuk kesetaraan mereka dalam politik. Perempuan memiliki rasa percaya diri, semakin meningkatkan kapabilitas mereka. Pengetahuan perempuan mengenai politik juga dibentuk oleh regulasi. Penetapan dan pemberlakuan regulasi yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik.

Ketetapan mengenai *affirmative action* yang menjadi dasar regulasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik selama ini. Dinamika regulasi yang mengatur keterlibatan perempuan selama ini, memberi keyakinan kepada perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Ketika regulasi sudah memberi celah dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi, maka para informan semakin menguatkan kapabilitas mereka, kepercayaan diri mereka dalam berpolitik. tidak ada satu informanpun yang struktur kognitifnya terbentuk karena satu faktor yang dominan. Faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perempuan, saling mengisi satu dengan yang lain, tidak rigit, sesuai dengan kapan dan dimana perempuan tinggal dan hidup dalam komunitasnya.

Faktor lain yang mempengaruhi struktur kognitif perempuan adalah partai politik. Pengalaman perempuan dalam partai politik, menempa mereka dalam berpolitik. Ideologi partai politik tempat mereka bernaung memberi warna dalam pola-

pola berfikir perempuan. Ada kecenderungan yang menarik yang ditemukan dalam wawancara pada informan dalam penelitian. Partai-partai yang memiliki organisasi-organisasi sayap keagamaan perempuan di Jawa Tengah cenderung lebih terbuka untuk perempuan. Perempuan memiliki tempat yang khusus dalam partai, karena dalam organisasi masyarakat perempuan yang berbasis keagamaan, biasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin, disanalah perempuan biasanya memiliki basis massa yang jelas, dan banyak.

Pola-pola komunikasi yang terjalin dalam partai politik dan melibatkan perempuan, banyak memberi pengaruh pada perempuan. Partai-partai politik termasuk elite partai yang banyak terdiri atas laki-laki yang memberi kesempatan terbuka bagi perempuan untuk melakukan aktifitas berpolitiknya, akan berdampak pada perempuan. Perempuan akan mempunyai rasa percaya diri dalam berpolitik. Memang tidak bisa dipastikan, sebuah partai cenderung terbuka atau tidak terhadap perempuan disebabkan oleh para aktornya. Dengan kata lain, jika perempuan tumbuh dalam organisasi partai yang para pengurus, elite partai memberi tempat bagi mereka tentu perempuan akan mendapatkan “banyak” hal dari partai politik. Demikian sebaliknya, pada partai-partai politik yang tertutup atau menutup jalan perempuan akan membentuk perempuan menjadi kurang percaya diri dan merasa dibatasi kiprahnya.

Partai politik memberi pengaruh terhadap persepsi anggota partai melalui pendidikan politik, termasuk perempuan. Dalam wawancara dengan beberapa informan, ada juga ditemui perempuan yang masuk ke dalam partai politik dalam kondisi “nol” (tanpa pengetahuan, dan pengalaman berpolitik sebelumnya) dan ia

terbentuk oleh pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tempatnya berasosiasi politik. Informan 6 dan 7 mera

Persepsi perempuan terhadap politik, dipengaruhi oleh banyak hal, yakni; keluarga tempat perempuan tumbuh dan berinteraksi melalui nilai-nilai yang diyakini, budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat, agama yang dianut oleh perempuan, organisasi masyarakat dan partai politik tempat perempuan aktif dan memulai karier politik mereka dan regulasi yang selama ini memberi *affirmative action* untuk keterlibatan perempuan.

Tidak ada yang dominan diantara faktor-faktor tersebut di atas, masing-masing irisan berkontribusi terhadap struktur kognitif dan persepsi perempuan yang digambarkan dalam irisan-irisan bagian. Jadi persepsi seorang perempuan muncul, tumbuh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada sekitarnya dan terjadi dalam kehidupannya yang masing-masing faktor ini berkontribusi pada terbentuknya persepsi mereka. Sehingga, masing-masing perempuan tidak bisa sama persepsinya, tergantung pada sejauh mana masing-masing faktor tersebut mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang berkontribusi dalam terbentuknya struktur kognitif perempuan Jawa Tengah dalam memahami politik, digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.6. Terbentuknya struktur kognitif perempuan.

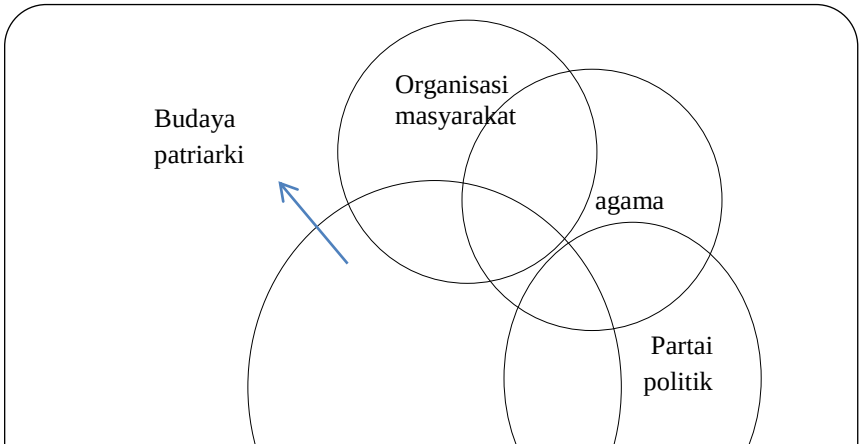

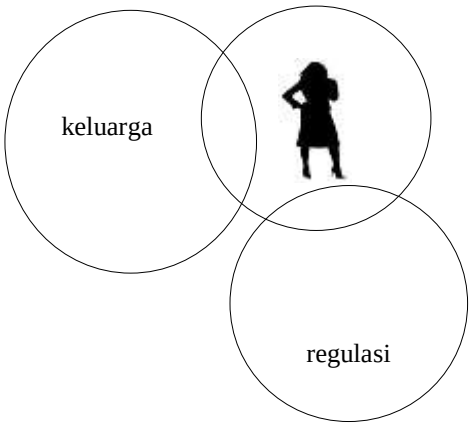

Sumber: data primer diolah (2018)

Memudahkan dalam membaca kontribusi masing-masing faktor dan bentuk-bentuk pengaruhnya terhadap perempuan, di bawah ini dijelaskan hal tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel 4.5. Ikhtisar faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur kognitif perempuan

No.	Faktor-faktor	Bentuk kontribusi pada kognitif perempuan
1.	Keluarga	a. Nilai-nilai yang dipegang teguh anggota keluarga; berdemokrasi, kesamaan dan kesetaraan gender. b. ideologi yang diyakini, serta pengetahuan berorganisasi dan berpolitik perempuan.
2.	Budaya patriarki	a. perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, b. perempuan bukan orang yang tepat dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan publik, c. keterwakilan perempuan sama makna dan artinya dengan keterwakilan laki-laki, dan d. perempuan tidak bisa maksimal aktif dalam partai politik dan tuduhan bahwa jika perempuan aktif dalam politik maka mereka akan melupakan peran domestik mereka.
3.	Agama	perempuan tidak boleh menjadi pemimpin
4.	Organisasi masyarakat	a. pemahaman awal tentang politik b. pengalaman berorganisasi
5.	Regulasi	a. *afirmative action* untuk perempuan berdampak

		pada tumbuhnya rasa percaya diri perempuan dan kapabilitas perempuan
6.	Partai politik	a. pengetahuan, kecakapan berpolitik b. kecakapan berorganisasi

Sumber: data primer diolah (2018)

4.2.2. Struktur Kognitif dan Pilihan Tindakan Perempuan terhadap Proses Rekrutmen

Struktur kognitif terbentuk berdasarkan apa yang dialami perempuan, berlangsung lama, mengendap dan mempengaruhi *mind set* perempuan secara halus, sampai-sampai mereka tidak menyadarinya. Sebagai hasil pembelajaran yang diperoleh perempuan selama ini, terbentuklah persepsi perempuan yakni apa yang dipikirkan perempuan dan yang menjadi tindakan mereka yang diperoleh lama dan bertahan menjadi pola tingkah laku mereka dalam kehidupan politik. Pengetahuan perempuan inilah yang memberi kerangka tindakan kepada mereka dalam hidup keseharian bersama orang lain dalam masyarakatnya. Struktur kognitif memberi gambaran tingkah laku perempuan yang didapatkan secara langsung dan tidak langsung dari pengalaman perempuan dalam dunia politik.

Terbentuknya struktur kognitif, menjadi satu hal yang penting untuk menelusur, melihat cara berfikir, cara pandang, persepsi perempuan-perempuan yang sukses memenangkan Pemilu legislatif di Jawa Tengah, terhadap dunia politik. Bagaimana struktur kognitif ini kemudian mempengaruhi sikap dan merembes sebagai tingkah laku perempuan yang berkontribusi terhadap kemenangan/ keberhasilan mereka dalam proses rekrutmen legislatif pada Pemilu legislatif 2004, 2009 dan 2014.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan perempuan, mereka tidak menolak *statement* mengenai persepsi perempuan di Jawa Tengah terpengaruh oleh konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat selama ini. Mereka tidak mempengaruhi bahwa konstruksi sosial yang dianggap sebagai budaya patriarki tumbuh dan mempengaruhi pola pikir mereka. Namun, hal tersebut selama ini bisa diatasi, dapat disikapi dan terantisipasi oleh perempuan. Di bawah ini adalah beberapa persepsi perempuan terhadap politik dan keterlibatan mereka dalam dunia politik khususnya dalam rekrutmen legislatif.

a. Politik bukan semata untuk kekuasaan dan bukan arena dominasi yang perlu ditakuti.

Menarik mengungkap persepsi perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, termasuk motif perempuan masuk dalam dunia politik. Pada masa kini ketika semua kran dibuka, *afirmative action* disuguhkan untuk melindungi keberadaan perempuan dalam politik beberapa perempuan menganggap jabatan politik sebagai sesuatu yang prestisius. Namun agak berbeda dengan ketujuh informan perempuan yang telah memenangkan preoses pemilihan selama ini.

Ketika pertama kalinya memasuki dunia politik, beberapa informan perempuan berpersepsi bahwa politik adalah ranah atau kegiatan yang semata-mata hanya bertujuan untuk meraih, mempertahankan dan memperjuangkan kekuasaan. Berkaca dari pengalaman perempuan melihat fenomena dalam partai politik selama ini, mereka beranggapan bahwa kekuasaan harus diperebutkan dan atau dipertahankan dengan cara apapun. Siapapun yang masuk dan aktif ke dunia politik, maka harus siap dengan

segala konsekuensinya. Apalagi, dalam partai politik sebagai kendaraan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan dalam dunia politik baik oleh masing-masing individu maupun secara kolektif.

Pada awal masuk ke dunia politik, tidak semua informan perempuan yang memiliki kesiapan yang cukup secara mental. Tidak banyak perempuan yang mau berpolitik dan mau berjuang dalam partai politik. Persepsi perempuan saat itu; masuk berpolitik harus punya koneksi, relasi, harus aktif di partai politik dan memiliki dukungan. Partai itu organisasi eksklusif yang tidak semua orang bisa aktif dan menjadi pengurus di dalamnya. Kalau relasi, koneksi tidak dimiliki oleh perempuan, mustahil mereka bisa bertahan dalam partai. Dalam perjuangan mereka, tidak mudah bagi perempuan untuk bertahan diantara laki-laki, apalagi dalam proses rekrutmen legislatif. Perempuan sangat paham, mengenai partai politik sebagai kendaraan yang telah dikemudikan oleh elite-elite politik yang sebagian besar dari mereka adalah laki-laki.

Masuk dalam rekrutmen legislatif, adalah pengalaman mereka dalam membangun rasa percaya diri dalam berpolitik. Menata diri diantara kader dan elit politik lainnya, termasuk laki-laki. Membiasakan diri untuk terbuka menjalin komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan. Dalam perkembangan selanjutnya keadaan berubah, beberapa perempuan mulai berfikir untuk masuk dalam sistem rekrutmen legislatif. Seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman sangat penting dalam mengkonstruksi persepsi perempuan. Informan 1 dalam wawancara 9 Januari 2018 menegaskan;

> “Apa yang saya lakukan selama ini, bukan semata untuk itu (kekuasaan). Seperti yang saya sering sampaikan ke anak-anak saya, bahwa kalau ibunya ini berorganisasi, jadi pengurus organisasi masyarakat seperti mereka waktu kecil, tentu hanya bisa usul jika menginginkan sesuatu. Usul kalau ada kepentingan masyarakat kepada para anggota dewan, itupun kalau bisa berkomunikasi. Tapi, dengan berjuang di politik, saya bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan. Saya menjadi bagian dari pihak yang memutuskan dan bisa mempengaruhi, saya bisa langsung memperjuangkan apa yang masyarakat sekitar saya mau.”

Hal senada disampaikan oleh informan 4 yang sejak masa sebelum reformasi telah masuk dunia politik dan menjadi anggota dewan. Keluarga besarnya sejak lama menjadi aktifis politik di salah satu partai. Hubungannya dengan konstituen telah terkelola dengan baik, sebagai kunci kesuksesannya yang tak lekang oleh periode jaman. Dalam menjalankan karier politiknya, informan 4 tidak pernah mengalami kegagalan dalam usahanya mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dalam pandangannya politik tidak dapat dimaknai sebagai arena yang penuh dominasi karena politik tidak semua hanya karena memperebutkan kekuasaan. Pandangannya terhadap keterwakilan, bukan semata untuk pekerjaan, kekuasaan namun lebih dari itu yakni sebagai perjuangan.

Informan 6 dalam Satelit Post (sabtu, 6 oktober 2018) mengemukakan bahwa baginya nilai-nilai yang ia yakini adalah pemahamannya tentang kebenaran dan kebaikan. Sedangkan politik menurutnya adalah ibadah sebagai bentuk perjuangan yang sangat luar biasa agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara (https://satelitpost.com/pilihanredaksi/hj-sri-ruwiyati-se-mm-politik-itu-panggilan-jiwa). Politik menurut informan adalah panggilan jiwa, bukan mencari pekerjaan, dan keterlibatannya masuk ikut dalam proses pemilihan legislatif adalah

pintu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Konflik pasti terjadi, ketika terjadi kepentingan yang sama oleh beberapa pihak. Namun, semua hal bisa diatasi dengan cara-cara yang baik. Bagi informan 4, perempuan lebih bisa memanagement konflik jika ia mau menyelesaikan. Perempuan bisa mengandalkan rasa mereka, kemampuan bertahan, kelembutan mereka yang baik ketika berhadapan dengan pihak-pihak lain yang berseberangan.

Diskriminasi gender masih dirasakan oleh informan 2, karena *image* politik saat itu tidak bisa jauh dari dominasi. Kampanye yang menggunakan sistem dominasi, benturan antar tim menjadi bahan kampanye untuk menjatuhkan perempuan ketika memasuki proses rekrutmen. Perempuan harus tegar dan kuat menghadapi politik yang diidentikan dengan dominasi, saling berebut, dan banyak persaingan.

Menurut penuturan informan 2, dulu kegiatan kampanye pasti diikuti dengan kegiatan-kegiatan hiburan untuk menarik perhatian massa/ konstituen, seperti *dangdutan*, penampilan grup musik, dan kegiatan lain yang menyebabkan kerumunan massa. Kondisi sering tidak dapat terkendali, terlebih bila massa pendukung antar partai saling bertemu yang seringkali menimbulkan tawuran, pertengkaran, pengeroyokan antara masing-masing pendukung dan simpatisan partai politik.

> "Pada awalnya, sering ditakut-takuti, diingatkan, terlebih oleh lawan politik. Kepada masyarakat sering disampaikan katanya jangan milih saya, saya *khan* perempuan. Nanti kalau ada urusan dengan polisi, ada tawuran antar massa, saya tidak bisa mengurusi. Dan benar, memang pernah kejadian *lho* saya mengurus massa pendukung saya di kantor polisi. Memang tidak bisa, orang-orang (pendukung) saya (orang *pondok'an*) *ngurus* yang begini, saya butuh pendukung yang bisa ngatasi jika terjadi yang begini ini." (wawancara tanggal 25 Februari 2018).

Seiring dengan perkembangan waktu, sekarang masyarakat sudah paham bahwa politik itu tidak harus bersentuhan dengan dominasi, dengan kekuatan otot, dengan saling menyerang secara fisik antar pendukung untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, dan sebagainya saat ini, demikian menurut Informan 2. Bentrokan massa antar pendukung partai politik, di lapangan yang tidak bisa dihindari, namun rupanya jaman sudah berubah. Sekarang banyak pertentangan, namun tidak secara fisik, melainkan perang opini antar pendukung melalui media sosial, *bbm* atau *wa* saat sekarang.

Informan 3 juga merasakan apa yang mungkin disebut masyarakat bahwa politik penuh dominasi, terutama dominasi simbolik terhadapnya. Bahasa verbal dan bahasa tubuh pada saat wawancara, menunjukkan bahwa informan sangat berhati-hati ketika menjawab pertanyaan persepsinya terhadap dominasi dalam politik yang ia pernah alami. “Dalam politik, perempuan harus siap pada semua keadaan, tekanan dan dominasi, jika tidak perempuan bisa mundur satu langkah dan pulang kalah”, demikian tegas informan.

b. Jalan tengah antara nilai-nilai budaya patriarki dengan hak politik perempuan

Kentalnya budaya patriarki yang mengkonstruksi masyarakat Jawa Tengah selama ini, selalu dikonotasikan/dimaknai negatif dan berdampak pada perempuan berkiprah di politik. Perempuan harus familier dengan nilai-nilai patriarki yang tumbuh dalam masyarakat. Perempuan tidak bisa anti dan menolak (secara ekstrim) nilai-nilai ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Dari hasil wawancara dengan para

informan diperoleh data bahwa; tidak semua nilai-nilai budaya patriarki yang ada dalam masyarakat dimaknai negatif oleh perempuan dalam kehidupan politik mereka.

Budaya yang selama ini berkembang dan mempunyai makna bagi masyarakat dapat diambil nilai-nilai yang baik, sebagai pranata dan aturan yang bisa berdampak positif bagi perempuan dalam berpolitik. Tidak harus selalu menjadi objek, perempuan dapat menjadi subjek, mereka bisa terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan positif di tengah masyarakat. Dalam masyarakat patriarki, perempuan dapat mendefinisi ulang perannya sebagai istri, ibu, perempuan bekerja termasuk sebagai politisi dan sebagainya. Perempuan harus membangun dirinya sendiri karena tidak ada esensi dari feminitas yang abadi yang mencetak identitas siap pakai baginya. Semua yang menghambat usaha perempuan membangun dirinya sendiri di dalam masyarakat misalnya sistem patriarki harus berakhir baginya. Oleh karena itu, jalan tengah diambil perempuan. Konsep ini berimplikasi pada beberapa persepsi perempuan, misalnya pemahaman informan mengenai kebebasan perempuan. Mengkutip apa yang disampaikan informan 1;

> "Kebebasan itu tidak bisa diartikan bebas sebebas-bebasnya. Bagi orang Indonesia, kebebasan tidak bisa disamakan dengan milik orang luar. Demikian bagi perempuan, ketika menginginkan kebebasan, ya mestinya melihat apa juga yang menjadi tugasnya, kedudukannya."

Informan 3 dan 5 juga mengiyakan dan berpendapat yang sama. Kebebasan yang dimiliki harus diterapkan secara bijak oleh perempuan ketika keluar rumah untuk berpolitik agar mereka bisa menjalankan perannya dalam keluarga dengan baik sehingga tercipta harmoni. Bagi perempuan, harmoni dalam kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menjalankan semua perannya. Peran perempuan sebagai ibu

rumah tangga juga sekaligus dapat dilaksanakan bersamaan dengan tugas lainnya di luar rumah. Ini seiring dengan apa yang dikatakan Beauvoir bahwa perempuan-perempuan dapat bekerja, dapat beraktifitas. Betapapun keras dan melelahkannya pekerjaan perempuan, pekerjaan masih memberikan berbagai kemungkinan bagi perempuan, yang jika tidak dilakukan, mereka akan kehilangan kesempatan sama sekali. Dengan bekerja, perempuan dapat memperoleh transendensinya. Mereka akan secara konkrit menegaskan statusnya sebagai subjek, sebagai orang yang aktif menentukan arah nasibnya.

Perempuan bukan berarti harus melupakan kewajibannya dalam keluarga ketika mereka terjun dalam dunia politik, mengabaikan tugas-tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Secara jelas, para informan menegaskan bahwa sejauh ini keluarga tetap nomor satu bagi mereka. Informan 3, tinggal jauh dengan keluarga sejak ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Walaupun urusan domestik untuk putra dan keluarganya diserahkan kepada asisten rumah tangga, tapi setiap seminggu sekali harus pulang untuk bertemu dengan keluarga. Komunikasi dengan keluarga tetap terjalin dengan menggunakan alat komunikasi dan media sosial. Selama ini, suami dan anak, serta keluarga besar sangat mendukung keberadaannya dalam berpolitik. Sehingga jarak yang memisahkan informan 3 dan keluarga tidak menghalangi komunikasi dua belah pihak.

> “Perempuan tidak harus kehilangan peran dalam urusan domestik, karena mereka menjadi wakil rakyat. Memasak, membimbing anak-anak tetap dilakukan, namanya saja ibu rumah tangga”.

Di atas adalah penggalan wawancara dengan informan 1, mengenai pembagian perannya sebagai politisi yang aktif dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Baginya,

yang perlu ia lakukan adalah menjaga keseimbangan, tidak melupakan salah satu tugasnya sebagai politisi maupun sebagai ibu rumah tangga. Tidak perlu diseberangkan, jika dua peran ini bisa sejalan. Menurut informan 1, kondisi yang harmonis dalam keluarga, adalah modal bagi perempuan dalam berpolitik, memberi kekuatan bagi perempuan. Diakuinya, banyak hal yang sering dibicarakan bersama dalam keluarga karena ia membutuhkan dukungan dari keluarga agar terjalin saling pengertian. Apalagi dalam masyarakat Jawa Tengah keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagi perempuan, masyarakat melihat status dan kehormatan perempuan dari keberadaannya dalam keluarga. Keluarga menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat dan konstituen terhadap perempuan.

Bagi para informan perempuan yang telah beberapa kali mendulang sukses dalam proses pemilihan, walaupun mereka bisa mandiri dalam berpolitik namun keluarga yang mendukung tetap sangat penting. Apa yang mereka cari dari dukungan keluarga adalah rasa nyaman dalam bekerja. Pun, ketika menghadapi persyaratan perempuan harus memperoleh ijin suami dalam proses pendaftaran rekrutmen legislatif, semua informan perempuan merasa tidak ada kendala dengan persyaratan ini. Tidak ada masalah dengan persyaratan ijin ini, demikian menurut Informan 1. Isian formulir bagi perempuan yang menerangkan adanya ijin dari suami dan keluarga, tidak ia dimaknai sebagai pengekangan yang seolah perempuan tanpa kebebasan. "*Nah*, menjadi persoalan jika suami melarang tanpa alasan yang jelas", demikian tandas informan 1. Bagi informan 3, ini tidak masalah karena semua ia lakukan atas ijin dan dorongan suami dan keluarga besar.

Komunikasi perempuan dan konstituen sering dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui media sosial). Interaksi antara informan 1 dengan konstituen, teman-teman dunia maya sering terjalin. Publik bisa mengakses bentuk komunikasi yang baik, harmonis yang terjalin antara anggota keluarganya. Ia tidak pernah canggung menunjukkan pada publik aktifitasnya untuk keluarganya. Misalnya ketika informan mengunggah status dan gambar-gambar yang menunjukkan kebersamaannya bersama suami dan anak-anaknya, hasil olahan masakan di rumah yang terhidang untuk keluarga, dan sebagainya. Komentar positif disampaikan oleh para *netizen* terhadap unggahan yang bertema keluarga dalam dinding informan. Komunikasi dua arah dalam media sosial yang sering bertemakan keharmonisan keluarga, antara informan dan teman dalam dunia maya, cukup efektif.

c. Perempuan mampu melewati proses rekrutmen

Persepsi ini sangat penting bagi perempuan, agar mereka memiliki keyakinan diri. Jalan panjang harus dilewati perempuan dalam proses rekrutmen legislatif. Regulasi yang berubah, ketetapan partai politik, kepentingan sesama bakal calon, semua berkontribusi terhadap persepsi para informan. Pengalaman informan 4 terungkap dalam wawancara, memberi gambaran mengenai hal tersebut. Menurut informan, sedikit perempuan yang berpolitik pada masa Orde Baru.

Politik saat itu dianggap sebagai dunia laki-laki, karenanya dalam partai politik tidak banyak perempuan yang menonjol terlihat kiprahnya, tidak banyak yang mau dan mampu bertahan di partai politik, demikian apa yang disampaikan informan 4. Perempuan dalam kepengurusan partai politik, biasanya mengisi jabatan-jabatan yang

kurang strategis. Kepengurusan partai politik banyak diisi oleh laki-laki. Belum lagi kepengurusan tiga partai politik saat itu stagnan. Kondisi ini berakibat bagi para pendatang baru di partai politik. Regenerasi berjalan lambat dan sangat ketat di dalam partai politik. Hanya mereka yang cakap, kuat, berintegritas dan memiliki modal yang cukup yang bisa bertahan. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi perempuan yang secara kuantitas sudah termarginalkan.

Belum lagi serangan yang dilakukan oleh bakal calon lainnya. Terdapat kesamaan "ujaran" penolakan pada perempuan yang biasanya disampaikan dalam kampanye oleh para bakal calon laki-laki. Mereka mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sudah hapal dengan serangan demikian, perempuan juga memiliki "senjata" menjawab serangan tersebut. Informan 1 menjawab ujaran di atas dengan menyampaikan pada publik bahwa menjadi DPRD itu bukan pemimpin, tapi mewakili. Maknanya berbeda, menjadi wakil masyarakat karena dipercaya untuk menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat.

> "Saya sering menjelaskan, bahwa saya ini bukan calon pemimpin tapi saya ini mencalonkan diri sebagai *wakile njenengan*, *utusanne njenengan* yang akan mewadahi aspirasi, keinginan dan kepentingan panjenengan semua untuk selanjutnya menyampaikan kepada pemerintah. Menurut saya lebih manjur ini, untuk menjawab serangan lawan dengan ujaran memojokkan saya sebagai perempuan."

Tuduhan bahwa perempuan selalu terbawa perasaan dan mengesampingkan logika, sering menjadi pembenar alasan. Hasil wawancara dengan para informan, diakui mereka bahwa hal tersebut menjadikan perempuan lebih berhati-hati mengambil keputusan karena begitu salah sedikit, perempuan langsung disudutkan dengan pernyataan bahwa mereka tidak cakap mengambil keputusan.

Persepsi dan kepercayaan informan perempuan mengenai kemampuan mereka dalam proses rekrutmen legislatif semakin menguat, terutama oleh karena regulasi yang semakin memihak. Regulasi telah mendorong dan memberi jaminan keberadaan perempuan, menyebabkan perempuan memiliki percaya diri, kesempatan yang lebih untuk aktif dalam partai politik dan terlibat dalam proses rekrutmen partai untuk mewakili mereka di lembaga legislatif. Keterwakilan 30 persen yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk memberi ruang untuk keterlibatan perempuan. Hasil wawancara dengan informan 1, menjelaskan awal ia masuk dalam partai politik;

> "Awalnya, pada tahun 2003 diminta oleh partai (PKB) untuk mendaftar (sebagai bakal calon) DPRD kabupaten. Waktu itu, saya sudah aktif di Fatayat. Saya bilang tidak mau, karena saya berfikir perlu modal yang cukup untuk mendaftar. Tahun 2004 akhirnya saya maju, karena dorongan keluarga, suami saya yang sangat mensuport saya. Waktu 1999, PKB sebagai partai baru membuka peluang kepada saya untuk masuk dalam jajaran kepengurusan. Namun, saya masih mikir-mikir. Barulah saat Pengurus Cabang PKB membutuhkan perempuan untuk maju Pemilu 2004, saya mikir. Saya tergerak, kalau hanya ikut berorganisasi, *njur* kontribusi saya apa untuk umat. Kalau saya ikut terlibat lebih jauh, mungkin ada manfaatnya."

Banyak hal yang memicu kepercayaan diri perempuan masuk dalam proses rekrutmen. Kepemilikan faktor-faktor dan sumber-sumber pendukung oleh perempuan diakui sebagai penambah kepercayaan atas kemampuan mereka.

d. Perempuan menghindari permusuhan dan perdebatan

Pengetahuan dan struktur kognitif perempuan juga dipengaruhi oleh pengalaman perempuan ketika menghadapi tekanan. Pengalaman perempuan selama ini dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam karier politik mereka, menumbuhkan pemahaman pada perempuan bahwa mereka harus tangguh menghadapi tekanan dari pihak-pihak,

aktor dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Perempuan dalam dunia politik, harus kuat, bermodal, percaya diri. Pandangan di awal tentang politik yang penuh dengan dominasi, hanya dikuasai dan milik laki-laki harus berubah seiring dengan pengalaman yang dimiliki, pendidikan dan kapabilitas mereka.

Seperti halnya yang lazim terjadi dalam kehidupan politik, tekanan sudah dihadapi perempuan sejak awal mereka mulai serius dalam dunia politik. Beberapa informan mengemukakan, ketika mereka aktif dalam partai politik, masuk dan terlibat dalam proses rekrutmen legislatif, tidak semua orang dalam partai politik memberi dorongan. Kepentingan orang bisa saja sama dalam partai, misalnya tahun 2004 semua orang berebut nomor urut. Tekanan akan dihadapi perempuan terlebih dari elite-elite partai laki-laki, dan calon laki-laki dalam partai bahkan dalam pelaksanaan pemilihanpun, perempuan mengalami tekanan. Informan 2, yang duduk sebagai calon nomor 1 di Dapilnya memenangkan suara dalam Pemilu tahun 2004. Ia mengatakan, bahwa pasca perhitungan suara dan diputuskan KPU ia yang terpilih dari Dapil tersebut, tidak serta merta keputusan itu selesai. Informan 2 mendapatkan tekanan luar biasa dari calon nomor urut 2 yang memiliki kedudukan sebagai Sekretaris Dewan Syuro. Tekanan juga dialami informan 1, dari sesama pengurus partai yang lain. Ada pengurus yang merasa sebagai elite dan merasa keberadaannya terancam oleh posisi informan.

Demikian perempuan selalu mengambil pilihan cara-cara untuk memperoleh kekuasaan dengan menyerahkan distribusi kekuasaan pada sekelompok orang atau mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang partai politik sepenuhnya.

Bahkan kadang terlepas keinginan perempuan. Sikap-sikap yang tumbuh lama dan berkembang dalam memperjuangkan kepentingan dalam partai politik memberi pengaruh terhadap perasaan perempuan. Perasaan atau ikatan emosional perempuan terhadap sistem politik dalam hal ini partai politik dirasakan sangat kuat berpengaruh terhadap persepsi perempuan. Walaupun kandidat perempuan menghadapi lebih banyak ancaman dan intimidasi daripada kandidat laki-laki ketika keduanya sama-sama berpolitik.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam pada informan mengenai mereka yang menjadi lawan politik perempuan dalam proses rekrutmen, perempuan merasa wajar dalam berpolitik ada "lawan", termasuk mereka yang separtai politik. Tekanan terhadap perempuan selama ini dalam partai, menjadikan perempuan semakin terbiasa dengan orang-orang di sekelilingnya.

Fenomena yang sering dialami perempuan seperti terungkap di atas, mendorong perempuan untuk kuat. Menurut mereka, sikap mengalah, menunggu dalam proses sosial dan politik tidak dapat selalu dipertahankan. Perempuan ketika diam, menunggu dalam ketidakberdayaan, menjadi bencana bagi mereka yang disadari hal tersebut tidak menguntungkan dalam proses politik berikutnya. Pada masa penentuan nomor urut partai sebagai faktor kemenangan dalam Pemilu, perempuan lebih berhati-hati terutama dengan pengurus se partai. Ketika regulasi telah berubah, perempuan memiliki percaya diri, karena elektoralnya tinggi dan memadai pada setiap Pemilu. Dengan elektabilitas yang tinggi, perempuan tidak begitu reaktif (walaupun waspada tetap dilakukan)

terhadap lawan-lawan politiknya terutama terhadap mereka yang sedaerah pemilihan, separtai politik, maupun berbeda partai politik.

Namun, perempuan lebih memiliki kecenderungan untuk menghindari permusuhan dan perdebatan. Perempuan lebih mengedepankan budaya harmoni, mereka lebih suka menggunakan rasa mereka sesuai cerminan perempuan Jawa Tengah dengan kultur yang kental. Rasa *ewuh pekewuh*, *sungkan* mendominasi perempuan ketika menghadapi orang-orang dan kelompok lain yang se partai politik. Apalagi jika mereka berhadapan dengan kepentingan elite partai yang sering sekali memiliki kepentingan yang sama dengan sumber daya yang terbatas.

Apa yang terjadi di atas pada perempuan, jika ditelusur lebih jauh tidak lepas dari kebiasaan perempuan yang selalu mengolah rasa. Tidak dapat dipungkiri, kepekaan mereka terhadap fenomena yang terjadi di sekelilingnya kadang diolah dengan rasa, perasaan, hati, bukan oleh dominasi logika berpikir mereka.

Informan 3 dalam wawancara mengungkapkan kesadaran mereka terhadap tekanan-tekanan dalam dunia politik oleh lawan politik dalam proses rekrutmen legislatif selama ini. Penekanan olehnya mengungkap persepsinya terhadap lawan politik;

> "Perempuan tidak usah punya pikiran untuk menyerang sesama perempuan, jika ingin perempuan itu maju. Perempuan harus lebih rasional menghadapi semua tekanan. Perempuan jangan suka boleh bergosip, membicarakan lawan politiknya untuk menyerang. Selama ini yang terjadi seperti itu dan bagaimana perempuan mau maju?"

Situasi di atas sering terjadi dan itu membuat keinginan perempuan maju dalam ruang politik terhalang. Perempuan seringkali sangat sensitif jika berhadapan dan

berseberangan dengan perempuan lainnya dalam politik. Perempuan lebih banyak menggunakan energinya, perasaannya jika sudah berhadapan dengan sesama perempuan. Sesama perempuan ketika berseberangan, akan menimbulkan dampak yang berbeda dengan saat perempuan berhadapan dengan laki-laki.

Tidak jarang, perempuan juga menghadapi tekanan psikis dari koleganya yang perempuan. Yang ironis biasanya, hal-hal yang bersifat pribadi pada diri perempuan menjadi isu-isu yang dimunculkan. Biasanya yang berkaitan dengan; kebiasaan kultural yang membenturkan peranan domestik dan publik membuat posisi perempuan cenderung dilematis; kepribadian dan perilaku perempuan; hubungan sosial perempuan; dan sebagainya yang seringkali jauh dari hal-hal yang bersifat tidak logis sebagai bahan menyerang sesama perempuan. Apalagi jika serangan berupa fitnah, kampanye hitam ini berupa hal-hal yang berkaitan dengan privasi perempuan, segala sesuatu yang bersifat tidak logis untuk diperdebatkan dan dijadikan sebagai isu-isu berpolitik.

Dalam menghadapi semua tekanan dan persoalan, informan 1 mengidentifikasi tiga sifat yang dimiliki perempuan akan lugas, lembut dan berkomitmen. Perempuan akan lebih peka terhadap berbagai persoalan yang ada menghampirinya. Dengan menggunakan “rasa” nya yang lebih tajam, perempuan akan menemukan berbagai indikasi jika ada hal-hal yang tidak baik terhadapnya. Selebihnya yang terjadi adalah perempuan akan lebih memiliki dorongan untuk segera selesaikan masalah. Kecenderungan perempuan tidak bisa membiarkan persoalan-persoalan tidak segera

diselesaikan. Ia akan dengan lugas mengkomunikasikan segala persoalan yang menimpanya.

e. Sikap perempuan terhadap konstituen

Pengalaman peneliti ketika mencoba komunikasi dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa para informan ini ramah dan terbuka dengan peneliti. Tidak dipungkiri, para informan memiliki jadwal yang sangat padat namun mereka prinsipnya terbuka dengan kehadiran peneliti.

Secara ideal, para legislator diharapkan dapat mewakili semua kepentingan konstituen (masyarakat yang ia wakili) dimana ia dicalonkan. Ini disadari secara penuh oleh para informan, bahwa perempuan ketika memasuki proses rekrutmen, keberhasilan mereka tidak lepas dari peran partai politik dan konstituen mereka. Pengalaman peneliti, wawancara dengan informan 2; ketika untuk periode kedua atau ketiga kalinya, informan memasuki proses rekrutmen pada saat ini hubungannya dengan konstituen terjadi karena pertimbangan bahwa semua calon legislatif (termasuk informan) membutuhkan konstituen untuk memenuhi peran mereka sebagai wakil dan menunjukkan representasi perempuan.

Bagi para informan, konstituen adalah anggota masyarakat yang diwakili oleh mereka yang terpilih dalam pemilu, oleh karenanya konstituen harus didudukkan sebagai orang-orang yang menentukan seseorang calon apakah mereka dapat duduk / masuk dalam rekrutmen legislatif atau tidak, disamping setelah partai politik. Perempuan menyadari sepenuhnya bahwa bagi masyarakat, harapan untuk dapat

berkomunikasi dengan wakil mereka terutama yang mereka pilih diharapkan dapat memberi solusi disetiap persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. Sehingga bagi para informan perempuan, mereka perlu menjalin komunikasi yang baik dan lebih intens dengan kontituen.

Berdasarkan observasi di lapangan, informan perempuan lebih telaten menghadapi konstituen mereka, baik yang mereka pahami sebagai pemilih maupun yang tidak memilihnya pada proses rekrutmen legislatif sebelumnya. Perempuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan konstituennya, bersikap egaliter dan menempatkan diri sejajar. Prinsip demikian muncul, tumbuh pada perempuan dengan konstituen mereka. Adakalanya, perempuan menggunakan organisasi-organisasi masyarakat, organisasi keagamaan tempat mereka aktif dan bernaung untuk merekrut, mempertahankan konstituen. Apa yang dilakukan perempuan ini sangat efektif untuk menjaga komunikasi mereka dengan konstituen ditingkat *grassroot* (akar rumput).

Di setiap kegiatan, acara yang ia ikuti dan selenggarakan bersama para konstituennya, informan 1 diakui oleh masyarakat bahwa ia selalu mau mendengar keluhan mereka. Informan 1 mengaku bahwa komunikasi dengan konstituen sangat penting karena dengan cara ini ia dapat membantu masyarakat (konstituennya) untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Keterlibatan perempuan penting untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi sebagai wakil dari partai politiknya. Ia merasa perlu untuk mendengar, menyampaikan ke partai politik. Lagi pula, komunikasi ini sangat penting bagi perempuan untuk memperlihatkan secara jelas siapa dan bagaimana peran mereka bagi konstituennya.

Hubungan perempuan dengan konstituennya, sangat memberi pengaruh pada partai politik. Perempuan merasa ada hubungan positif antara ia dengan partai politik, tatkala mereka menjalin komunikasi dengan konstituen. Partai akan memperoleh manfaat jika para calon berinteraksi dengan warganya serta bersikap tanggap terhadap segala persoalan yang dihadapi oleh konstituen. Disini, perempuan dapat melibatkan partai politik, ia menjadi penyambung, agen partai yang menjadi penghubung partai dengan masyarakat luas. Informan 2, dalam wawancara mendalam menyadari bahwa seorang perempuan wakil rakyat terpilih berusaha membantu atau mencoba terlibat dalam persoalan yang dihadapi masyarakat. Kontak langsung yang sering dilakukannya, disadari untuk membangun kepercayaan publik terhadapnya dan partai politik tempatnya berjuang. Komunikasi dua arah dijalin oleh perempuan sejak ia mulai mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil rakyat. Setelah terpilih, komunikasi yang demikian antara perempuan dan konstituennya dilakukan khususnya ketika mereka membuat keputusan tertentu mengenai suatu persoalan.

Disatu sisi perempuan bisa memberi pemahaman yang jelas dan lebih baik pada masyarakat pemilihnya, disisi lain perempuan dapat melakukan peran mereka sebagai kader partai yang berusaha untuk membengun kepercayaan masyarakat (publik) pada perempuan kandidat dari partai politik. “Publik dalam hal ini para konstituen berharap suara yang mereka berikan tidak sia-sia. Kegiatan-kegiatan seorang wakil rakyat diharapkan memiliki manfaat untuk mereka yang diwakili. Dengan akses, wewenang dan sumber daya yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk memberikan fasilitasi kepada konstituennya maka perempuan akan dianggap keberadaannya”, demikian informan 3

menjelaskan konsep hubungan antara konstituen dan wakil mereka. Artinya bahwa perempuan merasa bahwa dalam menjalankan fungsi mereka, disitulah akuntabilitas seseorang sebagai wakil rakyat dapat dilaksanakan.

Bagi para perempuan, komunikasinya dengan para konstituen sesungguhnya membawa dampak positif terhadap kedudukan mereka dalam partai politik. Pertimbangan partai politik secara ideal adalah mengenai elektabilitas perempuan di depan konstituennya berpengaruh pada elektabilitas partai juga. Realitanya, masyarakat dapat menilai mana yang dekat dengan mereka dan mana yang tidak mendekat dengan mereka. Dalam perspektif masyarakat, mereka yang tidak berjuang dan tidak membawa perbaikan dalam masyarakat, dianggap tidak lagi layak untuk dipertimbangkan lagi untuk dipilih kembali. Dan ini tentu saja ancaman bagi perempuan. Ketika mereka telah mendapatkan kepercayaan dari pemilihnya dalam satu periode kemenangan pemilu, sangat sayang jika kesempatan yang sama tidak ia peroleh kembali hanya karena sikap, perilaku mereka yang kurang memberi kesan positif bagi masyarakat pemilih.

Bagaimana cara perempuan berkomunikasi? Berdasarkan hasil wawancara perempuan berkomunikasi dengan cara bertatap muka langsung dan dengan cara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui agen-agen atau aktor-aktor yang tergabung dalam “Tim sukses” yang telah ia tunjuk sejak awal berjuang masuk dalam tahapan rekrutmen legislatif dan melalui media sosial (*online*). Tim sukses ini bekerja untuk perempuan, disepanjang waktu tidak hanya terbatas pada masa kampanye Pemilu saja untuk membantu, mewakili perempuan berkomunikasi

dengan konstituennya. Ketika perempuan berkomunikasi dengan konstituennya, mereka tidak harus membutuhkan modal yang banyak berupa uang atau staf (tim sukses). Ia bisa mengambil dukungan partai politik, pemerintah daerah serta organisasi masyarakat tempatnya aktif walaupun mereka tidak menepis pernyataan tentang kebutuhan anggaran yang selalu dialokasikan untuk kepentingan komunikasi dengan konstituennya. Informan 1 mengakui;

> "Kalau saya, menjelang Pemilu *alhamdulillah* tidak terkendala soal mengkondisikan dan meminta dukungan pemilih. Saya tidak begitu kesulitan kemampuan finansial saya menghadapi para pendukung. Saya cukup membuat *tanggalan* yang ada gambar saya dan partai misalnya untuk saya bagi-bagi dalam acara rutin, dalam pengajian atau kegiatan lain dengan warga. Biasanya langsung habis. Di situ, saya secara tidak langsung *nembung*, *nyuwun* dukungan untuk saya maju dalam Pemilu."

Menurut informan 1, pengalamannya selama ini dengan konstituen tidak banyak mendapat masalah dan persoalan karena komunikasi selalu dijaga. Cara berkomunikasi yang kedua, dilakukan oleh beberapa perempuan informan di dunia maya, melalui jejaring media sosial. Informan 1, 2 dan 3 secara intens memanfaatkan media sosial mereka untuk berkomunikasi dengan massa. Menurut Informan 3;

> "Tidak mungkin bagi saya sekarang ini dengan tugas yang harus saya laksanakan di Jakarta, bisa melayani tatap muka dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat pemilih. Untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan itu, saya menggunakan media sosial saya. Disitu saya menyapa, memperlihatkan kegiatan kedinasan saya, atau menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Walaupun saya juga memiliki media online untuk kampanye-kampanye, program dan pandangan saya terhadap suatu masalah. Silahkan lihat Novita Center, ibu bisa lihat" (wawancara 27 Maret 2018).

Beberapa hal, menjadi efektif jika dilakukan oleh perempuan dalam menjalin komunikasi dengan pemilihnya, sebagai berikut;

1) Informan perempuan sangat mempertimbangkan bahkan jarang menolak undangan. Perempuan menyadari bahwa menolak undangan dari konstituen, akan berakibat buruk pada citranya. Perempuan tidak bisa membatasi kontak langsung dengan konstituen mereka. Ia tidak dapat menghindari sepenuhnya atas agenda-agenda kegiatan yang menyebabkan mereka bertemu dengan konstituen. Jika tidak, kelompok masyarakat akan menganggap bahwa ia tidak aspiratif, tidak merakyat, dan saat pemilihan ini tentu akan menjadi penanda bagi perempuan.
2) Perempuan harus mengenali konstituennya beserta segala kebutuhan-kebutuhannya sehingga ia dengan mudah mengidentifikasi isu-isu yang paling mendesak bagi masyarakatnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang memberi dukungan tentu tidak mempunyai kesamaan isu dan kebutuhan, dan perempuan akan mencoba untuk memahami satu persatu. Disinilah kekuatan perempuan yang lebih telaten dalam menghadapi masyarakat, lebih mau mendengarkan dan lebih dekat dengan konstituennya.
3) Melalui forum-forum, pertemuan-pertemuan publik perempuan dapat bicara dengan anggota masyarakat. Ia akan memperoleh data tentang masalah-masalah yang terjadi. Tantangan bagi perempuan, ketika ia sering dalam forum-forum maka ia akan sering mendengarkan kritik, pertanyaan dan pernyataan yang tidak ramah, atau bahkan berwujud permintaan-permintaan yang sering tidak dapat ia atau partai kabulkan.

Fenomena tersebut, bisa terjadi dengan siapapun dan dalam forum apapun dimana perempuan menyadari bahwa tidak semua orang dalam forum menyukai calon

legislator mereka, apalagi bagi perempuan. Menyadari bahwa tidak semua orang adalah simpatisan partainya bahkan bisa jadi beberapa orang sudah tidak suka padanya. Maka, menurut Informan 3;

> "Pada forum apapun ketika bertemu dengan publik, untuk bisa masuk kembali dalam arena rekrutmen, perempuan tidak boleh terlalu *baper* (dibaca terlalu terbawa perasaan), dikit-dikit sakit hati. Komentar-komentar kritis harus dinilai positif oleh kita. Masyarakat akan menilai respon kita *jugak*. Kita coba kritik kita ubah menjadi peluang untuk mencari pemecahan masalah untuk membangun, perempuan harus mau mendengar."

Informan 3, dalam berkomunikasi dengan konstituennya tidak selalu secara langsung melalui tatap muka. Dalam forum-forum, ia sadar mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi langsung dengan pemilihnya, karena tidak semuanya kadang bisa langsung dijawab perempuan. Melalui jejaring (staf/ tim suksesnya) informan dapat berkomunikasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat setiap saat. Menurut informan 3;

> "Media bagi saya, penting *banget*. Bahkan vital. Satu Dapil hampir 3,5 juta. Fisik kita satu, nggak mungkin kita ketemu dengan merek. Susah. Melalui media, perpanjangan dari saya dan tim menyampaikan visi misi kita dan alat silaturahmi kita yang bisa tidak tersentuh secara langsung." (wawancara 27 Maret 2018).

Pernyataan di atas juga diiyakan oleh informan 1 yang selama ini memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan eksistensi politiknya ke publik. Perempuan yang sudah sangat dipercaya oleh masyarakat pemilihnya, biasanya konstituen memiliki kedekatan fisik dan emosional. Bersama konstituen, misalnya perempuan sering memanfaatkan waktu dalam-forum-forum yang dilaksanakan. Disinilah selain perempuan mensosialisasikan ideologi, program-program kerja partai politik, mereka juga memiliki agenda pribadi untuk kemenangan politiknya.

Perempuan mengkondisikan arena di tengah konstituen dengan hegemoni, yang bertujuan agar dukungan konstituen selalu ada untuk mereka. Konstituen solid memberi dukungan pada mereka, misalnya melalui;

1) Isu-isu ke-perempuanan; biasanya informan ketika berhadapan dengan forum khusus perempuan, akan memposisikan diri berada di pihak perempuan. Seperti halnya ketika perempuan membahas masalah domestifikasi perempuan, hak reproduksi perempuan, perlindungan perempuan dalam dominasi, pengasuhan anak, hak politik perempuan, dan sebagainya. Isu ini besar kemungkinan tidak dipahami oleh kandidat laki-laki sebagai peluang meraih simpati konstituen perempuan.
2) Sikap dan perilaku yang ditampakkan perempuan pada panggung depan mereka berpolitik. Perempuan lembut, perhatian, peduli dengan masyarakat sekitarnya, perempuan selalu terbuka, mau mendengar masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat pemilihnya, merupakan modal sosial yang baik yang dapat mempengaruhi kepercayaan politik (*political trust*) konstituen. Ditambah dengan bantuan-bantuan ekonomi yang diberikan perempuan pada masyarakat di daerah pemilihan, adalah *soft power* perempuan untuk mengkondisikan masyarakat melalui hegemoni. Akibatnya, perempuan selalu memperoleh kemenangan di daerah pemilihannya, walaupun regulasi mengenai pemenangan dalam sistem pemilu sering berubah. Bahkan, ketika perempuan pindah partai politikpun, masyarakat pemilih akan tetap memilihnya dan perempuan tetap memenangkan Pemilu legislatif.

Dua poin di atas, diiyakan oleh Anang (51th) seorang legislator Partai Golkar. Menurutnya, dalam wawancara April 2019 bahwa sering sekali partai politik memberi kepercayaan pada perempuan kandidat legislatif secara penuh, karena perempuan memang dianggap mampu dan sudah teruji berhadapan dengan konstituen. Apalagi yang berkenaan dengan isu-isu yang berkenaan dengan kesejahteraan perempuan.

> "Bu Kusdilah itu, bisa dijadikan contoh untuk memperlihatkan betapa perempuan juga tidak dapat diabaikan ketika berpolitik. Beliau Ketua KPPG Jateng, Ketua HwK Jateng dan salah satu diantara Wakil Pengurus Harian. Soliditas konstituen dan loyalis Beliau di masyarakat luar biasa, yang sampai saat ini tidak bisa ditandingi. Dekat dengan konstituennya, karena kalau saya lihat hubungan politik dengan konstituen di daerah pemilihannya ini sudah sangat lama terjalin."

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam dinamika politik di Indonesia, hubungan perempuan (sebagai legislator) dengan konstituennya sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu yang berlaku. Pada sistem proporsional dimana calon ditempatkan pada daftar nomor urut, yang perempuan lakukan adalah mereka lebih responsif terhadap para pejabat partai yang menentukan dartar nomor urut. Sedangkan hubungan para kandidat dengan kontituennya dilakukan melalui partai politik. Diakui oleh informan 2, ini yang sering diabaikan oleh calon. Mereka biasanya tidak responsif terhadap konstituen mereka, mereka cenderung perduli dengan partai politik atau para elite partai politik yang menentukan nomor urut dan daerah pemilihan setiap calon.

Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, perempuan akan membangun hubungan langsung dengan konstituen, perempuan akan menanggapi semua keluh kesah dan persoalan yang dihadapi masyarakat sampai pada (dimungkinkan) persoalan pribadi. Perempuan menyadari kebutuhan-kebutuhan konstituennya yang dapat

terfasilitasi akan menjadi peluang yang lebih besar untuk mereka dalam arena rekrutmen legislatif.

f. Perempuan membutuhkan patron

Patron ini menjadi bagian penting dari relasi kuasa dalam partai politik atau dalam lingkup kehidupan perempuan dalam arena politik. Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan perempuan, diperoleh data bahwa perempuan memang mampu mandiri dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ia hadapi. Namun, perempuan sangat membutuhkan orang lain yang bisa ia percaya dalam menjalankan tugas mereka dalam berpolitik. Terdapat seseorang yang biasanya "melindungi" dan dianggapnya sebagai tempat bergantung. Orang-orang yang dapat menjadi patron bagi perempuan bisa berasal dari keluarga atau orang terdekat perempuan yang selalui melindungi mereka, tempat mereka berkeluh kesah dan dimintai saran atas persoalan yang mereka hadapi.

Beberapa diantara informan mengakui memperoleh akses yang mudah untuk terjun ke dunia politik karena jalur keluarga yang menjadi pengurus partai politik sebelumnya. Dari merekalah, perempuan mendapat pengaruh atas karier politik mereka, melalui modal yang diberikan, pengaruh yang memantapkan kedudukan perempuan dan sebagainya.

Selain itu, perempuan bisa saja bersandar pada orang lain seperti; ustad, kyai, elit atau petinggi partai yang oleh perempuan dipercaya memiliki kemampuan menjawab semua persoalan, memberi solusi pada masalah-masalah yang dialami. Patron sering

sekali dimanfaatkan oleh perempuan dan juga sebaliknya. Oleh perempuan, patron dimanfaatkan perempuan dalam tujuan menguatkan eksistensi politik, sosial dan ekonomi yang dapat memberi pengaruh yang besar pada posisi perempuan. Bersama dalam arahan, pendampingan patronnya perempuan akan mengalami proses transformasi yang baik. Seorang perempuan yang memiliki kedekatan politik dengan pengurus partai politik di tingkat pusat atau bahkan dengan Ketua Umum partainya, biasanya ia akan menjadikan mereka sebagai patron. Perempuan akan memperoleh akses terutama dalam berkomunikasi dengan patronnya, bahkan jaminan akan kelangsungan karier berpolitiknya juga ia peroleh.

Terhadap patronnya yang berasal dari elite partai, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan 1, perempuan akan sangat taat, konsisten dan menyerahkan dedikasi mereka sepenuhnya. Walaupun sistem pemilunya berbeda, konsistensi tindakan perempuan terhadap patron mereka dari DPP tetap tidak berubah. Jika dulu dengan sistem pemilu yang kemenangannya ditentukan oleh sistem nomor urut partai diberlakukan, perempuan harus menjalin komunikasi yang baik dengan para pejabat partai baik di DPC, DPD maupun pada DPP. Menjadikan mereka sebagai patron untuk kelangsungan karier politik mereka. Dengan sistem pemilu saat ini yang ditentukan kemenangannya pada suara terbanyak, perempuan juga harus memperhatikan hubungan/ relasi dengan pengurus partai politik. Walaupun mungkin agak berkurang untuk beberapa informan. Informan 2 misalnya; dia merasa tidak selalu bisa berkomunikasi secara langsung dengan elite partai tempatnya selama ini mengabdi. Dan informan 2 merasa tidak ada masalah, selama ini ketika jadi atau tidak

jadi dirinya tidak sepenuhnya ditentukan oleh elite partai. Namun, informan juga sangat berhati-hati bersikap, bertindak. Jangan sampai menyinggung perasaan individu para penentu kebijakan di DPC maupun DPP. Ia merasa tidak dimilikinya patron dari orang DPD atau DPP, memang sering membuat langkahnya dalam politik agak terganjal. Misalnya, keluhan-keluhannya tentang jabatan dalam fraksi yang tidak ia pegang walaupun ia adalah anggota DPRD yang paling lama (tiga periode). Yang terpenting, bagi informan 2 adalah hubungannya dengan para konstituen.

Berbeda dengan informan 1, 3, 4 dan 5 yang mengaku selama ini berkomunikasi baik dengan elite partai politik. Mereka menjelaskan pentingnya jalinan komunikasi dengan orang-orang "atas" (elite) di partai. Biasanya, segala akses informasi mengenai agenda partai politik akan dapat langsung perempuan dapatkan dan manfaatkan sebagai langkah politik dan agenda pribadi mereka.

Terhadap patronnya, dengan *soft power*nya perempuan juga mempengaruhi bahkan menghegemoni. Melalui sikap *manut*, taat, mengikuti saran patron sesungguhnya perempuan mempengaruhi patron yang merupakan "tempat berlindung"nya ini agar selalu bersedia menjadi patron, tetap melindungi dan memberi akses, sampai tidak disadari oleh patron, kelembutan sikap perempuan ini mampu menumbuhkan kepercayaan mereka (patron). Bahkan jika hubungan dengan patron ini saling menguntungkan, perempuan dapat menghegemoni patronnya sehingga ia dapat memperoleh kepercayaan, dimana setiap usul-usulnya akan diterima patron, sebagai pertimbangan kebijakan partai. Dengan kondisi di atas, perempuan merasa sangat aman, khususnya ketika berkiprah dalam partai politik karena ia didukung oleh

patronnya. Dan kondisi demikian, diketahui oleh pengurus partai politik yang lain dalam partai politik.

g. Kecenderungan perempuan lebih sensitif terhadap sesama perempuan dalam berpolitik

"Perempuan punya kecenderungan tidak mau dipimpin perempuan", kalimat terlontar dalam wawancara dengan informan 5 (wawancara tanggal 18 September 2018). Sebenarnya, tidak semua perempuan memiliki persepsi yang demikian. Namun, beberapa informan merasakan bahwa mereka merasa perlu menjaga jarak dengan perempuan lainnya dalam kehidupan berpolitik, agar bisa saling menghormati kepentingan masing-masing. Mengapa demikian? karena perempuan sering lebih fokus pada perasaannya ketika mereka menerima stimuli. Ini berbeda dengan para laki-laki yang cenderung pasif dalam menanggapi emosi-emosi yang negatif karena lebih berusaha untuk menganalisa stimuli dan akibat-akibat yang ditimbulkan.

Faktor lingkungan hidup perempuan juga memberi pengaruh. Dalam beberapa keluarga, perempuan dibesarkan dengan suasana dimana mereka diharapkan untuk selalu *care* (peduli) memikirkan kehidupan orang lain, peduli sesama dan melakukan pengorbanan. Realita ini umumnya akan membuat perempuan tumbuh menjadi mahkluk sosial yang emosional dan rentan. Sebaliknya, perempuan yang dibesarkan untuk lebih fokus pada kemajuan dan keberhasilan mereka sendiri cenderung kurang emosional dibandingkan dengan orang lain. Beberapa perempuan masih belum bisa menyelesaikan dirinya, egonya, bahkan pikiran-pikiran dan perasaan mereka yang ini menghalangi logika berfikir. Kalau dalam berpolitik, lazim yang menjadi fokus bagi perempuan

seharusnya hal-hal yang logis, seperti; bagaimana menarik simpati massa/ konstituen dengan eksistensi mereka yang ditunjukkan dengan kinerja, bersosialisasi, pengabdian di tengah masyarakat, dan sebagainya. Namun, sering ditemui perempuan ingin eksisistensi melalui penampilan, kecantikan wajah, cara berpakaian mereka dan lain-lain yang narsis. Nah, ketika perempuan politisi ini narsis, biasanya perempuan lainnya akan merasa tidak suka, merespon negatif terhadap koleganya. Bahkan jika terjadi konflik antara mereka, isu-isu tentang kehidupan pribadi akan menjadi pemantiknya.

Informan 3 memperjelas deskripsi di atas, berdasarkan pengalaman yang selama ini ia temui;

> "Kendala yang paling utama selain keluarga, budaya yang terbentuk, kendalanya kalau perempuan adalah temen perempuan, jadi sesama perempuan. Pada saat berorganisasi kadang perempuan, (walaupun) ya tidak semua tapi menjadi ini adalah kendala. Tidak bisa menerima orang lain lebih menonjol, lebih melihat *ngurusi* masalah pribadi, *ngritik-ngritik*. Pelan-pelan harus hilang. Makanya keluarnya agak susah karena *ngurusin* urusan orang lain, bukan kinerjanya." (Wawancara 27 Maret 2018).

Pola interaksi antar perempuan dalam berpolitik harus menjadi perhatian bagi perempuan yang masih punya masalah sendiri dengan sesama perempuan. Menurut informan 3, jika hal di atas belum beres maka tidak akan selesai. Karena perempuan ini biasanya akan mengajak teman-temannya untuk ikut membenci, dan alasannya sama akan menilai orang lain, urusan-urusan orang lain. Persoalan di atas harus dapat diatasi oleh perempuan dalam berpolitik, ketika mereka berinteraksi dengan orang lain maka harus lebih fokus pada kinerja mereka. Lebih lanjut, menurut informan 3;

> "Perempuan kalau maju, harus bisa ngurusi internalnya diri sendiri. Sehingga harus melihat kinerjanya, bukan *kenggosibannya*. Kalau saya, sepanjang seseorang itu kinerjanya bagus, saya menilainya dari kinerjanya. Kalau

kinerjanya bagus penampilannya kurang, maka saya akan bimbing". (Wawancara tanggal 27 Maret 2018).

Menurut informan 2, fenomena perempuan yang cenderung/ lebih sering memiliki masalah dengan perempuan lain, sering dimanfaatkan pihak lain, para politisi laki-laki yang juga merasa kepentingannya terganggu oleh politisi perempuan. Mereka (para politisi laki-laki) dalam partai politik yang merasa terganggu oleh eksistensi perempuan, akan mempengaruhi, memanfaatkan aktor perempuan politisi yang lain, untuk menghadapi, menyerang eksistensi perempuan tersebut. Yang dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan lainnya, biasanya adalah mereka memilih untuk menghindari urusan-urusan yang bersifat pribadi dengan sesama politisi perempuan.

h. Narsis menjadi hal penting bagi beberapa perempuan

Dimulai dari partai, perempuan mengawali karier politik mereka. Di partai politik, perempuan belajar tentang kehidupan ber-partai politik (tidak bicara mengenai seberapa lama waktu perempuan berkiprah dan berkontribusi terhadap partai politik, karena ditemukan data di Wonosobo bahwa dua perempuan yang duduk sebagai anggota perwakilan rakyat adalah kader partai yang keanggotaan partainya masih seumur jagung. Beberapa perempuan hadir secara tiba-tiba, mereka tidak begitu lama aktif dalam partai politik pengusungnya, dicalonkan, dan terpilih pada Pemilu 2014). Selain itu, seperti halnya kader dan anggota partai politik lainnya, perempuan mulai cakap dan belajar untuk memposisikan diri mereka. Pada masa penetapan kemenangan ditentukan oleh partai politik, perempuan berjuang untuk memperoleh kuasa dalam

menentukan diri mereka. Berjuang memperebutkan nomor urut calon yang ditentukan sepenuhnya oleh partai politik.

Banyak cara yang dilakukan oleh para aktor dalam ikhtiar mereka, namun berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan selama proses riset, apa yang dilakukan perempuan menarik untuk dilaporkan. Peneliti melihat ada hal yang menarik dalam habitus perempuan, yakni narsis dalam kehidupan politik perempuan. Dalam partai politik, selain dukungan dari pihak-pihak lain, perempuan juga berjuang untuk dirinya sendiri. Beberapa perempuan membuktikan dengan kinerja, memperlihatkan kapabilitas mereka melalui sumbangsih terhadap partai politik dan sebagian lain, mengambil cara lainnya. Kerja keras untuk partai politik, mengabdi untuk kebaikan partai politik tanpa *direpoti* dengan urusan-urusan privat dan domestik, menjadikan perempuan memperoleh kepercayaan dari pengurus partai lainnya (yang laki-laki). Perempuan bisa dan mau melaksanakan tugas partai seperti halnya pengurus lainnya. Sumbangsih terhadap partai ini juga diberikan perempuan dalam bentuk lainnya, dengan modal ekonomi yang mereka miliki untuk kepentingan partai politik.

Di lapangan ditemui data mengenai beberapa perempuan yang memberi kontribusi ke partai politik dalam bentuk uang, barang-barang untuk menyelenggarakan kegiatan dalam partai politik. Adakalanya, pembiayaan dalam partai politik memang sangat terbatas. Dan biasanya, posisi mereka (termasuk perempuan) yang memberi donasi kepada partai dalam bentuk seperti ini akan sangat diperhitungkan keberadaannya dalam partai politik, didengarkan apa yang dikatakannya dan dipertimbangkan apa yang menjadi usulannya. Pada kondisi lain, perempuan lebih

mengedepankan harmoni dalam kehidupannya, menanggapi segala persoalan dengan tenang dan menyelesaikan masalahnya, serangan dari pihak lain tanpa emosi, sifatnya yang lembut dan tegas dalam partai menjadikan mereka mampu memperoleh posisi dan kepercayaan dalam partai politiknya. Tidak dielakkan lagi, perempuan dapat mempengaruhi kebijakan partai politik bahkan menjadi aktor penentu daftar urutan calon dalam partai politik.

Perubahan regulasi sejak Putusan MK mengenai penentuan kemenangan calon berdasarkan suara terbanyak, mengharuskan semua pihak berganti haluan dan strategi pemenangan. Selain bekerja keras untuk partai, perempuan berusaha mencari dukungan konstituen secara langsung dalam masyarakat daerah pemilihan mereka. Seperti terurai dalam hasil penelitian di atas, tidak mudah bagi perempuan mengambil hati masyarakat patriarki Jawa Tengah. Untuk meyakinkan konstituennya, perempuan menciptakan komunikasi dua arah dengan konstituen mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam jalinan komunikasi, tidak jarang perempuan menunjukkan eksistensi mereka, perempuan mewacanakan diri mereka di hadapan publik, tidak jarang ia bergaya narsis agar publik lebih familier dan mengenal mereka.

Konsep narsis, awalnya diusung oleh Beauvoir sebagai hasil dari ke-*liyan*-an perempuan. Perempuan yang selama hidupnya merasa putus asa sebagai subjek (karena ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk mendefinisikan diri atau melalui kegiatan feminimnya) merasa tidaklah puas. Ketidakmampuan mereka memberikan kepuasan bagi dirinya (melalui proyek dan tujuannya), perempuan dipaksa untuk menemukan realitasnya dalam imanensinya sebagai seorang manusia. Kemudian,

perempuan menjadikan dirinya menjadi sangat penting, karena tidak ada objek penting yang diaksesnya. Perempuan menjadi objek pentingnya sendiri, serta mempercayai dirinya sebagai suatu objek (keyakinan yang ditegaskan kebanyakan orang sekitarnya) perempuan terpesona oleh, dan bahkan mungkin menjadi obsesif terhadap citranya sendiri yakni oleh wajah, tubuh dan pakaiannya. Kesadaran informan terhadap konsep narsis yang negatif, juga telah dimiliki. Namun, bergaya mencitrakan diri hari ini sangat penting bagi kandidat perempuan agar mereka dikenal publik seiring dengan perkembangan media sosial dengan cara mengunggah foto, kalimat-kalimat yang diunggah dan biodata mereka.

Konsep narsis ini, dalam perkembangannya tidak semata muncul karena hal yang digambarkan oleh Beauvoir saja. Ada pergeseran pemahaman perempuan dan publik mengenai konsep narsis. Yang penting tidak berlebihan dalam mencitrakan diri. Wawancara mendalam dengan para informan, dalam proses menuju rekrutmen legislatif segala sumber daya dikerahkan sebagai modal perempuan. Modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik perempuan yang berupa pencitraan perempuan sebagai sosok yang layak mendapat kepercayaan masyarakat dioptimalkan. Bahkan dalam upaya pencitraan ini, beberapa perempuan sangat memperhatikan penampilan; wajah (kecantikan), tubuh mereka serta pakaian yang dikenakan ketika menampilkan kegiatan politik sebagai panggung depan mereka di depan publik/ masyarakat luas. Narsis dilakukan perempuan dalam proses membentuk wacana diri. Menurut Informan 2, dalam wawancara menjelaskan…

> ”apapun namanya, perempuan harus menunjukkan kepada publik, masyarakat mengenai dirinya. Layak atau tidaknya kita dipilih, masyarakat khan harus mengenal

kita, apalagi saya dengan daerah pemilihan yang cukup besar konstituennya. Masyarakat harus tahu, dan yakini kenapa kita dipilih. (wawancara Februari 2018)"

Pernyataan di atas, juga dapat dibuktikan dengan melihat keaktifan informan 2, informan 1, dalam media sosial. Narsis dipandang penting oleh perempuan untuk memperlihatkan ke publik bahwa perempuan siap, memiliki percaya diri dalam arena politik. Menjaga penampilan, pakaian yang rapi dan elegan, merawat wajah agar menarik mejadi penunjang performan perempuan selain kinerja, kecerdasan intelektual dan sosial mereka. Bahkan, tidak jarang dorongan untuk bergaya narsis ini dibiasakan oleh perempuan, menjadi habituasi perempuan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Menurut beberapa informan perempuan, di depan publik harus menarik, enak untuk dilihat, bicaranya menarik, bahasa tubuhnya dan itu dijaga kerena diperlukan. Berdasarkan pengamatan peneliti, mengikuti perempuan dengan berbagai aktifitasnya di tengah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, memperlihatkan perempuan-perempuan informan sangat menjaga penampilan mereka, cara berpakaian mereka, bahasa tubuh mereka juga terjaga. Tidak jarang, mereka juga mengunggah foto-foto yang tidak hanya menampilkan kegiatan politik mereka dalam akun pribadi di media sosial, tapi juga foto-foto pribadi informan (walaupun disadari peneliti, ini sangat subjektif). Beberapa baliho, kalender yang dipasang dalam kampanye juga selalu ditampilkan foto-foto calon perempuan yang cantik untuk menarik perhatian massa. Walaupun, menurut Informan 1, kompetensi yang berupa kecerdasan, kepabilitas, dan kemampuan yang ada pada diri perempuan juga menjadi hal yang penting bagi perempuan.

Pada situasi lain di Jawa Tengah, beberapa perempuan mencoba “peruntungan” masuk ke dunia politik yang salah satunya didorong modal diri mereka yang cantik, menarik di depan publik, selain modal yang lain. Sedangkan beberapa perempuan yang lain, tidak begitu menganggap pola komunikasi harus dengan modal di atas. Namun, pertimbangan beberapa informan dalam wawancara bahwa tidak semua kandidat dikenal langsung oleh masyarakat, maka bukan menjadi hal yang aneh, dianggap lazim dalam masyarakat jika dalam media sosial, dan lain-lain perempuan kemudian terkesan narsis pada dirinya.

Perempuan memperkenalkan dirinya agar dikenal publik dengan memperlihatkan kecantikan mereka, gaya berbusana mereka, dan sebagainya. Partai politik pengusung juga merasa diuntungkan jika terdapat calon perempuan yang demikian, karena ini kiat sukses dan instan meraih dukungan konstituen terhadap calon legislatif yang diusung partai politik. Dalam konteks ini, perempuan memperoleh kekuasaannya dan mampu menunjukkan pengaruhnya dalam partai politik ketika mereka memperoleh dukungan dari konstituen yang besar dan menjadi keuntungan bagi partai politik.

Di atas, pembahasan mengenai persepsi dan tindakan perempuan telah dideskripsikan. Tabel berikut adalah rangkuman dari uraian di atas.

Tabel 4.6. Ikhtisar Persepsi dan Pilihan Tindakan Perempuan

No	Persepsi	Pilihan Tindakan Perempuan
1.	Politik bukan semata kekuasaan dan bukan arena dominasi yang perlu ditakuti.	Memiliki visi dan misi personal dalam menghadapi rekrutmen legislatif serta dalam menjalankan tugas sebagai legislatif. Menghindari dominasi dalam berpolitik,

		mengarahkan tim sukses untuk menghindari dominasi. Menanggapi dominasi simbolik dan dominasi verbal terhadapnya dengan kepala dingin. Selalu berusaha menekan emosi di depan orang lain (bahkan bawahan/ stafnya) Mengedepankan cara-cara yang baik terhormat, dan humanis dalam berpolitik.
2.	Jalan tengah antara nilai-nilai budaya patriarki dengan hak politik perempuan.	Fokus pada dua peran mereka, yakni sebagai politisi dan sekaligus sebagai ibu dalam rumah tangganya Mengedepankan harmoni dan memanfaatkan keharmonisan keluarganya untuk menarik simpati publik.
3.	Setiap perempuan mampu melewati proses rekrutmen.	Percaya diri, mempersiapkan diri dengan maksimal dalam menghadapi Pemilu, terutama pada proses rekrutmen legislatif. Merumuskan dan melaksanakan strategi yang handal dalam arena rekrutmen legislatif.
4.	Menghindari permusuhan dan perdebatan	Lebih banyak diam, mengalah dan menyelesaikan masalah atau persoalan dengan orang lain dengan cara yang lebih tenang, walaupun sering sekali perempuan emosi ketika merasa ditindas. Rasa memaafkan perempuan sangat kuat ketika perempuan berhadapan dengan masalah. Emosi yang stabil, tenang ketika mengahadi masalah di depan publik.
5.	Perempuan membutuhkan patron	Bergantung pada patron yang ia anggap bisa menyelesaikan semua masalahnya. Solid, setia pada patron yang dianggap bisa mengamankan kedudukannya dalam partai politik.
6.	Pentingnya hubungan yang baik dengan konstituen	Berkomunikasi secara intens dengan konstituen Terbuka dan ramah. Mau mendengarkan, ikut berusaha memecahkan persoalan konstituen. Sensitif/ peka terhadap isu dan persoalan dalam masyarakat pemilihnya. Mengenali dan memahami masing-masing karakter kelompok masyarakat. Peduli dengan kondisi masyarakat pemilih. Membentuk jejaring (memupuk modal sosial).

		Bersikap terbuka dengan media massa (Peran media dikendalikan untuk membangun efek sensasi guna menjaga simpati massa terhadapnya). Menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang dalam pemerintahan.
7.	Lebih sensitif terhadap sesama perempuan dalam berpolitik.	Menjaga jarak (lebih berhati-hati) dengan perempuan lain ketika berpolitik. Tidak mau dipimpin oleh sesama perempuan Menghindari urusan-urusan yang bersifat pribadi dengan sesama politisi perempuan.
8.	Narsis menjadi hal yang penting bagi beberapa perempuan	Berpenampilan menarik, cantik di hadapan publik, sekaligus memperlihatkan kecerdasan, kapabilitas mereka dalam dunia politik. Memperlihatkan kepada publik beberapa aktifitas dan kegiatannya melalui media sosial

Sumber: data primer diolah (2018)

Persepsi perempuan yang kemudian menjadi dasar pilihan-pilihan tindakan mereka, berlangsung terus dan tidak disadari. Habitus tidak menentukan pikiran dan pilihan tindakan dari perempuan, tapi apa yang menjadi pilihan tindakan perempuan, dapat dijadikan sebagai modal sosial dan kultural bagi perempuan di hadapan masyarakat pemilihnya. Demikian dalam wawancara terhadap konstituen, mereka mengakui bahwa mereka membutuhkan para wakil yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, rasa percaya diri, terbuka/ membuka diri dan berpengetahuan.

4.2.3. Analisis Perempuan Sebagai Agen dalam Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah

Penelitian terhadap informan perempuan yang telah memenangkan beberapa periode Pemilu seperti yang telah dijelaskan di atas, memperlihatkan bahwa sesungguhnya agen perempuan mampu melewati rintangan dan tantangan dalam proses

rekrutmen pemilihan legislatif di Jawa Tengah. Perempuan mampu memperoleh kemenangan berpolitik di tengah himpitan budaya patriarki, regulasi yang sering berubah, dinamika partai politik, bahkan dalam menghadapi perubahan daerah pemilihan oleh partai politik.

Rekrutmen legislatif, yang dilaksanakan dalam dua fase yakni rekrutmen oleh partai politik dan fase pemilihan langsung oleh konstituen, dapat dilalui oleh perempuan dengan baik. Perempuan dalam meraih kemenangannya, tidak bisa lepas dari strukturnya. Hal yang juga dijelaskan oleh Giddens (2010:9) bahwa seorang agen selalu berkaitan dengan strukturnya. Alasan-alasan seorang agen (dalam hal ini) perempuan, akan merujuk pada dasar-dasar tindakannya. Sedangkan motivasi, tidak dibatasi langsung oleh kesinambungan tindakan-tindakan seperti halnya monitoring refleksi atau rasionalisasinya. Agen yang dimaksudkan adalah pelaku, yang pada strukturasi, ia dianggap sebagai "orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Sedangkan struktur sendiri telah didefinisikan sebagai aturan dan sumber daya yang digunakan oleh agen dalam interaksi (Giddens, 2003). Disinilah, Gidden menjelaskan bahwa tindakan agen diperkuat dengan adanya pemahaman terhadap strukturnya, moralitasnya dan kekuasaan.

Struktur dalam kajian Giddens ini dimaknai sebagai aturan-aturan yang mengatur. Data hasil riset, aturan ini kemudian dimaknai sebagai regulasi-regulasi politik yang mengatur tentang keberadaan perempuan, khususnya dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Demikian dengan keagenan itu sendiri, adalah kapasitas individu untuk bertindak lain. Individu bukanlah si dungu (sama sekali tidak

memahami) terhadap aturan, bahwa individu ‘punya keagenan’ dalam arti sempit spesifik menjadi aktif dalam berhubungan dengan norma dan aturan dan bukan cuma tunduk begitu saja.

Kenyataan di lapangan, ditemukan kondisi dimana perempuan informan selalu mampu beradaptasi dalam arenanya. Polanya, menurut Giddens adalah pola sistem sosial atau struktur masyarakat yang dipersoalkan dan dengan mengacu pada sistem atau struktur itu, tempat aturan dan norma ditata mengelilingi status-status untuk membentuk lembaga-lembaga sosial, tindakan dapat dimengerti dan dijelaskan (Ritzer & Smart, 2015: 689). Perempuan sebagai agensi, mampu mengambil tindakan-tindakan untuk bisa menyesuaikan diri dalam arena rekrutmen legislatif yang ada selama ini.

Perempuan sebagai agen atau aktor dalam meraih keinginannya untuk masuk dalam politik untuk memperoleh kekuasaan, tidak lepas dari habitus mereka. Sebagaimana Bourdieu jelaskan bahwa habitus adalah ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari oleh perempuan), yang tidak bisa terlepas dari ranah/ arena. Ranah yakni budaya masyarakat patriarki, regulasi afirmasi, kepentingan-kepentingan partai politik dan sebagainya yang terjadi di Jawa Tengah yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, sangat menentukan perjuangan perempuan dengan kondisi, keadaan mereka masing-masing, mengingat dalam masyarakat sangat terdifferiasi dalam lingkup-lingkup hubungan objektif yang memiliki kekhasan masing-masing. Misalnya, pencapaian kemenangan informan berbeda satu dengan lainnya. Pengalaman mereka berinteraksi dengan ranah yang berbeda, membawa proses yang berbeda satu dengan yang lainnya. Diantara mereka,

ada yang memperoleh kemenangan selama ini dengan cara yang begitu mudah, jalan yang mulus tanpa hambatan berarti karena dukungan keluarga yang sangat luar biasa. Juga ada yang menggapai keberhasilan pada setiap periode Pemilu dengan sangat berat, penuh dengan halangan dan hambatan. Perempuan harus berhadapan dengan berbagai persoalan dalam arenanya yang berasal dari partai politik, maupun dari lawan politik mereka. Sedangkan modal budaya, sosial dan simbolik memberi pengaruh terhadap struktur yang ada dalam ranah dan habitus perempuan.

Deskripsi data dalam penelitian mengenai habitus informan perempuan yang telah memenangkan beberapa periode Pemilu legislatif di Jawa Tengah telah disajikan dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya. Habitus agen/ aktor perempuan dalam menghadapi proses rekrutmen legislatif, dipengaruhi oleh persepsi perempuan yang telah terbentuk dan dipengaruhi oleh banyak hal, yakni; pengalaman-pengalaman yang dialami mereka dalam dunia sosial, aktifitas-aktifitas fisik perempuan yang kemudian membentuk persepsi perempuan dan menjadi pola-pola tindakan. Sebagaimana yang Bourdieu jelaskan, habitus merupakan skema dan sistem persepsi, apresiasi dan tindakan yang dilakukan aktor yang berasal dari institusi sosial, suatu *socialized subjectivity* (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Dari sinilah, kemudian tereksplorasi bahwa skema persepsi, yang muncul berawal dari struktur kognitif perempuan, ini tidak serta merta muncul secara tiba-tiba oleh perempuan, namun dipengaruhi oleh sekeliling perempuan.

Jean Piaget dengan teorinya mengenai kognitif individu, menjelaskan bahwa kognisi meliputi aspek-aspek struktur intelek yang oleh masing-masing individu

digunakan untuk mengetahui sesuatu. Kognitif inilah yang membentuk persepsi seseorang, termasuk perempuan. Piaget mendeskripsikan tentang perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme (individu), bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi diantara keduanya. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu; kematangan biologis, pengalaman dan interaksi sosial, aktifitas fisik, dan adanya ekuilibrasi atau penyeimbangan (Mulyasa, 2008:108).

Banyak faktor yang mempengaruhi struktur kognitif perempuan, seperti budaya patriarki, pola didik keluarga, agama dan kepercayaan yang dipercayai, partai politik, dan organisasi masyarakat, semua membentuk pemahaman dan persepsi perempuan. Watak, nilai-nilai, bentuk pemahaman informan perempuan yang kemudian merembes, mengorganisir diri sehingga mereka tidak menyadari. Perilaku perempuan ini selanjutnya terlihat sebagai kemampuan alamiah. Semua perilaku ini dipengaruhi oleh pengalaman perempuan, hasil dari stimulus yang diterima oleh perempuan dari pihak luar dalam arena tempatnya bereksistensi.

Kondisi ini, menumbuhkan habituasi yang berbeda dari masing-masing agen. Setiap agen/ aktor memiliki persepsi yang dipengaruhi oleh banyak faktor di luar perempuan. Keluarga tempat perempuan tumbuh dan berinteraksi melalui nilai-nilai yang diyakini, budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat, agama yang dianut oleh perempuan, organisasi masyarakat dan partai politik tempat perempuan aktif dan memulai karier politik mereka dan regulasi yang selama ini memberi *affirmative action* untuk keterlibatan perempuan.

Struktur kognitif pengetahuan, bisa dijadikan sebagai landasan untuk memahami suatu kejadian dalam lingkungan sekitar perempuan, yang kemudian menumbuhkan persepsi bagi perempuan. Persepsi adalah aktifitas mengindera, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun objek sosial. Penginderaan ini, tergantung pada stimulus fisik dan sosial yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi agen ini merupakan sikap dalam menilai situasi atau lingkungannya yang dipengaruhi oleh suatu kondisi fisik dan sosial.

Persepsi dan pilihan tindakan perempuan yang terungkap sebagai hasil penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen legislatif yakni; perempuan menganggap bahwa politik bukan semata kekuasaan dan bukan arena dominasi yang perlu ditakuti; perempuan cukup "bersahabat" dengan nilai-nilai patriarki dalam masyarakat, dan memperjuangkan hak-haknya berpolitik; perempuan membutuhkan patron; perempuan semakin memiliki kepercayaan diri mengikuti proses rekrutmen legislatif; lebih sensitif terhadap sesama perempuan dalam berpolitik; memiliki hubungan yang baik dengan konstituen; perempuan ingin membangun wacana dirinya dengan narsis.

Persepsi ini, dipahami dan diyakini oleh perempuan sampai secara tidak sadar merembes menjadi pola-pola tindakan perempuan dalam berpolitik, khususnya pada saat menghadapi proses rekrutmen legislatif yang sedang mereka lalui. Karena pola ini terjadi berulang oleh para aktor, agen maka sering sekali ini tidak disadari oleh masing-masing. Misalnya, terlihat dari bagaimana aktor selalu bersikap tenang dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan, masalah yang menghadangnya dalam politik.

Kemudian, juga tampak dari perempuan yang selalu memperhatikan penampilan mereka dalam keseharian, terutama saat berhadapan dengan publik, dan kebiasaan mengunggah foto-foto diri mereka baik saat berkegiatan politik maupun foto-foto pribadi yang menurut perempuan ini adalah bagian dari mewacanakan diri mereka di hadapan publik.

Struktur kognitif yang dimiliki perempuan, kemudian mengarahkan perempuan ke dalam pilihan-pilihan tindakan yang mereka jalani. Berjalan, berlangsung lama dan kemudian tidak disadari oleh perempuan. Desakan, tekanan yang dialami perempuan sebagai pengalaman politiknya, membawa pada pembiasaan mereka sebagai pribadi yang kuat, memiliki kapabilitas yang baik, dan siap menghadapi arena rekrutmen yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Proses habituasi terjadi melalui sekumpulan skema yang telah terinternalisasi sehingga manusia dapat memahami, mengerti, menghargai dan mengevaluasi realitas sosialnya. Makna habitus dapat dilihat dari peran tertentu yang selalu dilekatkan pada perempuan. Misalnya, perempuan hanya berurusan dengan urusan domestik, struktur objektif inilah yang kemudian menjadi skema dan kerangka berfikir perempuan dalam menafsir realitas.

Bourdieu menjelaskan, habitus seseorang akan terbentuk mulai dari terjadinya proses dialektika. Dialektika antara perempuan dan lingkungannya, pengalaman-pengalamannya dalam suatu fenomena. Bagaimana hak-hak dan kewajiban perempuan, dan realitas sosial tentang habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh orang untuk berhubungan dengan dunia sosial (Bourdieu, 1989: 18). Proses

dialektika ini kemudian menumbuhkan perilaku-perilaku atau tindakan politik perempuan, yang dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, idealisme, dan kehendak hati perempuan, dan beberapa hal lainnya.

Kemampuan perempuan beradaptasi ke dalam dunia politik --yang diklaim sebagai arena yang maskulin--, dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor yang terjadi di sekeliling mereka. Individu bukanlah agen yang sepenuhnya bebas dan bukan produk pasif dari struktur sosial, demikian menurut Bourdieu. Temuan penelitian menujukkan, bahwa perempuan beradaptasi dengan struktur dalam arena yang dinamis. Ini dilihat dari persepsi dan pilihan-pilihan tindakan perempuan yang lebih luwes, *soft* dalam menghadapi tekanan budaya patriarki. Walaupun dipengaruhi oleh strukturnya, namun agen perempuanlah yang menentukan tindakannya. Seperti Ritzer dan Smart menjelaskan bahwa struktur sosial tidak berfungsi sebagai penentu atau bahkan sebagai sebab bagi sebuah tindakan yang diambil agen. Struktur sosial tidak ‘membuat’ agen-agen aktif yang membuat struktur tersebut cenderung melakukan sesuatu hal (2015: 692). Perempuan sendirilah yang memutuskan tindakan apapun, dan mereka yang memutuskan untuk memanfaatkan struktur atau tidak. Sehingga mewujudkan “keagenan” mereka yang menyusun ulang struktur lewat tindakan mereka dan menjamin keberadaan struktur terus berlanjut. kapasitas individu untuk bertindak lain. Individu bukanlah sosok yang tidak memahami aturan, bahwa individu ‘punya keagenan’ dalam arti sempit spesifik menjadi aktif dalam berhubungan dengan norma dan aturan dan bukan cuma tunduk begitu saja.

Keagenan dalam arti luas adalah kekuasaan individu untuk turut campur dalam arus peristiwa yang berlangsung terus menerus dan membuat perubahan di dalamnya, kekuasaan individu untuk 'bertindak dengan cara tertentu'. Agen seharusnya mampu untuk bertindak dengan cara yang berbeda. Perempuan dengan konstruksi ideal dalam habituasi mereka berpolitik di Jawa Tengah, khususnya pada proses rekrutmen legislatif membawa dampak terhadap arena politik yang ada di sekelilingnya. Para agen perempuan berpolitik yang sudah beberapa kali memenangkan Pemilu legislatif di Jawa Tengah, berjuang memperoleh kemenangan dengan pilihan tindakan mereka yang tidak kaku, tidak frontal dalam menghadapi setiap tekanan, khususnya yang muncul karena adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Perempuan mengambil jalan tengah, dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka, tidak seperti para feminis liberal atau feminis radikal yang secara frontal memperjuangkan kesetaraan dalam setiap lini kehidupan perempuan.

Hal ini wajar, karena budaya masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat masyarakat dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan konstruksi sosialnya juga mempengaruhi dalam proses pemilihan. Kemenangan perempuan masih sangat tergantung pada relasi sosial yang mereka jalani. Perempuan masih harus memperhatikan tugas-tugas domestik mereka, harus menjalankan peran-peran mereka dalam rumah tangga dan masih muncul sebagai sosok yang terkonstruksi dapat menjaga keharmonisan keluarganya, jauh dari penilaian-penilaian negatif dalam masyarakat.

Habitus perempuan yang terkonstruksi sebagai habitus berpolitik ideal, merupakan modal bagi perempuan. Lingkungan, struktur, hubungan interaksi, relasi, budaya, tatanan/ regulasi yang terjadi di luar perempuan, juga menjadi bagian penting dari upaya dan perjuangan perempuan memperebutkan sumber daya, modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang berkaitan dengan sumber kekuasaan. Habitus perempuan dalam interaksinya dengan arena, memunculkan doxa baru.

Jadi, konsepsi habitus perempuan Jawa Tengah dalam riset ini menunjukkan bahwa perempuan di Jawa Tengah ini tidak frontal berpikir, bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan kesetaraan politik yang ia ingin peroleh. Tidak seperti yang digambarkan oleh kaum feminisme di Barat yang sangat keras dan ekstrim menolak segala hal yang menyebabkan kesenjangan yang menyudutkan perempuan. Sebaliknya, perempuan di Jawa Tengah menanggapi budaya patriarkhi dengan *soft*, cenderung fleksibel dan menyesuaikan diri dengan apa yang sudah dikonstruksikan dalam masyarakat. Perempuan bergerak pelan memperjuangkan posisi politik mereka, dengan tetap beradaptasi dengan arena yeng sewaktu-waktu menyudutkan posisinya.

4.2.4. Analisis Interaksi Arena-Habitus Perempuan: Munculnya *New Doxa* (Doksa Baru)

Perjuangan perempuan dalam arena, ditopang oleh kepemilikan modal, dan habitus yang mendukung perjuangan mereka dalam arena rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Seperti halnya Bourdieu menyatakan bahwa teori praktik sosial dengan persamaan (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Penjelasan yang tampak dari persamaan tersebut, bahwa terjadi relasi antara agen atau aktor dan struktur yang

terjalin secara dialektik yang masing-masing saling mempengaruhi dan memediasi, saling bertautan dalam praktik sosial. Praktik sosial yang dimaksudkan terlihat dalam permainan politik pada rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.

Dianalogikan sebagai suatu permainan, demikian hubungan antara agen dan arena digambarkan, dimana alam semesta diibaratkan sebagai suatu bidang permainan, yang tidak semua hal dapat terjadi. Ketika masuk dalam permainan, sadar maupun tidak sadar para pemain atau agen/ aktor juga harus memahami aturan permainan, mereka harus menggunakan indra, rasa dan logika atas permainan, yang dinamakan oleh Giddens sebagai kesadaran praktis. Kompetensi dan penguasaan permainan ini, dianalogkan dengan habitus. Ranah sendiri dimaknai sebagai kekuatan yang secara parsial bersifat otonom, di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi. Perjuangan ini dipandang mentransformasi atau mempertahankan ranah kekuatan setiap agen, demikian apa yang menjadi pendapat Bourdieu.

Aktor atau agen perempuan tidak dapat melepaskan diri dari arena mereka. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa perempuan tidak bisa mengabaikan struktur/ arena yang ada di sekeliling mereka ketika mereka memikirkan, mengkonstruksi dan memersepikan objek dan fenomena politik. Sebagai aktor, perempuan dalam mengkonstruksi suatu fenomena politik dilandaskan pada arena sekitarnya yang berupa ruang maupun non ruang, yakni konstruksi-konstruksi sosial. Aktor perempuan dalam mempresepsikan suatu hal sangat terpengaruh oleh budaya patriarki yang mencengkeram dengan konstruksi yang *hegemonic masculinity* dengan nilai-nilai kelaki-lakian yang sangat dominan.

Habitus diproduksi dan memproduksi dunia sosial, sistem skema yang menghasilkan praksis, juga sistem persepsi dan apresiasi terhadap praksis yang dengannya aktor melakukan klasifikasi. Habitus selalu beradaptasi terhadap dinamika realitas sosial. Realitas sosial perempuan yang dipengaruhi oleh arena yang ada dan terjadi di sekeliling perempuan. Inilah yang oleh Bourdieu disebutkan bahwa habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Maksudnya, disatu pihak habitus merupakan "struktur yang menyusun dunia sosial", dan di pihak lain habitus ini adalah "struktur yang tersusun oleh dunia sosial".

Bourdieu menjelaskan fenomena ini sebagai dialektika internalisasi atas eksternalisasi dan eksternalisasi atas internalitas. Atau, habitus merupakan struktur kognitif yang memediasi individu (internal) dengan realitas sosial (eksternal) yang menjadi perantara individu dengan kolektivitas. Dunia perempuan Jawa Tengah, masih tidak bisa lekang dari budaya patriarki, yang oleh para Feminis Radikal dilihat sebagai sistem yang rentan dengan adanya struktur penindasan. Setiap institusi dan setiap struktur masyarakat yang paling mendasar, terdapat sistem penindasan dimana orang tertentu mendominasi orang lain, dan struktur penindasan paling mendasar terdapat dalam sistem patriarki, penindasan laki-laki atas perempuan. Kemudian, oleh Bressler juga ditegaskan bahwa budaya patriarki membatasi ruang gerak perempuan, karena dalam kultur patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial (Ritzer & Goodman, 2004: 432). Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi habitus perempuan.

Persamaan (Habitus perempuan x Modal perempuan) + Ranah dalam bahasan Bourdieu yang dianalogkan sebagai Praktik dalam hasil penelitian, tidak hanya dipengaruhi oleh tiga hal tersebut di atas. Terjadi beberapa hal berkenaan dengan perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Interaksi antara habitus, modal dan arena, memunculkan *distinction* perempuan, yang menimbulkan pembeda perempuan dengan kandidat lain. Membedakan perempuan dengan *the others* dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.

Keberhasilan perempuan, dipengaruhi oleh kemampuan perempuan membentuk struktur kognitif mereka yang keluar dari perspektif yang lekat dengan konstruksi patriarki. Konstruksi masyarakat Jawa Tengah mengenai perempuan yang telah lama berlangsung dipengaruhi oleh atmosfir budaya patriarki dan faktor lainnya memunculkan pemahaman bahwa perempuan menjadi sosok yang tidak cakap dalam dunia politik. Pemahaman ini terkonstruksi lama dalam masyarakat Jawa Tengah, yang oleh masyarakat Pantura dikatakan sebagai kepatutan atau *umume ngono* (keumuman).

Masyarakat mengkonstruksi bahwa perempuan memiliki keterbatasan ketika mereka harus berpolitik, menjalankan peran domestik sekaligus peran publik mereka. Konstruksi yang dipercaya dan dianggap sebagai suatu yang lazim, biasa dan umum dalam masyarakat ini, sedikit banyak juga mempengaruhi struktur kognitif perempuan. Inilah yang disebut doxa, dan untuk memenangkan pemilihan, perempuan harus keluar dari *doxa* semesta (dari yang tidak diperdebatkan/*universe of undiscouse/ undisputed*). Doxa yang selama ini berisi wacana yang bersifat mutlak benar, tidak dapat diganggu

gugat dalam peradaban masyarakat bahkan tidak dapat didiskusikan, diantaranya; konstruksi perempuan dalam masyarakat patriarki dan arena politik yang maskulin.

Arena sebagai tempat para agen berjuang, tempat pertarungan (Bourdieu dan Wcquant, 1992:25), dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan. Selalu ada dua kekuatan yang saling kontradiktif, yakni kelompok yang menginginkan perubahan dan ada yang menginginkan agar tatanan tetap terjaga. Perempuan melalui heterodoxy, melakukan tindakan menggugat keabsahan doxa yang ada selama ini ada dan berkembang dalam masyarakat. Heterodoxy ini muncul sebagai suatu proses menyimpang dari praktik kebiasaan, yang utamanya dipicu oleh regulasi dan kehendak dari perempuan. Perempuan dengan segala habitus, kemampuan, kapabilitas diri dan modal dalam proses rekrutmen legislatif, menggugat doxa yang selama ini menjadi kepercayaan, pemahaman yang tidak terbantahkan. Struktur kognitif yang ada pada perempuan "membangun" kesadaran perempuan menjadi agen yang percaya diri berpolitik, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka menghadapi persoalan dan tekanan dalam politik. Perempuan melalui habitusnya, menunjukkan kemampuannya keluar dari doxa, yakni nilai-nilai wacana yang bersifat mutlak benar, tidak dapat diganggu gugat bahkan tidak dapat didiskusikan atau menjadi diskursus.

Temuan di lapangan yang memperlihatkan adanya habitus perempuan yang terbentuk berdasarkan konstruksi kognitif perempuan sudah menjadi kebiasaan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik, maka terjadilah kebiasaan ini, yang kemudian menjadi suatu disposisi yang terstruktur, dan menjadi kesadaran serta sikap yang tertanam dalam dirinya.

Pada tahap berikutnya, kebiasaan ini berfungsi sebagai dasar yang memunculkan dan memberi bentuk kepada persepsi, presentasi dan tindakan seseorang sebagai akibat dari proses yang telah ditumbuhkembangkan, maka tindakan lain yang berkaitan dengan kebiasaan itu akan berdasarkan oleh atau disesuaikan hal tersebut. Hal-hal itu akan dilakukan secara terpola, teratur, spontan (kadang tidak disadari oleh perempuan) dan menghasilkan pada tujuan dan hasil tindakan tertentu. Apalagi, perempuan dalam arena selama ini sangat terbantu oleh afirmasi yang ditegaskan dalam regulasi yakni pada Undang- Undang Pemilu, dan peraturan KPU.

Tidak dipungkiri, pergulatan antara opini yang bertujuan untuk memperkuat atau mengembalikan posisi prima dari kebenaran mutlak doxa yang disebut sebagai ortodoxy dengan heterodoxy (opini yang bertujuan menggugat keabsahan doxa) pun terjadi. Disinilah proses dialektif dengan diskursus yang memunculkan ranah opini, terjadi krisis yang "merusak" kesesuaian yang sebelumnya ada antara subjektif agen (habitus) dengan struktur objektif arena.

Masyarakat mengalami "kerusakan" yang disebabkan oleh adanya krisis karena "*universe of undiscouse/ undisputed"* berhadapan dengan diskursus yang menyebabkan ketidaksesuaian antara subjektif agen (habitus) dengan struktur objektif arena. Pertarungan simbolik ini mencapai klimaks ketika heterodoxy kemudian menjadi doxa yang baru, sehingga orthodoxypun kemudian menjadi heterodoxy. Memunculkan kesadaran dalam masyarakat bahwa tidak selamanya wacana dominan yang terkonstruksi dalam masyarakat Jawa Tengah mengenai ketidakcakapan perempuan

berpolitik menurut budaya patriarki selamanya benar (mutlak benar), dan tidak dapat diganggu gugat, tanpa dapat didiskusikan serta tidak dapat dikonstruksikan kembali.

Seiring dengan berjalannya waktu, didorong oleh adanya dinamika regulasi yang memberi perlindungan terhadap perempuan, serta keinginan perempuan untuk mengambil akses dan berpartisipasi dalam proses rekrutmen legislatif, wacana doxa yang selama ini kuat mengakar pada masyarakat berubah dan luntur. Heterodoxy ini munculkan doxa baru, bahwa perempuan di tengah masyarakat patriarki; mampu berjuang, bisa menjadi sosok agen atau individu yang cakap politik, mampu melewati rintangan dalam berpolitik dan terpilih, memiliki elektabilitas yang tinggi di hadapan konstituen mereka.

Doxa yang baru, kemudian muncul sebagai klimaks dari diskursus opini; perempuan menunjukkan pada publik/ masyarakat bahwa mereka mampu, memiliki performan dan eksis dalam berpolitik. Melalui habitusnya, perempuan meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kapabilitas dalam dunia politik. *New Doxa* merembes dalam realitas sosial, mendorong perempuan untuk berpegang pada realita, kebenaran fenomena yang menyandarkan diri pada akal budi dalam bersikap. Dalam doxa yang baru ini, masyarakat diajak berfikir untuk menemukan kebenaran itu sendiri.

Doxa baru, membawa perubahan pada agen perempuan, yakni kesadaran diri bahwa mereka memiliki kemampuan diri, kapabilitas untuk memasuki dunia politik. Doxa baru ini juga memberi kesadaran untuk masyarakat tentang wacana dominan yang terkonstruksi dalam masyarakat Jawa Tengah selama ini terhadap perempuan yang dianggap tidak cakap berpolitik menurut budaya patriarki, telah digugat, tidak

mutlak selamanya benar. Konstruksi ini dapat diganggu gugat, dapat didiskusikan serta dapat dikonstruksikan kembali.

Jadi, doxa baru muncul karena adanya proses dialektif agen, beserta nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki di tengah arenanya. Krisis yang "merusak" keharmonisan antara subjektif agen dengan struktur objektif arena telah terjadi dalam proses doxa baru akan dimunculkan dalam arena.

4.2.5. Analisis Perempuan Narsis dan Menghegemoni dalam Habitus Perempuan

Habitus perempuan, sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berlaku dalam masyarakat Jawa Tengah telah membatasi ruang gerak perempuan, karena dalam kultur patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Konstruksi sosial yang terbangun sampai saat ini, masih memandang perempuan sebagai "orang kedua" dalam mengakses kesempatan berpolitik, kesempatan untuk meraih kekuasaan.

Sekuat apapun penyangkalan perempuan terhadap keinginan akan kekuasaan, mereka tidak bisa memungkiri bahwa ketika keputusan berpolitik itu dibuat, perempuan sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan yang diperebutkan. Disinilah kemudian tampak bahwa perempuan, sama halnya dengan laki-laki juga memiliki rasa ingin eksis. Mereka juga memiliki dorongan untuk bereksistensi. Di lapangan, ditemukan dua kelompok untuk mengungkap hal ini, yakni kelompok perempuan yang mempunyai kapabilitas yang tinggi, terdiri atas; kemampuan, kecerdasan yang baik, bahkan sangat baik dalam berpolitik, mereka mempunyai modal yang tinggi,

termasuk popularitas dalam masyarakat. Kelompok kedua terdiri dari perempuan yang memiliki kapabilitas yang rendah yang biasanya kurang berdaya dan merasa kebingungan ketika masuk dunia politik. Bagi kelompok pertama, tentu tidak sulit mereka bereksistensi, memanfaatkan kekuatan mereka, kemapanan mereka dalam berpolitik dan ini tidak berlaku bagi kelompok berikutnya.

Berdasarkan data penelitian, perempuan Jawa Tengah tidak bisa memungkiri kebutuhan mereka terhadap kekuasaan dengan motif yang beragam. Keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen untuk yang pertama kali sampai dengan pada pelaksanaan Pemilu berikutnya dilakukan untuk memperoleh, merebut kekuasaan dan mempertahankan keberadaannya agar sebisa mungkin langgeng. Memiliki kuasa (walaupun sedikit atau tidak banyak memberi pengaruh pada orang lain) memang posisi yang menarik bagi sebagian besar orang, termasuk perempuan.

Salah satu hal yang dibutuhkan oleh perempuan dalam memperoleh kekuasaan dalam masyarakat pemilihnya adalah komunikasi. Perempuan membangun komunikasi, untuk membentuk wacana diri mereka di hadapan publik. Memperkenalkan diri mereka, menunjukkan eksistensi mereka pada publik, tentu saja untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi politik. Eksistensi mereka dalam dunia publik sangat diharapkan, seperti halnya Beauvoir menekankan bahwa manusia dilahirkan bebas dan berhak menentukan arah kehidupannya, demikian perempuan. Perempuan harus diberikan kebebasan yang sama dengan kebebasan untuk laki-laki untuk menentukan langkahnya. Mereka membangun wacananya, menunjukkan siapa dirinya di depan publik. Hal yang paling mudah dalam membangun wacana diri

adalah perempuan, memajang foto-fotonya untuk berkampanye, seperti calon legislatif yang lain. Bahkan, tidak jarang dengan berkembangnya era digital saat ini, melalui media sosial *online*, perempuan sangat intens memperlihatkan eksistensinya, foto dirinya dan semua aktifitas politik dan non politiknya.

Bangunan wacana yang dibentuk perempuan, sangat membuka perempuan untuk berperilaku menjadi sosok yang selalu ingin eksis, yang dalam konsep Beauvoir disebut narsis. Hasil penelitian menunjukkan perempuan dalam membangun wacananya dengan menunjukkan indikator perilaku narsis. Bagi Sigmund Freed, narsis adalah kepribadian seseorang yang ingin diakui orang lain, karena rasa cinta pada dirinya sendiri bahkan berlebihan. Perempuan dalam berkomunikasi dengan orang lain, diikuti dengan keinginan-keinginan untuk diperhatikan, ingin menjadi sempurna, tidak mau menerima kritik, dan berusaha untuk menjatuhkan lawan politiknya agar ia lebih unggul. Arena politik serta tekanan-tekanan yang dihadapi oleh perempuan dalam perjalanan politiknya, yang mendorong perempuan untuk mengambil pilihan-pilihan tindakan demikian.

Relasi yang menarik, narsisme perempuan dan kekuasaan dalam kehidupan politik perempuan. Narsisme untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan dan pengaruhnya. Narsis menurut pandangan umum, memiliki kesan kurang baik bagi seseorang. Oleh Beauvoir, ketika perempuan tidak dapat memperlihatkan kemampuannya, kecerdasannya, maka mereka akan cenderung narsis. Demikian dengan temuan penelitian Cichocka (2018) yang dipublikasikan dalam Jurnal *British Journal of Social Psychology*, yang menganalisis relasi tipe evaluasi diri, narsistik,

dan harga diri dalam mendukung demokrasi. Bahwa orang narsistik, cenderung anti demokrasi dan tidak cocok jadi pemimpin karena otoriter dan sulit menerima kritik. Sebab orang narsistik merasa superior pada orang lain sehingga memiliki toleransi yang rendah pada pandangan politik berbeda.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda. Oleh perempuan, narsis bagian penting dari membangun wacana diri, bahkan sebagai ajang komunikasi agen dalam arenanya. Narsis tidak dimaknai negatif untuk aktor-aktor dalam arena politik mereka, menjadi habitus untuk meraih kekuasaan dalam politik. Perempuan mengkondisikan situasinya secara berhati-hati, dengan harmoni yang ia ciptakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik mereka. Dengan cara apa perempuan mengkondisikan? Mereka secara *soft power* mempengaruhi pihak-pihak di sekitar mereka, sebagai alternatif karena melakukan "perlawanan" secara ekstrim terhadap konstruksi patriarki, dan kondisi lainnya juga tidak memungkinkan dalam arena politik khususnya dalam proses rekrutmen politik. Perempuan menata situasinya melawan hegemoni terhadapnya, dengan *soft power* yang ia ciptakan dalam arena politik. Sebagaimana Antonio Gramsci menjelaskan, hegemoni adalah dominasi atau nilai-nilai kehidupan, norma atau budaya masyarakat yang bisa berubah terhadap kelompok masyarakat yang secara sadar akhirnya mengikutinya.

Kelompok atau aktor-aktor yang didominasi oleh perempuan ini tidak merasa tertindas, bahkan mereka merasa sebagai hal yang seharusnya terjadi. Bahkan, jika pada titik keberhasilan perempuan, mereka mengkondisikan situasinya dalam berpolitik melalui *soft power* untuk menghegemoni juga. Lingkungannya, masyarakat

konstituennya, partai politik pengusungnya, bahkan patronnya dipengaruhi dan dikondisikan untuk mendukungnya sebagai kewajiban terpenuhinya regulasi afirmasi yang telah ditetapkan. Sebagaimana Bourdieu menggagas teori praktik sosialnya, agar habitus, arena, memberi ruang kepada perempuan untuk bereksistensi. Sehingga ini dapat menjadi modal yang dapat mendukung keberlangsungan kekuasaan yang selama ini dimiliki perempuan. Disinilah, peneliti melihat apa yang dikatakan Beauvoir, bahwa kekuatan dan daya tarik feminisme menurut Beauvoir adalah peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang dibukanya bagi keunggulan feminitas. Yang kemudian dijelaskan sebagai feminis eksistensialisme. Feminisme adalah selebrasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sifat keduanya adalah tetap dan tidak mungkin diubah. Namun, diantaranya ada keunggulan-keunggulan yang jika dipupuk akan dapat ditampilkan masing-masing.

4.3. Modal Perempuan

Arena politik berpengaruh terhadap perempuan dalam proses rekrutmen legislatif; habitus perempuan, pendidikan politik, interaksi, posisi, relasi, serta modal, demikian sebaliknya, arena dipengaruhi juga oleh hal tersebut. Seperti halnya Bourdieu menjelaskan bahwa pada arena apapun, agen-agen yang menempati berbagai macam posisi yang tersedia (atau yang menciptakan posisi-posisi baru) terlibat di dalam kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau sumber daya yang khas dalam arena yang bersangkutan.

Ketika memperebutkan akses sumber daya dalam arena ini, perempuan dalam arena rekrutmen legislatif di Jawa Tengah dipengaruhi oleh habitus dan modal. Modal dipandang sebagai basis dari dominasi dan legitimasi dalam ranah. Untuk mewujudkan keinginannya masuk dalam arena rekrutmen legislatif di Jawa Tengah selama ini, perempuan harus memiliki modal. Semakin banyak penguasaan seseorang terhadap modal, maka ia (termasuk perempuan) akan memperoleh kekuasaan yang besar juga. Oleh karena itu, modal harus ada dalam sebuah arena, agar arena ini memiliki daya yang memberi arti. Mustahil memahami perempuan dalam realitas politik, khususnya pada arena rekrutmen tanpa mengetahui modal mereka dengan segala bentuknya. Ketika seorang agen mempunyai modal, maka ia akan mampu mempertahankan atau mengubah struktur dibanding dengan mereka yang tidak mempunyai modal.

> "Tapi saya *ya mendingan*, modal saya tidak sampai 300 juta kemarin *pas* pemilu. daripada calon lainnya" (wawancara dengan informan 2).

Di atas adalah penggalan wawancara dengan informan perempuan mengenai modal ekonomi dalam proses rekrutmen legislatif 2014. Pernyataan mengenai diperlukannya modal ekonomi oleh informan 2 di atas, juga diiyakan oleh informan yang lain. Modal ekonomi sangat penting untuk menopang aktifitas perempuan. Tidak bisa ditentukan jumlahnya, namun modal ekonomi oleh para calon termasuk perempuan sangat diperlukan dalam arena politik di Jawa Tengah.

Perempuan membutuhkan modal ekonomi dalam rangka melaksanakan pendanaan konsolidasi dalam partai politik dan untuk kampanye pribadi. Kampanye pribadi ini sebagai sarana perempuan memproduksi wacana tentang dirinya agar populer di masyarakat pemilihnya. Seperti halnya kandidat lainnya, modal ekonomi

dibutuhkan sebagai kontribusi ke partai politik dan biaya politik mereka. Kontribusi calon legislatif kepada partai mereka memang berbeda-beda, dan kekuatan finansial partai dalam proses rekrutmen legislatif ini dimanfaatkan untuk mendukung para calon, atau memberi represi kepada pihak-pihak yang dianggap lawan politik yang dicalonkan oleh partai politik yang lainnya. Jika dulu, kampanye dilaksanakan oleh seluruh calon dalam partai politik secara bersamaan. Artinya, partailah yang melaksanakan kampanye. Dalam sistem Pemilu yang berubah, perempuan seperti halnya kandidat lainnya harus melakukan sosialisasi, kampanye pribadi misalnya untuk pembuatan dan pemasangan baliho, kalender, dan alat kampanye yang lain. Selain itu, perempuan membutuhkan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tengah publik yang ia prakarsai.

Ketika perempuan sudah menjadi anggota dewan, mereka tidak terkendala ketika memberi kontribusi kepada partai politik dan kampanye pribadi yang mereka lakukan. Namun, kondisi ini berbeda dengan perempuan yang posisinya belum menjadi anggota dewan. Banyak perempuan yang memperoleh modal ekonomi dari orang-orang terdekat, setelah mereka mendapatkan restu dari keluarga mereka untuk masuk ke dalam arena rekrutmen legislatif. *Privilege* penguasaan modal perempuan dalam arena rekrutmen legislatif, tidak bisa dilepaskan dari keluarga. Kondisi ini tidak lepas dari minimnya kemandirian perempuan di Jawa Tengah. Perempuan yang lebih banyak terserap di dunia kerja informal yang rentan dengan sumber akses keuangan yang terbatas. Bagi mereka yang mapan menjadi PNS sudah tidak berminat lagi memasuki dunia politik.

Ketergantungan kepemilikan modal ekonomi perempuan terhadap pihak lain, juga bisa terjadi. Pemilik modal ini tidak hanya suami, ayah atau keluarga lainnya. Bisa saja ada orang lain yang menjadi *patron* yang menyediakan modal ekonomi untuk perempuan. Terhadap patron yang menyediakan modal ini, perempuan akan memiliki ketergantungan dalam arena politik, maupun ketergantungan dalam bentuk lainnya. Bahkan sering terjadi politik transaksi yang melibatkan perempuan.

Bagi perempuan yang tidak punya basis massa, modal ekonomi harus berperan, karena seperti yang terjadi di Wonosobo misalnya, pilihan akan tergantung pada konstituen yang mengharapkan besarnya uang yang diberikan. Banyak alasan masyarakat, karena mereka tidak kenal calon, tidak pernah berkomunikasi dengan calon, dan sebagainya. Agak berbeda dengan informan perempuan yang memiliki basis massa. Walaupun modal ekonomi juga penting, namun perempuan yang mempunyai basis massa akan memanfaatkan modal sosial dan modal simbolik mereka. Perempuan yang mempunyai basis massa dalam organisasi, biasanya akan didukung oleh massanya. Anggota dalam organisasi, ingin pimpinannya jadi anggota dewan, sehingga mereka mengharapkan dipikirkan nanti kalau pimpinannya jadi terpilih, demikian tegas Informan 1. Sebaliknya, orang yang *digembleng* oleh organisasi ini, pasti ingin pulang ia akan memberi kontribusi untuk organisasinya. Namun tetap saja, namanya masyarakat banyak, terdapat beberapa kejadian dan keinginan. Informan 1 menjelaskan;

> "Beberapa orang-orang saya laporan, orang yang mau ke TPS ini bertanya *…lho ijole kerjoku piro?, ya* harus kita siapkan. Mereka akan ke TPS dibayar berapa, pengganti upah harus meninggalkan pekerjaan mereka untuk datang ke TPS." (wawancara 9 Januari 2018).

Untuk biaya kampanye dan lain-lain, biasanya informan menyediakan dana 300-500 juta rupiah, bahkan lebih. Bukan jumlah yang sedikit, apalagi bagi perempuan yang tidak memiliki dukungan modal ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah modal ekonomi ini tergantung pada; daerah pemilihan dimana perempuan ditempatkan, jam terbang perempuan, eksistensi partai politik pengusung perempuan, basis massa calon perempuan. Modal ekonomi lebih banyak disiapkan oleh perempuan, pada kondisi-kondisi tersebut, dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.7. Ikhtisar Kondisi dan Penyediaan Modal Ekonomi Perempuan

Kondisi	Penyediaan Modal Ekonomi Perempuan
1. Penempatan pada daerah pemilihan yang baru bagi kandidat perempuan	Perempuan membutuhkan modal ekonomi yang lebih besar, karena mereka belum dikenal oleh masyarakat konstituen. Modal ekonomi disiapkan perempuan lebih banyak, untuk membuat baliho, menyiapkan media kampanye (tidak jarang berupa barang), program-program permintaan masyarakat. Selain itu, ditemui daerah-daerah pemilihan yang masyarakatnya masih sangat mengharapkan politik uang dalam kampanye kandidat.
2. Elektabilitas perempuan	Modal ekonomi banyak disiapkan oleh kandidat perempuan yang masih kurang elektabilitasnya karena; belum dikenal masyarakat, pertama pencalonan dirinya, tidak mempunyai basis massa.
3. Eksistensi partai politik	Kandidat perempuan yang diusung oleh partai politik dengan basis massa yang rendah di daerah pemilihannya, mengeluarkan modal ekonomi yang besar.
4. Basis massa yang dimiliki perempuan	Bagi perempuan yang kurang bahkan tidak memiliki basis massa di daerah pemilihannya dan mereka tidak mempunyai modal sosial, modal simbolik maupun modal lainnya, jumlah modal ekonomi sangat menentukan

	kemenangan dan kekalahan mereka dalam arena rekrutmen legislatif.

Sumber: data primer diolah (2018)

Perempuan menyediakan modal ekonomi, selama proses rekrutmen dalam partai politik (penjaringan, penetapan), ketika berhadapan dengan konstituen (kampanye), pemilihan dan juga pada pada saat setelah pemilihan. Pada tahap ini, dana digunakan untuk saksi dan pengawalan terhadap penyelewengan perhitungan suara untuk perempuan yang sering sekali terjadi. Ironisnya, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kecurangan atas suara perempuan ini sering dilakukan oleh kandidat lainnya dalam satu partai politik yang berada dalam satu daerah pemilihan.

Selain kepemilikan modal ekonomi, berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan perempuan, perempuan juga harus memiliki modal yang lainnya. Modal simbolik/ modal sosial/modal budaya menjadi instrumen yang penting yang terlihat menonjol dimiliki oleh perempuan. Modal simbolik ada pada calon perempuan karena kepemilikian hubungan kekerabatan/keluarga yang berakibat pada adanya *prestice* dan ketenaran di depan publik. Walaupun disadari dalam realitas sosial tetap ada persaingan yang berkaitan dengan pihak yang unggul dan dominan.

Ketujuh informan memang tumbuh dan “besar” dalam lingkungan keluarga aktifis partai politik yang menjadi *public figur* di masyarakatnya. Perempuan memanfaatkan modal simbolik sebaik-baiknya untuk memperoleh konstituen, nama besar yang dimiliki keluarga besarnya menjadi hal yang penting dalam membina konstituen. Informan 1, informan 2, informan 7 lahir dari keluarga ustad, ustadzah dan pengasuh pondok pesantren. Masing-masing mereka mampu merajut komunikasi

dengan masyarakat dengan baik. Informan ini bahkan dikenal sebagai Bu *Nyai* karena besar dari keluarga tokoh agama dalam masyarakat. Masing-masing mereka dan keluarga dihormati tidak karena politik, tapi karena statusnya yang diakui dan dihormati dalam masyarakat sebagai orang-orang yang memiliki ilmu agama, menjadi tokoh agama dalam masyarakat.

Seperti halnya fenomena yang biasa terjadi, masyarakat Jawa Tengah mempunyai keyakinan dan penghormatan yang baik terhadap orang-orang yang dianggap memiliki simbol-simbol sosial. Penguasaan atas simbol ini juga terjadi pada informan 3, 4, 5 dan 6, yang disegani oleh masyarakat karena mereka berasal dari keluarga terpandang, berpengaruh dalam masyarakat baik secara sosial maupun pengaruh politis. Hubungan mereka dengan masyarakat sangat baik dan hubungan ini sudah terjalin lama bahkan sebelum mereka lahir oleh generasi sebelum mereka. Seperti penuturan informan 5;

> "Bapak saya, petani tembakau yang bekerja sejak menanam sampau panen dan produksi tembakau. Sudah sejak 1977, Bapak saya adalah orang dibalik kemenangan PDI di kecamatan tempat saya tinggal. Padahal waktu itu, PDI menjadi partai yang dipinggirkan karena beda haluan dengan pemerintah. Bapak saya, mas-mas saya itu bekerja dalam masyarakat untuk partai, untuk ideologi yang kami yakini. Jadi, kami sekeluarga sudah biasa dekat dengan masyarakat. Ketika saya maju tahun 2004, tidak ada kesulitan untuk minta dukungan masyarakat."(wawancara Agustus 2018).

Kedekatan informan 5 dengan konstituennya sudah dirajut jauh sebelum ia mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Konstituen mengenal sosoknya sebagai orang lahir dari keluarga yang cukup dikenal masyarakat khususnya para petani dan buruh pengolahan tembakau. Kuatnya modal simbolik bagi perempuan ini juga sangat terlihat dalam interaksi informan 3 dan konstituen. Informan terpilih dalam tiga Pemilu, Ia

dapat bertahan dan meraih kemenangan walaupun ada perubahan sistem Pemilu, dan ia juga pindah haluan partai politik.

Peneliti menemukan data berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim sukses dari informan 3 melalui pesan *whats app*, Dayat (49 tahun) demikian yang bersangkutan dapat dihubungi juga dalam akun *facebook*nya *@Dayat Karangnangka* ia menuliskan bahwa informan 3 memiliki basis massa yang bagus di masyarakat.

> "Memenangkan Pemilu sejak usianya masih muda, dan masyarakat tetap memilih walaupun yang bersangkutan tidak lagi berjuang melalui partai yang sama. Basis massa ini solid, karena sosok "Ibu" (demikian Dayat menyebut informan 3) dianggap baik oleh masyarakatnya. Tapi yang jelas, Bapaknya yang menjadi tokoh dalam masyarakat sangat memberi ruang pada Ibu dalam masyarakat pemilih."

Modal simbolik perempuan, tidak dilepaskan dari bagaimana modal sosial mereka yang berupa wawasan, pengetahuan, cara berpikir yang dianggap dapat membuat suatu identitas, serta jejaring sosial yang dimiliki oleh perempuan. Pengetahuan, intelektual perempuan termasuk cara mereka memperoleh dan menstransformasikannya dalam berpolitik, mereka dapatkan dari tingkat pendidikan mereka secara formal dan pendidikan non formal (agama) dari keluarga atau pesantren. Keluarga memberi kontribusi terhadap modal kultural dan sosial pada perempuan. Dari hasil wawancara dengan informan, beberapa diantara mereka memperoleh akses yang mudah untuk terjun ke dunia politik karena jalur keluarga yang telah menjadi pengurus partai, pengurus organisasi masyarakat.

Oleh informan perempuan dalam penelitian, modal ini diproduksi, diperbarui, diproduksi dan diperbarui kembali, dikemas kembali berdasarkan citra diri mereka melalui berbagai media, dakwah dan media sosial (jejaring sosial), pendidikan

organisasi sosial keagamaan, lembaga-lembaga politik, konstituen. Informan 1, sangat responsif dalam berkomunikasi di media sosial. Ketika berinteraksi dengan para informan secara langsung dan melalui pesan di *whats app*, peneliti melihat dan merasakan para informan memang memiliki gaya berbicara dan berbahasa yang bagus dan berkelas. Juga ketika berhadapan dengan publik baik dalam kegiatan pengajian, pertemuan massa reses, dan sebagainya serta saat berkomunikasi di media sosial, tutur kata mereka menarik, dengan pilihan kata dalam kalimat yang tertata dan terkesan berhati-hati dan cerdas. Informan menjawab setiap pertanyaan dengan lembut tapi tegas. Walaupun analisa peneliti tersebut terkesan subjektif, namun menurut peneliti; habitus perempuan ini menjadi modal yang baik bagi perempuan dalam membangun jejaring sosial dengan publik.

Modal personal (performan), merefleksikan status sosial yang dimiliki perempuan sehingga membentuk performan perempuan di hadapan publik. Modal menjadi penting dalam membangun pengertian "*a person*" yang disebut agen. Sebagai "*a person*", informan perempuan menyadari ia harus berbeda dengan calon (legislatif) lainnya termasuk perempuan lain yang mencalonkan diri dalam arena legislatif sehingga sumber daya apapun yang ia miliki akan ia kerahkan dalam arena rekrutmen legislatif baik pada saat rekrutmen dalam partai politik sampai dengan ketika berusaha memenangkan pilihan konstituen di daerah pemilihannya. Termasuk habituasi mereka dalam menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat di daerah pemilihan mereka. Penampilan, bahasa tubuh, semua performan diarahkan perempuan.

Berdasarkan apa yang dilihat secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa penampilan yang menarik, wajah yang "enak dilihat", gaya bicara yang meyakinkan, dan sebagainya bahkan gaya-gaya narsis perempuan, menjadi modal mereka dalam memenangkan pilihan konstituennya. Perempuan dengan penampilan mereka yang menarik, gaya busana yang sering mereka tampilkan di publik melalui jejaring sosial, baliho-baliho untuk memperkenalkan diri sekaligus kampanye dalam proses rekrutmen legislatif.

> "bertemu langsung dengan publik, penampilan kita harus bisa mencerminkan diri kita, kemampuan kita. Ini harus kita perhatikan, Bu. Narsis juga kadang dianggap penting, untuk menarik perhatian dan simpati konstituen. Bagi saya, asal tidak berlebihan *ya nggak* apa-apa." (wawancara dengan informan 3 tanggal 4 Maret 2018).

Di atas adalah penggalan wawancara dengan salah satu informan ketika menjelaskan pendapatnya mengenai narsis sebagai modal perempuan. Narsis, dalam membentuk wacana diri bagi perempuan dianggap perlu dilakukan, sebagai proses perempuan membentuk, memupuk kepercayaan dirinya. "sebatas itu, tidak berlebihan", demikian penjelasan informan 1.

Perempuan ingin menunjukkan gaya-gaya narsis, percaya diri, ketika berhadapan dengan publik dengan batas-batas yang lumrah. Informan suka share foto-foto diri dalam akun media sosial mereka, termasuk keteka mereka berada dalam agenda kegiatan-kegiatan di tengah publik untuk memperlihatkan bahwa mereka memiliki kapabilitas, mempunyai kualitas diri yang baik, ingin menunjukkan pencapaian-pencapaian yang telah ia raih. Perempuan ingin membentuk citra diri

sebagai sosok yang kuat, mempunyai prinsip-prinsip hidup serta mempunyai ketrampilan hidup.

Besarnya kontribusi modal ekonomi, modal simbolik, modal sosial dan kultural, serta modal performan terhadap perjalanan politik perempuan ini menarik. Kepemilikan atas modal ini, membuat perempuan memiliki posisi yang stabil dalam politik.

Gambar 4.7. Modal Perempuan dalam Rekrutmen Legislatif di Jawa Tengah

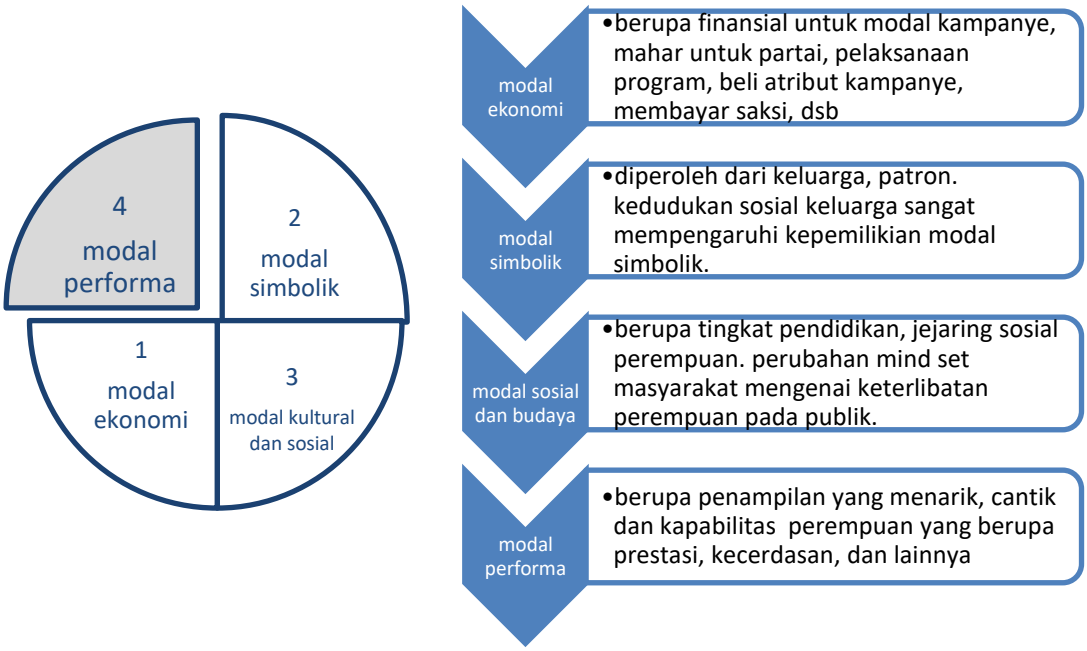

Sumber: data primer diolah (2018)

Di lapangan ditemukan data, bahwa informan-informan perempuan tidak mengalami persoalan yang berarti ketika harus pindah daerah pemilihan, memperluas daerah pemilihan karena menjadi kandidat legislatif ke tingkat provinsi dan nasional, bahkan informan 3 pindah partai politik. Kepemilikan modal yang dimiliki perempuan sangat memberi kontribusi terhadap perjuangan mereka. Kepemilikan modal

seseorang, terjadi tatkala dalam ranah muncul kompetensi dan penguasaan atas modal. Arena dipahami sebagai ranah perjuangan bagi para agen, disanalah termpat pertarungan, pertaruhan untuk perebutan akses-akses yang terbatas. Kekuasaan politik, menjadi contoh dari bentuk akses yang diperebutkan dalam arena.

Pada arena kekuasaan, oleh masyarakat dianggap sebagai arena yang dominan, yang paling menarik dalam setiap masyarakat, disitulah biasanya beberapa pihak selalu dominan dan mendominasi. Perjuangan untuk saling mendominasi antara satu dengan yang lain, dan perjuangan untuk saling mendominasi antara satu dengan yang lain, serta ada perjuangan untuk saling menyingkirkan. Disinilah, perempuan membutuhkan modal.

Modal-modal dibutuhkan para agen untuk memperjuangkan kekuasaan dalam arena mereka. Modal harus ada dalam ranah, agar modal ini berguna. Seorang agen menempati suatu ruang sosial yang multidimensional. Oleh Bourdieu, ruang (arena) itu tidak didefinisikan oleh keanggotaan kelas sosial, tapi terkait dengan jumlah setiap jenis modal yang dimiliki. Uang dan kekuasaan bagi perempuan dalam masyarakat memang terbatas jumlahnya, demikian Maria Mies menggambarkan bahwa keterbatasan keduanya pada perempuan, mengakibatkan adanya persaingan (Tong, 1998:345). Akibatnya, perempuan akan berhadapan dengan orang lain, bahkan perempuan akan diposisikan melawan perempuan yang lainnya.

Dulu, kehadiran perempuan dalam politik lebih terkait dengan profesi dan karier suami mereka. Demikian, proses rekrutmen dalam partai politik juga sering dilakukan karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka.

Perempuan tidak memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat, serta mempunyai komitmen yang kurang dalam menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Penelitian mengenai perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah ini melihat modal ekonomi, modal sosial dan kultural, serta modal simbolik perempuan. Temuan riset menunjukkan bahwa pada perempuan di Jawa Tengah perempuan sangat membutuhkan modal. Modal ekonomi, modal simbolik, modal sosial dan kultural, serta modal performan, oleh perempuan dimanfaatkan dengan baik. Modal ini sama-sama memiliki *andil* atau berkontribusi terhadap kemenangan perempuan, masing masing saling mengisi.

Selain kepemilikan modal ekonomi, berdasarkan hasil penelitian perempuan juga menggantungkan diri mereka akan adanya modal yang lainnya. Seperti halnya yang ditegaskan Bourdieu, modal berupa hal-hal material yang mengandung nilai-nilai simbolik dan kultural. Status sosial, prestise dan otoritas yang dimiliki perempuan untuk menuju dalam arena, demikian pendidikan, bahasa menjadi modal budaya bagi perempuan. Seperti halnya apa yang menjadi jalan riset Bourdieu, modal simbolik di dalamnya terdapat simbol-simbol yang melekat pada perempuan dalam arena mereka seperti darimana perempuan berasal, keturunan siapa, apa pendidikannya, dan kemampuan perempuan.

Modal simbolik/ modal sosial/modal budaya menjadi instrumen yang penting yang terlihat menonjol dimiliki oleh perempuan. Modal simbolik, perempuan-perempuan ini memperolehnya dari kepemilikian hubungan kekerabatan/ keluarga yang berakibat pada adanya *prestice* dan ketenaran di depan publik sebelum mereka

memasuki ranah politik, walaupun disadari dalam realitas sosial tetap ada persaingan yang berkaitan dengan pihak yang unggul dan dominan. Ketenaran, eksistensi perempuan dalam publik sangat dibutuhkan oleh perempuan. Mereka yang sebelum terjun dalam politik tidak memiliki basis massa melalui keterlibatan dalam masyarakat, organisasi-organisasi, sangat berat untuk mewacanakan dirinya. Pentingnya mewacanakan diri inilah yang kemudian dilakukan perempuan, menjadi kebutuhan, dan modal bagi mereka dalam berpolitik.

Hasil penelitian melihat adanya modal performan, yang terdiri atas demikian hasil penelitian ini berupa penampilan yang menarik, cantik dan kapabilitas perempuan yang berupa prestasi, kecerdasan, dan lainnya. Ketika perempuan politisi mempunyai keterbatasan dalam penguasaan suatu modal, maka ia akan menutup kekurangan mereka dengan modal yang lain, yakni modal sosial melalui jejaring sosial yang mereka kuasai, dan modal kultural, demikian sebaliknya. Dalam menghadapi arena mereka, Bagi mereka yang tidak memiliki modal, maka dipastikan tidak akan memiliki kemampuan menembus rintangan rekrutmen legislatif yang sedemikian besar. Semua modal ini, digunakan perempuan secara menyeluruh untuk mendukung eksistensi mereka dalam arena rekrutmen legislatif.

Perempuan sebagai aktor yang sukses dalam arena, merujuk apa yang ditegaskan Bourdieu bahwa mereka yang memiliki penguasaan terhadap banyaknya jenis modallah yang bertindak menurut batas konteks sosial tertentu, rasionalitas tertentu serta kesadaran tertentu yang ditanamkan oleh struktur yang ada di sekelilingnya. Perempuan yang memiliki keberanian, tangguh menghadapi segala

situasi, kompetitif, punya dana, dan massa yang menggenggam keberhasilan dalam arena yang dihadapi.

Jadi, seperti yang dinyatakan oleh Bourdieu, bahwa modal merupakan kekuatan spesifik yang ada dalam arena, telihat dalam penelitian. Perempuan harus mempunyai modal untuk menghadapi pertarungan politiknya. Modal dimanfaatkan sebagai aset perempuan untuk menentukan posisi mereka dalam ranah/ arena, dan penentu kemenangan dalam arena pertarungan pemilihan legislatif.

4.4. Kekerasan Simbolik yang Dialami Perempuan

Kekerasan atau dominasi merupakan hasil dari suatu praktik-praktik kekuasaan. Ketika suatu kelompok atau seseorang mendominasi kelas yang lainnya dalam proses sosial, ini akan menimbulkan dominasi. Untuk menjalankan aksi kekerasan melalui dominasi ini, kelas atau kelompok atau seorang individu akan berupaya agar aksinya tidak mudah dikenali, sangat perlahan, sehingga kelas dominan tidak menyadari kalau mereka telah menjadi korbannya.

Dominasi terjadi karena dalam proses interaksi selalu ada kepentingan-kepentingan yang selalu mengarah kepada adanya pihak-pihak yang dikuasai dan adanya pihak-pihak yang menguasai. Kuasa ini selalu terjadi dalam arena, seiring dengan apa yang ditegaskan Foucault (Eriyanto, 2001:66) bahwa strategi kuasa terjadi dimana-mana, sepanjang ada relasi antar manusia, yang datangnya dari dalam, menentukan susunan dan aturan-aturan serta relasi.

Konstruksi sosial selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi. Perempuan tersubordinasi dalam masyarakat selama ini khususnya dalam politik, tanpa dipahami oleh perempuan itu sendiri. Yang terjadi adalah usaha-usaha meminggirkan perempuan dari dunia politik, didukung dengan keterbatasan modal ekonomi, pendidikan dan modal sosial dalam masyarakat Jawa Tengah. Banyak kondisi yang membatasi keberhasilan perempuan di arena publik termasuk ketika perempuan memasuki proses rekrutmen legislatif. Dampaknya, seolah segala sumber daya perempuan menjadi tidak terpenuhi, yang lebih memprihatinkan, kehadiran mereka seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap. Ketika regulasi sampai masa kini telah mengafirmasi posisi para perempuan dalam politikpun, melibatkan perempuan masih disikapi oleh berbagai pihak, "semata" hanya sebagai kewajiban atau tuntutan regulasi.

Perempuan dalam dunia politik, harus berhadapan dengan banyak kepentingan untuk menuju pada kekuasaan yang diperebutkan. Mereka berhadapan dengan banyak pihak yang merasa kekuasaannya terancam dan harus dipertahankan. Dinamika regulasi tentang perlindungan hak-hak politik perempuan yang terjadi di Indonesia sejak masa reformasi digulirkan juga berpengaruh terhadap arena politik di Jawa Tengah. Kebijakan *afirmative action* untuk keterwakilan perempuan minimal 30% tidak semua diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Kondisi ini wajar, karena bisa saja beberapa kelompok orang terutama mereka para "*liyan*" (orang-orang di luar perempuan) merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap beberapa informan pengurus partai disebutkan bahwa partai di tingkat cabang hanya bisa *"manut"* dengan regulasi yang ditetapkan (yang katanya) sebagai syarat menuju demokrasi. Namun, realita menunjukkan bahwa banyak pengurus partai masih belum ikhlas sepenuhnya dan merasa ada ketidakadilan dalam regulasi *afirmative action* perempuan. Seperti kutipan wawancara dengan Afif (47 tahun);

> "Selama ini, partai sudah akomodatif dengan perempuan. Sedangkan perempuannya yang belum bisa maksimal. Bersaing sama, karena kinerja tapi dengan kuota 30%, partai politik jadinya bagaimana. Kalau diimbangi dengan kualitas dan kapabilitas perempuan yang bagus, menguntungkan bagi partai tapi *yen* tidak? Keputusan MK yang hanya beberapa orang saja telah mengalahkan isi Undang-undang (mengenai penentuan kemenangan berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut) yang menjadi inspirasi lebih dari 500 orang." (Wawancara 2 Agustus 2018).

Fenomena yang terjadi adalah selama ini, kesempatan dan peluang perempuan serta daya juang mereka dihadapkan langsung (dengan kader laki-laki dalam kegiatan politik dalam partai) dan dihadapan masyarakat. Selain itu, program kerja dan kebijakan partai politik, dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing kader dan elite yang kebanyakan adalah laki-laki juga. Perempuan masih belum tertolong dan belum bisa menolong dirinya dalam kehidupan berpolitik. Apalagi ditambah dengan ketidakrelaan pihak-pihak tertentu terutama oleh para elite partai politik terhadap regulasi yang ditetapkan berdampak bagi sistem politik dalam partai politik.

Ketidakrelaan para pengurus partai terhadap sistem pemenangan dalam Pemilu adalah wajar, setelah sekian lama kemenangan Pemilu ditentukan oleh nomor urut, bisa jadi menempatkan para pengurus partai ke dalam posisi yang sangat dominan. Di lapangan terlihat jelas, kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni,

yakni kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide yang dominan. Kekuasaan bisa diperoleh dari ide-ide yang berdasarkan atas mekanisme konsensus yang ada dalam masyarakat. Selama ini, hegemoni, semua ide yang diciptakan penguasa menentukan struktur kognitif masyarakatnya. Upaya ini pada tahap berikutnya menggiring persepsi orang dalam kepentingan mereka.

Ide dan gagasan meminggirkan dan meng-hegemoni perempuan dalam partai politik dilakukan terhadap perempuan melalui konstruksi patriarki yang selama ini tertanam dan berlaku dalam masyarakat. Bagi mereka (elite laki-laki dalam partai politik) akan sangat mudah untuk memanfaatkan konstruksi patriarki ketika ingin meminggirkan perempuan. Yang sangat sering dimanfaatkan adalah konstruksi selama ini adalah bahwa perempuan tidak bisa memimpin karena kuatnya domestifikasi perempuan. Perempuan akan kesulitan mengatur waktu mereka menangani semua urusan publik, dan sebagainya. Di lapangan pelemahan pengkaderan dalam rekrutmen juga dirasakan perempuan, dengan kesempatan politik yang tidak terbuka, seperti halnya yang dimiliki oleh laki-laki.

Perempuan merasa seperti ada sekat terselubung, disinilah dominasi terhadap perempuan di Jawa Tengah dianggap telah lama ada, termasuk dalam simbol-simbol agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Ujaran yang sering disampaikan, dan telah dikampanyekan selama ini misalnya ujaran bahwa; “kodrat para perempuan yang padanya dijanjikan berkah surga itu adalah perempuan yang tidak jauh dari dapur, kasur dan sumur” sudah sering dilontarkan, baik secara langsung kepada perempuan oleh mereka, para pemuka agama yang menjadi tim sukses salah seorang yang merasa

terancam oleh kedudukan perempuan dalam politik. Ini, bagian dari dominasi terhadap perempuan yang secara periodik mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon mereka dengan cara *menggembosi* keberadaan mereka.

Isu-isu yang dihadirkan untuk melemahkan perempuan menurut wawancara mendalam, biasanya spesifik, misalnya mengenai pribadi/ atau kepribadian perempuan, keharmonisan keluarga, urusan domestik perempuan, dan sebagainya. Ukurannya sering kali jauh dari hal-hal yang rasional dan logis, seperti kinerja perempuan, prestasi apa yang dicapai perempuan, kontribusi perempuan untuk masyarakat dan sebagainya, demikian diungkap oleh informan 1, 2, 3, 5, dan 7.

Masyarakat/ publik, menjadi pihak yang sering secara langsung maupun tidak langsung memberi tuduhan bahwa perempuan selalu terbawa perasaan dan mengesampingkan logika, sering menjadi pembenar alasan. Hasil wawancara dengan para informan, diakui mereka bahwa hal tersebut menjadikan perempuan lebih berhati-hati mengambil keputusan karena begitu salah sedikit, perempuan langsung disudutkan dengan pernyataan bahwa mereka tidak cakap mengambil keputusan.

Perempuan merasa terdiskriminasi untuk mencapai posisi strategis. Posisi ini sulit diperoleh perempuan bahkan ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan. Pengetahuan, pengalaman informan perempuan di dunia politik berbeda satu sama lainnya, bervariasi tergantung dimana mereka tumbuh dan dibesarkan oleh dunia politiknya, oleh partai-partai yang membesarkannya masing-masing. Partai politik, adalah lembaga yang paling dekat dengan perempuan ketika mereka melakukan aktifitas politik. Sejak pertama masuk dunia politik, partailah yang menjadi tempat

perempuan menempa dirinya. Elite partai politik yang kebanyakan laki-laki sering membuat kebijakan-kebijakan partai yang bias gender. Misalnya dalam penentuan nomor urut pencalonan, daerah pemilihan, dan dalam aktifitas sehari-hari.

Tekanan akan dihadapi perempuan terlebih dari elite-elite partai laki-laki, dan calon laki-laki dalam partai bahkan dalam pelaksanaan pemilihanpun, perempuan mengalami tekanan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kepentingan semua orang dalam politik adalah memperebutkan sumber daya yang terbatas. Elite partai pun berusaha menghegemoni perempuan, agar kondisi positif dan menguntungkan ada tetap di tangan mereka. Banyak kader dan calon perempuan tidak diperhatikan oleh partai politik, padahal mereka butuh pendampingan untuk maju pada tahap berikutnya, yakni ketika bertemu konstituen di daerah pemilihan mereka. Selain nomor urut, perempuan juga harus berebut daerah pemilihan. Perempuan dan calon lain akan saling berhadapan terkait dengan dua hal tersebut. Banyak hal terjadi, misalnya; oleh elite partai politik perempuan ditempatkan pada daerah pemilihan yang rawan dan berpotensi mengancam keamanannya. Kadang, skenario ini disengaja oleh orang-orang partai politik yang merasa terancam dengan keberadaan perempuan, supaya keluarga calon perempuan berpikir ulang untuk tak mengizinkan perempuan masuk dalam arena kontestasi politik. Terjadi juga, calon perempuan ditekan psikisnya karena pulang malam dari daerah pemilihan kalau mereka harus memiliki kegiatan dalam berpolitik, dipersempit ruang geraknya, ditekan oleh calon lain dan sebagainya.

Peran para elite partai sangat dominan dalam menentukan calon legislatif yang mewakili partainya. Pada tahap ini, perempuan benar-benar diukur kapabilitas,

kemampuannya untuk melakukan *lobby* dan komunikasi politik. Apalagi dalam sistem kemenangan berdasarkan nomor urut seperti yang terjadi pada Pemilu 2004, elite partai adalah penentu utamanya. Perempuan sering tidak mendapat nomor urut atas (satu, dua), karena sebagai orang baru, perempuan jarang menduduki jabatan penting dalam kepengurusan partai. Para elite partai yang nyaman dengan posisi mapan dalam partai (peneliti menyebut sebagai kelompok konservatif di partai) kiprah dan peran perempuan dalam partai politik selama ini sebagai hal yang tidak disukai. Elite yang termasuk golongan konservatif biasanya ada mulai dari tingkat PAC dan DPC. Mereka biasanya tidak berkenan, kalau perempuan banyak menuntut. Tidak mau memahami substansi Undang-undang. Perempuan yang berfikiran maju serta menghendaki ruang-ruang publik yang lebih besar untuk melaksanakan peran-peran mereka pasti akan dimusuhi. Terlebih pada perempuan yang sering membawa isu dan pemikiran feminis yang dianggap mengancam kelangsungan para laki-laki dalam penguasaan mereka terhadap sumber daya partai yang dianggap sebagai hak mereka.

Beberapa informan menjelaskan dalam wawancara, bahwa kelompok konservatif sering merasa bahwa perempuan bisa mengancam keberadaan mereka karena perempuan lebih dekat dengan konstituen, perempuan lebih populer, perempuan lebih bisa diharapkan, dan sebagainya. Banyak cara yang mereka bisa lakukan, seperti yang terjadi; perempuan akan digeser, dipinggirkan, bahkan dikeluarkan dari posisinya karena yang bersangkutan dinilai mempunyai pikiran yang terlalu maju. Perempuan dikeluarkan dari pusaran kepentingan dalam partai politik melalui pemindahan Dapil dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya, dikeluarkan dari kepengurusan partai,

dihadapkan dengan aktifis perempuan lain dalam perebutan kepengurusan organisasi perempuan sayap partai politik atau dengan cara pemecatan perempuan sebagai anggota dan pengurus. Dalam partai politik perempuan harus mampu bertahan. Dorongan, tekanan laki-laki terhadap perempuan ini biasanya terjadi ketika mereka merasa tidak nyaman dengan sosok perempuan. Sehingga jika ada yang harus disisihkan, biasanya perempuan menjadi pilihan pertama.

Beberapa kasus yang dialami oleh informan, perempuan seolah diadu dengan perempuan lain ketika berada dalam pusaran kepentingan politik dalam partai. Salah seorang informan misalnya, menjelang Pemilu 2009 informan merasa "pertarungan" memperebutkan jabatan Ketua Perempuan Bangsa, dipicu oleh adanya kelompok orang (kolega se-partai) yang merasa tidak nyaman di partai. Jalan yang mereka tempuh, dengan cara mengganti posisinya melalui pemilihan yang konstitusional. Ia merasa saingannya saat itu sebagai orang yang kehendaki kelompok yang ingin mengganti posisinya. Keberpihakan partai terhadap kesetaraan gender oleh pengurus partai masih belum sepenuh hati. Selama ini di setiap periode penyelenggaraan Pemilu, yang terjadi adalah banyak sekali perempuan yang "terlibat hanya secara administratif" saja. Sejak tahun 2004, secara administratif perempuan dilibatkan dan diberi jalan, tercantum sebagai pengurus partai ditandai dengan bukti KTP dan tanda tangannya sebagai pengurus partai. Tapi, mereka sering tidak mengerti alasan mengapa ia berada dalam kepengurusan partai.

KPU menentukan calon legislatif yang jadi, setelah partai politik memperoleh jatah kursi masing-masing. Kursi kemudian diberikan pada calon legislatif dengan

suara terbanyak dari partai yang bersangkutan di masing-masing daerah pemilihan. Berlakunya sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan calon perempuan berjuang sendiri-sendiri tanpa dampingan partai politik (hasil wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Wonosobo, 5 September 2016). Masing-masing calon dari partai politik sibuk untuk memenangkan diri. Ini, tentu lebih menyulitkan perempuan. Bahkan perempuan harus bertarung melawan calon lain baik laki-laki maupun perempuan lain dalam partainya atau yang satu partai. Tidak jarang perempuan "dijegal", dicurangi, dibeli suara pemilihnya oleh pemilih laki-laki yang mengerahkan segenap upaya mereka untuk meminta dukungan pemilih. Perempuan dirampas atau bahkan dikurangi hak eksisnya atau dihambat kariernya dalam berpolitik, sehingga perempuan kesulitan memperoleh dan menempati status keberdayaannya dalam partai politik. Kalau perempuan tidak punya kesiapan, hanya mengandalkan kesempatan diawal seperti yang diatur oleh Undang- Undang, tentu mereka akan kesulitan.

Mereka ingin melanggengkan kekuasaannya. Belum lagi soal penentuan mahar bagi perempuan ketika mereka ingin menggunakan mesin politik (partai politik). Oleh para elite, perempuan biasanya akan dibebani pada mereka biaya kampanye untuk partai yang lebih mahal dari pada mereka sendiri.

Peraturan mengenai syarat administratif Pemilu. Selama ini, dipersyaratkan kekhususan bagi perempuan untuk memenuhi syarat ijin atau mengisi *form* ijin suami/ keluarganya ketika akan mencalonkan diri mereka sebagai legislatif. Beberapa informan tidak keberatan dengan syarat tersebut, karena keluarga mendukung selama

ini aktifitas politik mereka. Namun, persyaratan ini tentu memberatkan bagi perempuan yang keluarganya kurang atau bahkan tidak mendukung.

Pada penentuan pilihan, informan juga menegaskan dalam wawancara, bahwa mereka sering mengalami ketidakadilan oleh masyarakat. Perempuan juga mengalami diskriminasi, contohnya sama-sama mencalonkan diri, jika mengenai perempuan, pemilih *lho*, akan melihat mereka, memilih mereka bukan karena bagaimana kinerjanya, tapi sering masuk pada kehidupan pribadi perempuan, ranah privat yang biasanya mengarah pada domestifikasi perempuan. “Apakah dia sudah menjadi istri yang baik? Apakah keluarganya harmonis? Bagaimana suaminya? Dan pertanyaan lain sering muncul.” (wawancara dengan informan 3). Beda dengan calon laki-laki, yang dapat dikatakan mereka lebih bebas dari penilaian-penilaian yang muncul karena tekanan konstruksi patriarkhi.

Ada pula yang menilai bahwa seorang perempuan jadi calon dan bahkan memenangkan suara konstituen, disebabkan oleh alasan kecantikan perempuan semata. Kesan meremehkan, mencibir dari masyarakat selalu menyudutkan perempuan, dan ini sering muncul. Jadi, seolah perempuan jadi, dipilih tanpa mereka memiliki kapabilitas yang dipersyaratkan, dan seolah-olah perempuan dipersalahkan karena kecantikan yang mereka miliki. Belum lagi, isu-isu negatif yang sangat mudah dihembuskan untuk menyerang perempuan. Sangat menarik bagi lawan politik, ketika menyerang perempuan dengan menggunakan isu-isu asosial, karena respon masyarakat pasti akan sangat cepat.

Perempuan mengalami tekanan juga pada saat waktu pemilihan dan saat perhitungan suara. Beberapa informan menjelaskan dalam wawancara yang juga diiyakan oleh pengurus partai politik. Jadi, ketika masih di Tempat Pemungutan Suara (TPS)), perempuan harus sangat responsif dengan "menempatkan" saksi-saksi yang dapat "menjaga" suara mereka agar tetap utuh, tidak "lari" dicurangi kandidat lainnya dalam satu partai dan satu daerah pemilihan. Fenomena pencurian suara di sebuah TPS, sangat rentan terjadi, dan merugikan calon legislatif, terutama perempuan.

Perempuan berhadapan dengan kepentingan banyak pihak, yang mengharuskan mereka berhadapan langsung dengan orang lain terutama para *liyan* yang mempunyai kekuatan modal, performan, kekuasaan politik yang lebih besar. Belum lagi tekanan-tekanan dari pihak lain itu sering memanfaatkan nilai patriarki yang menyudutkan perempuan dan akibatnya, perempuan merasa tersudutkan. Kelompok dominan, bisa menekan dan menancapkan kuasa mereka atas perempuan karena kekuasaan yang mereka miliki sebelumnya. Menurut van Dijk (Wahyuni, 2008: 3), kemompok-kelompok dominan ini bisa melakukan kontrol, sebab kelompok ini mempunyai keleluasaan akses dibandingkan kelompok yang mereka dominasi seperti kepemilikan pengalaman, uang, dan pendidikan.

Regulasi, sistem Pemilu, sistem rekrutmen legislatif yang dilalui perempuan, telah menjadi pemicu terjadinya dominasi simbolik terhadap perempuan selain budaya patriarki. Ini menjadi penyebab perempuan mengalami rintangan dan hambatan dalam arena yang mereka ikuti, sepanjang perempuan ini tidak bangkit dan menghimpun segala kekuatan simboliknya untuk menepis dominasi terhadapnya. Seperti halnya

Bourdieu menjelaskan bahwa kemampuan konstitutif dari dominasi simbolik ini ditentukan oleh modal simbolik yang biasanya diperoleh oleh agen pada pertarungan simbolik yang terjadi sebelumnya, dan kesesuaian dari apa yang dinyatakan dengan realita. Sedangkan dominasi ini muncul serta terwujud pada arena karena adanya relasi-relasi dialektik antara habitus dan modal simbolik.

Inilah yang menyebabkan beberapa perempuan yang sudah pernah melewati arena rekrutmen legislatif dengan sukses (memenangkan pemilihan legislatif) pada periode sebelumnya, terhindar dari beberapa bentuk dominasi bahkan sebaliknya ia mendominasi pihak lain. Selain itu, mereka memang telah memiliki pengalaman yang lebih, mereka juga telah memiliki modal simbolik yang cukup dibandingkan perempuan yang pertama kalinya masuk dalam arena rekrutmen.

Tidak selamanya sebagai agensi, perempuan menjadi objek dari terjadinya dominasi simbolik dalam arena politiknya. Hasil penelitian menunjukkan, perempuan di Jawa Tengah mengalami kekerasan simbolik atau menjadi objek dominasi simbolik di satu sisi, dan di sisi lain perempuan juga secara perlahan mendominasi pihak-pihak lain yang ada di sekelilingnya dalam arena rekrutmen legislatif. Ini tergantung pada habitus perempuan, upaya membuat cara pandang orang menyangkut persepsi dan apresiasi bergerak ke arah tertentu.

4.5. Distingsi Perempuan dalam Proses Rekrutmen Legislatif

> "Ibu itu telaten, lembut, dan sabar. Mereka berbeda dengan calon atau DPR laki-laki ketika berhadapan dengan konstituen. Mau mendengar, *itu lho Buk*. Mereka menerima keluhan warga dengan terbuka, biasanya begitu." (wawancara 23 Februari 2018)

Di atas, adalah cuplikan wawancara dengan Dayat, salah satu Tim sukses calon perempuan (informan 3) yang menegaskan tentang mengapa informan selalu terpilih, selain tidak ia pungkiri bahwa informan memiliki modal ekonomi yang sangat baik (wawancara 2 Agustus 2018). Seperti yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, perempuan selain mengalami hambatan dan tantangan ketika memasuki ruang rekrutmen legislatif, diantara mereka juga ada yang mampu melewatinya dengan baik. Perempuan dengan segala sumber daya yang ia miliki, dapat memenangkan prses rekrutmen jika mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Di bawah ini beberapa hal yang teridentifikasi merupakan pembeda yang dimiliki oleh perempuan dalam berpolitik, diantara banyaknya laki-laki secara kuantitatif dalam rekrutmen legislatif yang terjadi pada partai politik maupun ketika perempuan berhadapan dengan konstituen.

Pertama, dalam rekrutmen partai politik. Perempuan selama ini menyikapi regulasi, dan prosedur yang harus dilalui agar mereka dapat masuk dalam rekrutmen legislatif oleh partai politik, dilakukan dengan dua jalur. Rekrutmen yang struktural (bagaimana masuk ke partai) selama ini di partai biasanya akan melalui pengkaderan, yang direkrut dari organisasi-organisasi *underbow* partai. Mereka yang mengawali karier dari kepengurusan akan mendapat prioritas. Tidak semua perempuan yang tergembleng di partai mau mencalonkan diri. Banyak kendala, seperti keluarga, pendanaan, tidak percaya diri, trauma akan diskriminasi. Belum lagi, para elit partai politik memiliki kecenderungan, mereka akan mempertahankan jabatan, posisi,

kedudukan mereka dengan berbagai cara termasuk mereka berusaha menutup kesenjangan dengan jajaran bawahan dengan berbagai cara seperti membentuk kartel. Mereka mencoba mengontrol semua hal yang terjadi dalam partai politik. Tindakan ini mempengaruhi perempuan dalam berpolitik.

Perempuan memiliki sifat yang ulet dan tangguh dalam administrasi organisasi. Ketelatenan yang mereka miliki biasanya sangat membantu posisi mereka di partai politik jika perempuan juga bisa menempatkan diri dan perannya dengan baik dalam partai politik. Banyak perempuan dalam partai politik dengan potensi mereka yang terampil dalam administrasi, membuat mereka cenderung sangat dibutuhkan di dalam partai politik. Tapi, sesungguhnya ini tergantung pada masing-masing perempuan itu sendiri. Ketika mereka mau “serius” mengabdi dan bekerja di dunia politik, peluang akan besar bagi perempuan didukung kemampuan berkomunikasi pada kolega/ teman dalam partai politik. Kemampuan dalam ber-administrasi organisasi dalam partai politik menjadikan perempuan dipercaya melaksanakan managemen organisasi ini sering menjadi modal perempuan dalam partai politik yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kader perempuan dalam partai politik misalnya PKB di Jawa Tengah, memiliki modal jejaring sosial yang solid yang mereka miliki dari aktifitasnya dalam organisasi yang mereka geluti sebelum bergabung dalam partai politik. Masyarakat dalam jejaring sosial ini sangat solid memberi dukungan kepada perempuan, sehingga ketika mereka mencalonkan diri sebagai legislatif, maka masyarakat dalam jejering sosial ini akan menjadi calon konstituen yang memberi kontribusi terhadap keberhasilan partai politik.

Gaya dan performan perempuan di Jawa Tengah yang cenderung lembut, mengalah dan tidak menginginkan konflik terbuka seringkali menjadikan mereka lebih mudah diterima dalam partai politik. Memang banyak kepentingan dalam partai politik, namun sering kali sifat perempuan di atas menjadikan mereka mampu bertahan dan beradaptasi dengan baik dalam partai politik. Peneliti berkesempatan wawancara dengan asisten dari informan 1 dan informan 3 pada waktu dan tempat yang berbeda yang mengungkap data tentang kepribadian, sikap mereka terutama ketika keduanya merespon stimulus dari pihak lain, terutama yang berupa serangan dari lawan politik. Menurut Imam (Asisten informan 1) bahwa informan 1 adalah sosok yang tenang ketika mengalami permasalahan.

> "Ibu tidak emosional, diserang pihak lain, beliau biasa saja. Kadang *curhat*, *ngendiko* beberapa masalah bahkan masalah yang sangat berat, Ibu menghadapi dengan tenang, berhadapan dengan orang yang menyerang ya beliau santai, komunikasi seperti biasa." (Wawancara 1 Maret 2018).

Hal serupa juga disampaikan oleh asisten informan 3, dalam wawancara ketika menunggu jadwal bertemu informan 3, Suci dalam wawancara 26 Maret 2018 juga menjelaskan hal yang tidak jauh berbeda. Informan 3 adalah sosok yang terbuka, baik dan tidak pernah dendam kepada lawan politiknya. Informan 3 selalu menghindari konflik, jika terjadi masalah terhadapnya dengan orang lain. Ini salah satu informan mudah diterima oleh partai politik ketika tahun 2013, ia memutuskan untuk berpindah partai politik sebagai kendaraan perjuangan.

Perempuan (khususnya mengenai informan) memiliki kemampuan lobi yang sangat baik, sering kali mereka berada dalam posisi-posisi strategis dalam partai politik. Adakalanya, patron berperan dalam fase ini, yang memberi peluang, dan

memberi tempat pada perempuan dalam posisi strategis dalam kepengurusan partai politik.

Kedua, memenangkan suara konstituen. Pada tahap ini, perempuan berhadapan langsung dengan konstituen mereka. Bagaimana mereka mampu meraup suara dari kostituen dalam mayarakat yang berpegang pada tradisi patriarki yang sangat lekat. Perempuan di tengah banyaknya daftar calon laki-laki harus memiliki keunggulan. Perjuangan perempuan, jika mereka sungguh-sungguh akan terdorong oleh kemampuan, sumber daya mereka. Banyak perempuan yang menyadari bahwa keberadaan mereka dalam politik sangat diuntungkan melalui *afirmative action*. Wawancara mendalam dengan beberapa konstituen perempuan, mereka menjelaskan memilih karena kedekatan mereka dengan calon perempuan. Calon perempuan, lebih terbuka terhadap konstituen. Mereka dianggap lebih ramah, mengakomodasi aspirasi dan kepentingan konstituen, belum lagi terhadap basis massa masing-masing yang selalu menguatkan, dan ini membuat perempuan dekat dengan konstituen mereka. Informan 1 menjelaskan;

> "tidak mungkin tidak terbuka dengan mereka yang dari awal memberi dukungan, konstuen saya sangat dekat sebelum saya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Bagaimana saya akan menjauh dari mereka? Niat awal saya adalah mewakili mereka. Konstituen tahu itu, mereka menilai. Pada periode kedua saya mencalonkan diri, seperti yang saya sampaikan, daerah pemilihan saya dipindah oleh DPC, karena ada yang merasa terancam dengan keberadaan saya. Bagaimana pemilih akan memilih, kalau yang bersangkutan tidak membuka pintu lebar untuk konstituennya. Masyarakat sekarang banyak yang pinter, paham tentang pilihannya." (wawancara 5 Januari 2018)

Perempuan, ada pada diri mereka daya tarik diri yang terhubung dengan politik. Kalimat tersebut agaknya berlebihan jika dibaca sepintas. Namun, peneliti ingin

menjelaskan mengapa kalimat di atas cukup pantas dituangkan. Peneliti menyadari bahwa calon laki-lakipun mempunyai daya tarik yang mendukung mereka berpolitik. Analogi yang peneliti gunakan misalnya dua periode Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memenangkan pemilihan presiden saat itu, karena elektabilitasnya didukung oleh simbolisasi dari fisik dan kharisma yang ada pada SBY. Beberapa media pada saat itu mengungkap dukungan kaum perempuan kepada SBY. Demikian, dengan keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, juga didukung oleh simbol-simbol perempuan ideal, salah satunya kecantikan perempuan. Memang, tidak semua pilihan terhadap calon perempuan dipengaruhi oleh daya tarik wajah dan kecantikan perempuan. Namun, tidak dipungkiri hal ini juga mempengaruhi pilihan konstituen. Terungkap dalam wawancara, bahwa perempuan yang "enak dilihat", menarik, gaya bicara yang mantap sangat mudah untuk diingat oleh konstituen mereka. Ditambah lagi, jika ia dekat dan aspiratif dihadapan konstituen di daerah pemilihan mereka.

Berbeda dengan laki-laki, perempuan dalam politik di Jawa Tengah juga "membawa" kondisi keluarga mereka dihadapan publik. Kehidupan pribadi perempuan secara utuh menjadi hal yang menarik bagi masyarakat pemilih, sebagai standar atau indikator penilaian apakah perempuan tersebut layak dipilih oleh masyarakat atau tidak. isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan baik yang langsung berhadapan dengan publik maupun yang sangat privat seolah harus menjadi konsumsi publik. Mereka harus ideal sama antara panggung depan dan panggung belakang mereka. Biasanya yang menjadi ukuran juga adalah kepatutan perempuan dalam

keluarga sesuai dengan konstruksi masyarakat. Khalayak tidak akan memberi toleransi kepada perempuan yang tidak berada pada jalur kepatutan dalam masyarakat.

Dalam menghadapi semua tekanan dan persoalan, peneliti mengidentifikasi sifat yang dimiliki perempuan adalah lentur, peka, lugas dan berkomitmen. Perempuan akan lebih peka terhadap berbagai persoalan yang ada menghampirinya. Dengan menggunakan "rasa" nya yang lebih tajam, perempuan akan menemukan berbagai indikasi jika ada hal-hal yang tidak baik terhadapnya. Selebihnya yang terjadi adalah perempuan akan lebih memiliki dorongan untuk segera selesaikan masalah. Kecenderungan perempuan tidak bisa membiarkan persoalan-persoalan tidak segera diselesaikan. Ia akan dengan lugas mengkomunikasikan segala persoalan yang menimpanya.

Gender adalah sebuah konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku dan karakteristik emosional antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Konstruksi sosial inilah yang kemudian memberi dampak pada keduanya, antara laki-laki dan perempuan, hak-haknya yang sering diposisikan tidak setara disebabkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

Tampaknya, yang sering terjadi dalam pembedaan ini adalah kurangnya keberpihakan pada perempuan. Perempuan ditempatkan dalam konstruksi yang seringkali berada di belakang laki-laki, yakni kesempatannya, hak-haknya dalam beberapa lini kehidupannya. Padahal jika mau jujur dan fair, perempuann mampu jika diberi kesempatan yang sama seperti halnya para laki-laki diberi kesempatan. Beauvoir menjelaskan secara jelas dalam *The Second Sex* nya, bahwa perempuan digambarkan

sebagai sosok mengikuti apapun kemauan laki-laki. Namun, jika perempuan diberi kesempatan, mereka akan bisa membuktikan kemampuannya. Perempuan akan menunjukkan pembeda mereka dengan *the others*. Disinilah, jika dikaitkan dengan konsep Bourdieu mengenai pembedaan yang bermakna sebagai tindakan membedakan seseorang untuk memperlihatkan kelasnya dalam masyarakat.

Pada praktik sosial yang dialami, perempuan memiliki pembeda dengan laki-laki dalam arena rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, yang seringkali dapat menjadi fokus perjuangan simbolik, yang mana dari sini akan terlihat perempuan berusaha membangun keunggulan dari pembedaan itu sendiri. Perempuan menjadi politisi, tentu ia tidak berhenti menjadi perempuan. Keperempuan yang ada padanya, harus menjadi utama, sebab pada dirinya terdapat kekuatan intelektual dan segala potensi, kemampuan, kepekaan yang berbeda dengan politisi yang lainnya. Sifat perempuan yang lebih ulet dan tangguh, performan mereka yang lebih lembut, mengalah dan tidak menginginkan konflik terbuka sehingga lebih mudah diterima dalam partai politik, serta pada perempuan, daya tarik mereka saat berhadapan publik menjadi sebab-sebab mereka dapat dengan mudah diterima.

Kehadiran perempuan dalam politik, sebenarnya telah mengubah arena politik yang sebelumnya penuh konflik menjadi lebih baik dan damai. Ini tidak terlepas dari habitus perempuan yang cenderung *soft* (lembut) lentur atau fleksibel dalam menghadapi segala persoalan dalam dunia politik. Perempuan lebih cenderung menghindari dominasi dalam segala pilihan tindakannya. Demikian juga dalam hasil penelitian terhadap para informan perempuan yang telah memenangkan arena

rekrutmen berkali-kali, konstruksi ideal habitus mereka yang menggunakan *soft power* ini sangat mendukung mereka, dan menjadi modal untuk bertahan dalam proses rekrutmen berikutnya. Habitus perempuan ini, kemudian menjadi disposisi yang terumus sebagai pola-pola yang berbeda (menjadi *distinction*) perempuan dengan *the others*, misalnya; keyakinan tentang politik bukan sebagai arena dominasi, perempuan menghindari permusuhan dan perdebatan, perempuan lebih peka dan sangat perhatian terhadap konstituen, dan kepemilikan modal perempuan berupa performan; penampilan yang cantik, menarik, dan narsis.

Jadi, seperti halnya deskrepsi yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai eksistensi perempuan dalam berpolitik, agar mereka mampu membentuk persepsi positif tentang politik, perempuan harus mampu menunjukkan eksistensinya yang menjadi kekuatannya berpolitik.

4.6. Strategi-strategi Perempuan dalam Proses Rekrutmen Legislatif

Terhadap ketujuh perempuan yang menjadi informan utama, bahwa mereka memanfaatkan strategi *conservation* dan *subversion*, atau gabungan antara keduanya. Melalui kedua strategi ini, seorang perempuan yang menduduki posisi dalam politik baik secara individual maupun kolektif dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi mereka dan menerapkan prinsip-prinsip hierarkhisasi yang paling sesuai dengan wacana yang mereka produksi sendiri. Beberapa perempuan memang terkesan menggunakan strategi mempertahankan, membangun wacana-wacana yang sudah mapan melalui modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik dan modal sosial yang

dimiliki dalam masyarakat, namun mereka juga harus tetap selalu memperbaiki diri dan dinamis menyesuaiikan perubahan baik regulasi, budaya dan sebagainya.

Para informan memiliki pengalaman dalam proses rekrutmen, minimal 3 kali periode Pemilu. Mereka sudah memiliki konstituen yang sangat solid. Wawancara mendalam dengan salah satu kader Golkar tempat informan 4 mengabdi selama ini diperoleh data bahwa informan 4 lahir dari keluarga Golkar, yang memiliki kekuatan emosional yang sangat tinggi dengan partai, termasuk loyalitas dan totalitasnya terhadap Golkar sangat luar biasa. Informan 4 "aman" dalam partai karena jenjang kariernya mulai dari bawah dan memiliki akar rumput (konstituen) yang jelas di daerah pemilihannya, yang membuat kader Golkar lain sulit menandingi elektabilitasnya selama ini. "Sulit bagi kader lain untuk mengalahkan, partai lainnya juga sudah sadar *nggak* mungkin bisa ambil *loyalis* bu…(informan 4)", demikian informasi diperoleh (wawancara 28 Juni 2018).

Dalam hal ini, modal kemudian dimanfaatkan oleh agen yang sudah berkuasa untuk produksi dan atau reproduksi wacana secara terus menerus secara masif, sehingga orang-orang yang menjadi tempat "tinggal" wacana ini tidak sadar telah dikuasai oleh agen. Dalam wawancara dengan beberapa informan, diperoleh informasi bahwa mempertahankan apa yang sudah mereka dapatkan dalam setiap periode bukan hal yang mudah juga. Bagi informan 1, pengalaman di dunia politik selama ini sangat berharga, bahkan menjadi jalan baginya untuk tetap melaju maju dalam Pemilu berikutnya. Misalnya dalam penentuan nomor urut calon, informan 1 duduk menjadi calon dari partai pengusung dengan nomor urut 1 pada daerah pemilihannya. Ini

terjadi, karena partai politik melihat dan menilai kinerja informan 1 yang bagus selama ini. Selain itu, menurut informan 1, ia selalu berjuang membangun wacana, membangun *image* yang positif dalam masyarakat. Informan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan konstituennya, mendengarkan segala keluhan dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya, dan sebagainya. Dengan demikian, wacana yang terbagun dalam masyarrakat menjadi positif untuk perempuan, tidak bisa gender dan sebagainya. Sejauh ini, strategi yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya sebatas pada hal hal yang dilakukan perempuan secara langsung saja.

Informan perempuan yang sudah "berkuasa" untuk memproduksi dan atau mereproduksi wacana secara terus menerus secara masif dalam masyarakatnya yang dilakukan dengan cara-cara;

a. Memperkuat modal yang mereka miliki, sepenuhnya untuk memenangkan suara konstituen di daerah pemilihannya. Kepemilikan modal masing-masing informan ini sangat berbeda jenis dan bagaimana cara penggunaannya dalam masyarakat mereka. Informan 3, adalah perempuan dengan kepemilikan modal ekonomi yang sangat kuat atau besar. Modal ekonomi yang ia miliki, sangat berperan selain modal sosial yang ia kuasai ketika menghadapi proses rekrutmen legislatif. Informan 1, mengakui modal ekonomi yang ia miliki tidak begitu besar, hanya cukup untuk biaya kampanye saja. Ia lebih mengandalkan kepemilikannya terhadap modal simbolik, modal sosial dan modal budaya. Dalam mempertahankan sumber-sumber penguasaannya terhadap politik, maka yang ia lakukan adalah menjaga komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya dengan baik, lebih terbuka

terhadap mereka dengan cara mendengarkan, menjalankan perannya dengan baik sebagai pembawa aspirasi masyarakatnya. Informan 4 juga dikenal sangat longgar dalam penggunaan modal ekonomi. “Beliau *nyah nyoh* (sangat dermawan) kalo sama konstituen, mana ada yang berani kayak beliau”, demikian hasil wawancara dengan salah satu kader Golkar.

b. Membangun kapabilitas diri. Perempuan ada kalanya mempunyai kekuasaan politik, tapi tidak mempunyai kekuatan, legitimasi dan otoritas. Gambaran yang dikemukakan Moore ini yang membuat dalam perjalanan karier mereka, informan perempuan banyak belajar dan membangun kapabilitas personal mereka. Pengalaman membentuk mereka proses dengan baik, bagaimana menghadapi bermacam persoalan dan kendala dalam rekrutmen legislatif. Apalagi di tengah isu *afirmative action*, keterwakilan perempuan selama ini, informan juga berusaha untuk konsen pada kepentingan perempuan yang diharapkan dapat ia bawa.

c. Memproduksi wacana. Perempuan menjadi subjek atau agen yang baik dalam memproduksi wacana tentang dirinya dalam masyarakat. Ia mewacanakan dirinya, menjadi orang yang pantas dipilih dalam arena rekrutmen legislatif. Wacana yang diproduksi perempuan, meyakinkan publik tenta ng dirinya. Misalnya, perempuan sering mengkomunikasikan peran dan posisi dirinya dalam keluarganya melalui media sosial. Ini serasa biasa, bagi publik ini memperjelas bahwa perempuan masih dapat melakukan, menjalankan peran mereka dalam urusan domestik walaupun mereka menjalankan tugas politik. Namun, ini memiliki makna yang mendalam agar publik lebih percaya kepada perempuan. Selain itu, wacana juga

diproduksi oleh perempuan melalui kinerja mereka yang baik dan maksimal dalam partai politik, dalam masyarakat. Perempuan menepis anggapan ketidakcakapan perempuan berpolitik selama ini, bahwa perempuan memiliki keterbatasan kemampuan berpolitik dan kurangnya waktu mereka untuk berpolitik. Sehingga terbentuk/ terproduksi wacana positif yang baru tentang dirinya. Wacana baru ini berkembang jauh berada dalam wilayah ketidaksadaran masyarakat. Secara perlahan masyarakat yakin kalau ada perempuan yang mampu berpolitik, mereka tidak merasakan kalau wacana ini merubah paradigma mereka. Demikian, wacana ini juga bermanfaat untuk perempuan yang semakin percaya diri dalam berpolitik.

d. *Soft power* untuk menghegemoni. Perempuan mengambil jalan tengah ketika berhadapan dengan segala tekanan dalam masyarakat yang muncul dari budaya patriarki. Perempuan memperjuangkan hak-hak politik mereka tanpa mengabaikan konstruksi patriarki yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa perempuan mengkondisikan situasinya secara berhati-hati, dengan harmoni yang ia ciptakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik mereka. Dengan cara apa perempuan mengkondisikan? Mereka secara *soft power* mempengaruhi pihak-pihak di sekitar mereka, sebagai alternatif karena melakukan “perlawanan” secara ekstrim terhadap konstruksi patriarki, dan kondisi lainnya juga tidak memungkinkan dalam arena politik khususnya dalam proses rekrutmen politik. Perempuan menata situasinya melawan hegemoni terhadapnya, dengan *soft power* yang ia ciptakan dalam arena politik. Sebagaimana Antonio Gramsci menjelaskan, hegemoni adalah dominasi

atau nilai-nilai kehidupan, norma atau budaya masyarakat yang bisa berubah terhadap kelompok masyarakat yang secara sadar akhirnya mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh perempuan ini tidak merasa tertindas, bahkan mereka merasa sebagai hal yang seharusnya terjadi. Bahkan, jika pada titik keberhasilan perempuan, mereka mengkondisikan situasinya dalam berpolitik melalui *soft power* untuk menghegemoni juga.

Strategi-strategi perempuan di atas, tidak bisa dilepaskan dari habitus perempuan dalam menghadapi ranah/ arena mereka serta modal-modal yang mereka miliki dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Bourdieu memang tidak secara eksplisit dalam teorinya menjelaskan konsepnya mengenai strategi-strategi agensi dalam ranah mereka. Namun, kiranya hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam mewujudkan apa yang diinginkan, agen harus mempunyai strategi yang tidak selalu berupa cara untuk menghadapi pertempuran seperti yang dimaksud oleh Bourdieu. Strategi ini juga mengarah pada terwujudnya doxa baru dalam masyarakat.